



**EVALUASI PEMBERDAYAAN ANGKATAN KERJA MELALUI
PELATIHAN KERJA OLEH UPT-PK DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONDOWOSO**

*Evaluation of Workforce Empowerment Through Employment Training by UPT-
PK Manpower and Transmigration Bondowoso Regency*

SKRIPSI

Oleh
Asari Nurachmawati
NIM 090910201077

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**EVALUASI PEMBERDAYAAN ANGKATAN KERJA MELALUI
PELATIHAN KERJA OLEH UPT-PK DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONDOWOSO**

*Evaluation of Workforce Empowerment Through Employment Training by UPT-
PK Manpower and Transmigration Bondowoso Regency*

SKRIPSI

diajukan guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Administrasi Negara (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh

Asari Nurachmawati
NIM 090910201077

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Ety Soetjiaty dan Ayahanda Suwondo serta kedua Adikku Harimukti Rahmansyah dan Zonawati Tri Ety madani yang senantiasa memberikan doa, semangat, dukungan, perhatian dan kasih sayang yang tiada henti;
2. Guru-guruku sejak taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
3. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTTO

“Orang – orang yang berhasil akan mengambil manfaat dari kesalahan kesalahan yang ia lakukan, dan akan mencoba kembali untuk melakukan dalam suatu cara yang berbeda”- **Dale Carnegie**

“cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika anda memulai sekarang tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu- nunggu”- **William Feath**¹

¹ <http://www.kucoba.com/2011/07/kata-kata-bijak-dari-berbagai-sumber.html>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asari Nurachmawati

NIM : 090910201077

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Kerja Oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah digunakan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2015

Yang Menyatakan,

Asari Nurachmawati

NIM 090910201077

SKRIPSI

**EVALUASI PEMBERDAYAAN ANGKATAN KERJA MELALUI
PELATIHAN KERJA OLEH UPT-PK DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONDOWOSO**

*Evaluation of Workforce Empowerment Through Employment Training by UPT-
PK Manpower and Transmigration Bondowoso District*

Oleh

Asari Nurachmawati

NIM 090910201077

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sutomo, M.Si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Abdul Kholiq Azhari, M.Si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Kerja Oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

hari, tanggal : Rabu, 25 Februari 2015

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Ketua Penguji	Tim Penguji,	Sekretaris
Dra. Inti Wasiati, M.M NIP. 195307311980022001		Dr. Sutomo, M.Si NIP. 196503121991031003

Anggota Penguji,

1. Drs. A. Kholiq Azhari, M.Si ()
NIP. 195607261989021001
2. Hermanto Rohman, S.Sos, MPA ()
NIP. 197903032005011001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 195207271981031003

RINGKASAN

Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Program Pelatihan Kerja Oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso;

Asari Nurachmawati, 090910201077; 2015; 119 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Setiap masyarakat membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satu caranya dengan memiliki pekerjaan. Banyak masyarakat yang sudah memiliki pekerjaan, namun masih ada pekerja yang dalam melaksanakan pekerjaannya masih kurang maksimal. Sehingga perlu adanya program yang nantinya dapat membantu masyarakat dalam menambah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Oleh karena itu, Pemerintah melalui UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso melaksanakan program pelatihan kerja yang ditujukan kepada angkatan kerja baik yang sudah bekerja tetapi masih mencari kerja ataupun yang belum bekerja yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk meneliti hasil dari pelaksanaan pelatihan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2010 Karena menurut peneliti pelatihan ini sudah berlangsung selama 4 tahun, maka pasti sudah menimbulkan dampak atau perkembangan dari peserta pelatihan.

Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di 5 desa yaitu, di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari, Desa Sumber Kemuning dan Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan, Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang dan Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Teknik penentuan informan yaitu dengan menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan model interaksi Miles dan Hubberman. Teknik keabsahan data menggunakan peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut: dari segi efektifitas, para peserta sudah memiliki keterampilan yang sudah didapatkan selama mengikuti program pelatihan dan dampak yang dialami peserta pelatihan tidak semuanya membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diikuti. Dari segi *Adequacy* (kecukupan), dampak dari mengikuti pelatihan kerja ada yang memuaskan kebutuhan dan kesempatan peserta untuk berkembang dalam bidang yang ditekuni dalam bentuk penghasilan dan bisa juga untuk dijadikan konsumsi pribadi dan ada yang tidak karena, mereka tidak memiliki modal untuk memulainya dalam bentuk uang dan juga mengalami kesulitan dalam memasarkan barang yang sudah mereka hasilkan. Dari segi *Equity* (kesamaan atau perataan), dampak pelatihan kerja mengalami ketidaksamaan atau perataan atas dampak yang diterima oleh peserta pelatihan kerja. Dari segi *Responsiveness* (responsivitas), Pelatihan ini mampu memuaskan kebutuhan dalam hal memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, namun ada peserta pelatihan yang kurang mengalami kepuasan dalam hal penghasilan setelah mengikuti pelatihan tersebut. Dari segi *Appropriateness* (ketepatan atau kelayakan), Pelatihan kerja yang diterima oleh peserta telah tepat sasaran. dimana mereka adalah perwakilan dari desa yang dapat diberdayakan terlebih mereka sudah memiliki keterampilan dasar. Dari segi kelayakan yang diterima oleh peserta berbeda – beda. Ada yang masih ada yang menekuni usaha yang mereka geluti, ada yang kembali ke pekerjaan awal, ada yang mampu berinovasi sehingga mampu membuat produk baru dan ada juga yang memanfaatkan produk yang mereka hasilkan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Adapun kendala – kendala yang mereka alami sebagai dampak mengikuti pelatihan kerja yaitu, pertama masalah peralatan yang tidak semua memperoleh bantuan peralatan dan walaupun memperoleh alat, alatnya kurang berfungsi dengan baik. Kedua adalah masalah modal, karena modal yang mereka peroleh tergantung pada pesanan atau menyesuaikan harga bahan baku. Kendala terakhir adalah cara memasarkan barang yang telah dihasilkan. Dilihat dari beberapa peserta, mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan barang.

PRAKATA

Puji syukur kepada Allah SWT sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Kerja Oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso. Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Keberadaan dan dedikasi banyak orang merupakan bagian penting yang turut berperan atas selesainya karya ini. Karenanya, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada saya sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, tanpa ada halangan sesuatu apapun;
2. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Dr. Sasongko, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si., selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
5. Bapak Dr. Sutomo M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat, saran, pikiran, waktu, dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini selama penulis menjadi mahasiswa;
6. Drs. Abdul Kholiq Azhari M.Si., selaku dosen pembimbing pendamping sekaligus dosen pembimbing akademik yang selama penulis menjadi

mahasiswa bimbingannya selalu memberi nasihat, saran, bimbingan dan perhatiannya;

7. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran pada saat menguji sehingga skripsi ini dapat disempurnakan;
8. Kedua orang tuaku yakni Ayahanda Suwondo dan Ibunda Ety Soetjiaty, kedua adikku Harimukti Rahmansyah dan Zonawati Tri Ety Madani serta Kakak – Kakak Sepupu yang tidak bisa disebut satu persatu yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan nasihat, sehingga penulis lebih bersemangat dan berusaha untuk berfikir lebih maju;
9. Kepala UPT-PK Dinas Tenaga Kera dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso, Kepala Desa Mandiro serta Semua Peserta Pelatihan Kerja Meubelair tahun 2010, terima kasih telah memberikan izin penelitian, memberikan informasi yang dibutuhkan penulis dan meluangkan waktu untuk keperluan penelitian ini;
10. Sahabat – sahabatku Rafika Dyah Ayumi dan Diana Saraswati, Sahabatku di tuli – tuli Farieta, Astri, Ozi, Tuti, Ila, Meyland, Romlah, dan Yogi.
11. Teman-teman angkatan 2009 Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan inspirasi, bantuan, semangat, dan perhatian serta dukungan yang sangat luar biasa, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga segala budi baik yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah memberikan usaha yang maksimal, namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dapat berupa kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, Februari 2015

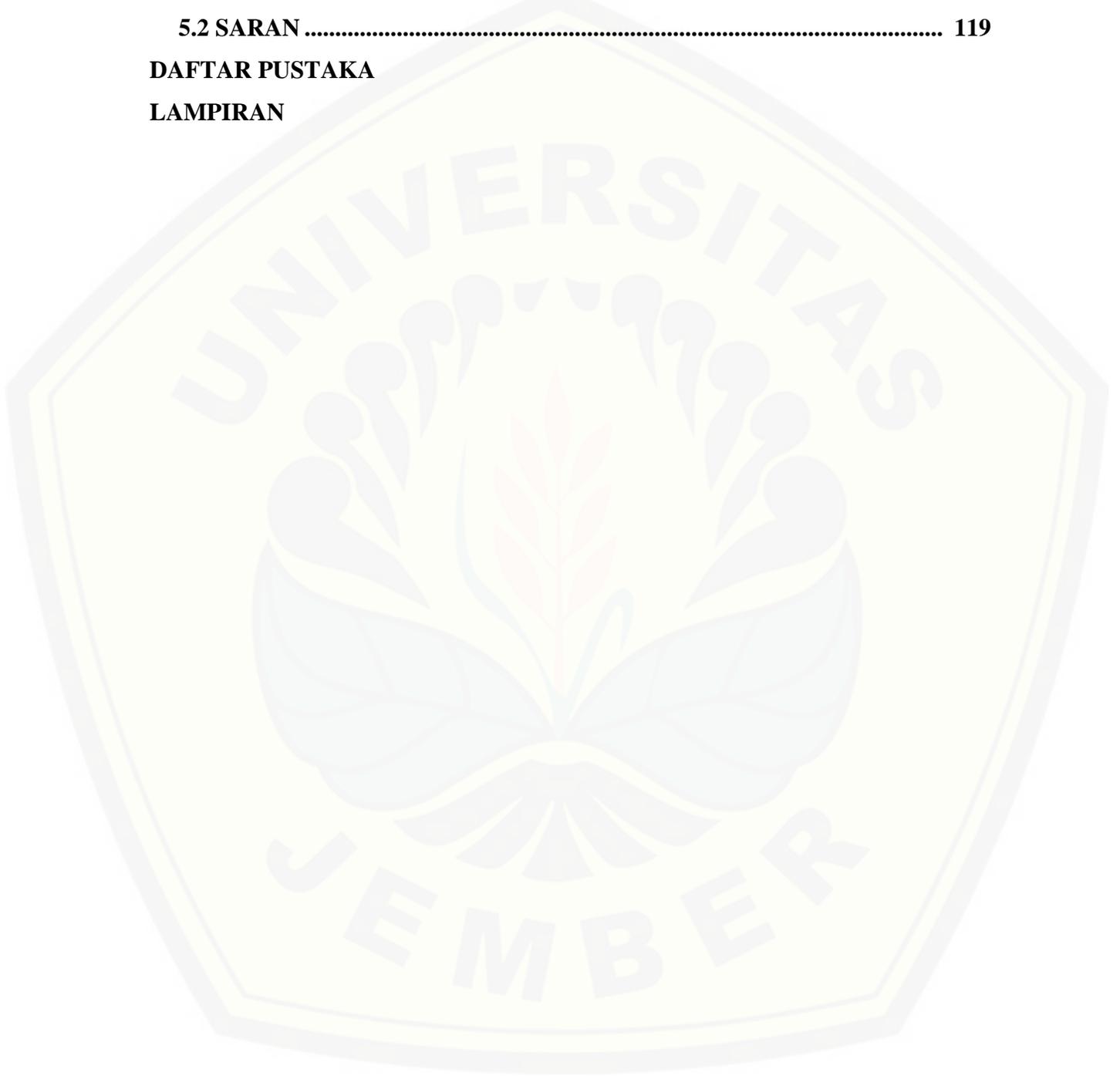
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB.1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	17
1.3 Tujuan Penelitian	18
1.4 Manfaat Penelitian	18
1.4.1 Manfaat Akademis	18
1.4.2 Manfaat Praktis	18
1.4.3 Manfaat Pribadi.....	18
BAB.2 TINJAUAN PUSTAKA	19
2.1 Pengembangan Sumber Daya manusia	19
2.2 Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.3 Pelatihan Kerja.....	27
2.4 Konsep Evaluasi	33
2.5 Kerangka Berfikir	42
BAB.3 METODE PENELITIAN.....	43
3.1 Fokus Penelitian	43
3.2 Tipe Penelitian	44

3.3 Tempat dan waktu penelitian.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Menentukan Informan.....	46
3.6 Metode Analisis Data	48
3.7 Teknik Keabsahan Data	50
BAB 4 PEMBAHASAN	51
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	51
4.1.1 Latar Belakang.....	51
4.1.2 Visi dan Misi UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	52
4.1.2.1 Visi.....	52
4.1.2.2 Misi	52
4.1.3 Tugas pokok dan fungsi UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	54
4.1.3.1 Tugas Pokok	54
4.1.3.2 Fungsi	54
4.1.4 Jenis – Jenis Pelatihan UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso	54
4.1.5 Sasaran danProgram Pelatihan UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso.....	55
4.1.5.1 Sasaran.....	55
4.1.5.2 Program	56
4..1.6 Instruktur UPTPK Disnakertran kabupaten Bondowoso	57
4.2 Pelaksanaan Pelatihan Kerja	57
4.3 Hasil Pelatihan Kerja.....	78
4.4 Analisis Evaluasi Hasil Pelatihan Kerja Tahun 2010	103
4.4.1 Analisis Hasil Wawancara Dari Akibat Pelaksanaan Pelatihan Kerja Pada Tahun 2010	107

BAB 5 PENUTUP.....	117
5.1 KESIMPULAN.....	117
5.2 SARAN	119
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Data Ketenagakerjaan	2
1.4 Jumlah pelatihan dan peserta tahun 2012-2013	14
1.5 Data Peserta Pelatihan Kerja Tahun 2010.....	15
4.1 Program pelatihan	56
4.2 Program pelatihan yang tersedia	65
4.3 Jenis pelatihan dan jumlah peserta pelatihan tahun 2010	73
4.4 Hasil pelatihan kerja meubelair tahun 2010.....	88
4.5 Hasil pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan tahun 2010	91
4.6 Hasil pelatihan kerja pande besi tahun 2010.....	94
4.7 Hasil pelatihan kerja Pakan Ternak dan Bokashi tahun 2010.....	98
4.8 Hasil pelatihan kerja kewirausahaan dan teknologi tepat guna (TTG) tahun 2010.....	101
4.9 Peserta Yang Masih Menekuni Dan Yang Tidak Lagi Menekuni Program Pelatihan Kerja Yang Diikuti	102
4.10 Verifikasi evaluasi Hasil pelaksanaan program pelatihan kerja pada tahun 2010	110

DAFTAR DIAGRAM

Tabel	Halaman
1.1 Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama	6
1.2 Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut kelompok umur dan lapangan pekerjaan utama Kabupaten Bondowoso	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Prosedur Pelatihan.....	31
3.1 Analisis Dengan Menggunakan Model Interaktif.....	49
4.1 Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.....	53
4.2 Lemari Piring	81
4.3 Kusen Dan Pintu	82
4.4 Hasil kerajinan tangan berbahan dasar kayu.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Permohonan Ijin melaksanakan Penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- B. Surat Izin Penelitian dari UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.
- C. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian di UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.
- D. Pedoman wawancara
- E. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur
- F. Data peserta pelatihan tahun 2010
- G. Dokumentasi penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap masyarakat pasti memiliki keinginan untuk memperoleh hidup yang lebih baik, dimana semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terpenuhi. Namun kesejahteraan sendiri akan sulit didapatkan oleh masyarakat apabila masyarakat tersebut belum memiliki penghasilan yang cukup untuk menghidupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, tantangan untuk memperoleh pekerjaan bertambah sulit, karena semakin selektifnya pemilihan calon tenaga kerja. Mereka dituntut untuk memiliki keterampilan yang nantinya mampu menunjang pekerjaannya kelak.

Menurut Suroto (1992:17), tenaga kerja (manpower) adalah kemampuan manusia untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Menurut Undang – Undang Pokok Ketenagakerjaan No. 14 tahun 1969, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tidak semuanya calon tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan, karena semuanya tergantung pada kebutuhan, permintaan, dan penyediaan tenaga kerja. Menurut Suroto (1992:11), Kebutuhan tenaga kerja ialah jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menghasilkan sejumlah produk masyarakat dalam satuan waktu tertentu. Permintaan tenaga kerja adalah kebutuhannya yang sudah didasarkan atas kesediaan membayarkan upah tertentu sebagai imbalannya(Suroto, 1992:11). Persediaan tenaga kerja sendiri memiliki arti jumlah orang yang tersedia, mampu dan bersedia untuk melakukan pekerjaan(Suroto, 1992:11). Oleh karena itu, calon tenaga kerja harus memiliki keterampilan untuk menunjang pekerjaannya kelak, apabila

tenaga kerja tidak memiliki keterampilan yang cukup maka akan sulit bagi mereka untuk memperoleh pekerjaan.

Lahan di Kabupaten Bondowoso cukup luas dan sebesar 90,08 persen digunakan untuk pertanian yaitu persawahan, tanah kering, perkebunan, kehutanan, rawa dan tambak. Sedangkan sisanya sebesar 7,25 persen digunakan untuk pemukiman, industri, padang rumput, pertambangan, lahan yang sementara tidak digunakan dan lainnya. Bila dirinci menurut penggunaannya, lahan terluas digunakan untuk kehutanan yaitu sebesar 35,77 persen. Kemudian urutan terluas berikutnya adalah lahan yang digunakan untuk tegalan/tanah kering 27,66 persen dan digunakan persawahan sebesar 20,74 persen. Sedangkan yang digunakan pemukiman sekitar 4,69 persen. Lahan terkecil digunakan untuk industri di bawah 1,00 persen (Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso). Cukup banyak potensi yang dimiliki di daerah ini, apabila didukung dengan tenaga kerja yang terampil maka bisa dimanfaatkan dengan baik. Jumlah penduduk di Kabupaten Bondowoso cukup banyak walaupun tidak mencapai 1 juta jiwa, dan 2/3 penduduknya masuk dalam kategori penduduk usia kerja. Berikut adalah data mengenai data jumlah penduduk dan tenaga kerja di Kabupaten Bondowoso.

Tabel 1.1 : Data penduduk dan tenaga kerja

No	INDIKATOR	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah Penduduk	736.772	740.917	773.502	752.800
2	Penduduk usia kerja	564.640	574.079	577.684	577.585
3	Angkatan kerja	380.152	382.433	385.191	389.032
4	Penduduk bekerja	367.471	370.454	373.464	377.796
5	Tingkat Pengangguran terbuka	12.681	11.979	11.727	11.235
6	Tingkat pengangguran (presentase)	2,25	2,08	2,03	1,94

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso

Penduduk usia kerja yang merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas, sesuai dengan ketentuan dalam UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Penduduk usia kerja didalam tabel diatas terdiri angkatan kerja yang menurut Suroto

(1992:28) adalah sebagian dari jumlah penduduk dalam usia kerja yang mempunyai pekerjaan dan yang tidak mempunyai pekerjaan, tapi secara aktif atau pasif mencari suatu pekerjaan dan bukan angkatan kerja menurut Barthos (1999:18) adalah yang terdiri dari penduduk yang mengurus rumah tangga, murid atau mahasiswa, penerima pendapatan dan lain- lain. Pada tahun 2010 jumlah angkatan kerja adalah 380.152 jiwa, namun penduduk bekerja hanya sekitar 367.471 jiwa dan pengangguran terbuka sekitar 12.681 jiwa. Penduduk bekerja menurut Barthos (1999:17) adalah melakukan kegiatan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam satu minggu yang lalu dan waktu bekerja harus berurutan dan tidak terputus sedangkan pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang sungguh – sungguh tidak memiliki pekerjaan.

Dilihat dari tabel 1.1, Dari tahun 2010 tingkat pengangguran yang semula 2,25 persen pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi hanya 1,94 persen. Walaupun angka pengangguran menurun, namun besar kemungkinan angka tersebut juga bisa bertambah. Misalnya, siswa atau mahasiswa yang baru saja menyelesaikan *study*-nya atau juga karyawan yang dulunya bekerja namun sekarang sudah berhenti sehingga menganggur belum lagi yang sudah lama menganggur dan juga masih ada yang ingin mencari pekerjaan tambahan. Untuk sekarang ini yang perlu untuk difikirkan adalah bagaimana cara mengurangi angka pengangguran setiap tahunnya, tetapi tidak hanya mengurangi angka pengangguran saja melainkan juga bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Semakin banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan, sehingga hal itu menjadi salah satu penyebab yang membuat setiap masyarakat perlu untuk mencari penghasilan tambahan. Kata “mampu” dalam melaksanakan pekerjaan menunjuk pada tiga hal, pertama mampu fisik (yaitu sudah cukup umur, jasmani sudah cukup kuat), kedua mampu mental (yaitu mempunyai mental sehat), dan yang ketiga secara yuridis cukup mampu dan tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan. Sedangkan kata “bersedia”

berarti orang yang bersangkutan dapat secara aktif maupun secara pasif mencari pekerjaan(Suroto, 1992:12).

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk membahas mengenai penduduk dan tenaga kerja pada tahun 2010, karena pada tahun tersebut angka pengangguran terbukanya paling tinggi selama empat tahun terakhir dan tahun setelahnya angka pengangguran semakin menurun. Pada tahun 2010 banyaknya masyarakat yang sudah bekerja berdasarkan umur diatas 15 tahun adalah berjumlah 373.090 jiwa dari jumlah penduduk usia kerja berjumlah 564.640 jiwa. Untuk angkatan kerja sendiri yang merupakan sebagian dari penduduk yang masuk dalam usia kerja pada tahun yang sama yaitu berjumlah 380.152 jiwa yang terdiri dari penduduk bekerja yang berumur 15-64 tahun berjumlah 367.471 jiwa dan pengangguran terbuka berjumlah 12.681 jiwa. Menurut Barthos(1999:18), penduduk yang bekerja digolongkan menjadi 2 jenis pekerjaan yaitu:

a. Pekerjaan utama

Jika seseorang hanya mempunyai satu pekerjaan maka pekerjaan tersebut digolongkan sebagai pekerjaan utama. Dalam hal pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari satu, maka penentuan pekerjaan utama adalah waktu terbanyak yang digunakan. Seddang jika waktu yang digunakan sama maka penghasilan yang terbesar sebagai pekerjaan utama. Jika peghasilan dan waktu yang digunakan sama maka pekerjaan utama tergantung kepada jawaban responden.

b. Pekerjaan sambilan / tambahan

Adalah pekerjaan lain di samping pekerjaan utama. Selain itu penduduk yang bekerja dapat dibedakan menurut jenis pekerjaan dan lapangan pekerjaan / lapangan usaha.

Selain itu, penduduk dengan status pekerjaan utama terbagi menjadi 6 jenis status pekerjaan utama yang dijabarkan sebagai berikut (<http://sp2010.BPS.go.id> diakses tanggal 3 maret 2015).

1. Berusaha sendiri adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung resiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta

tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
3. Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
4. Buruh/karyawan/pegawai adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang. Pekerja yang tidak mempunyai majikan tetap, tidak digolongkan sebagai buruh/karyawan/pegawai tetapi sebagai pekerja bebas. Pekerja dianggap memiliki majikan tetap jika memiliki satu majikan yang sama dalam sebulan terakhir, khusus pekerja pada sektor bangunan dianggap buruh jika bekerja minimal tiga bulan pada satu majikan.
5. Pekerja bebas, mencakup pekerja bebas di usaha pertanian dan non pertanian. Pekerja bebas di pertanian, adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) di usaha pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Usaha pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan perburuan, termasuk jasa pertanian. Majikan adalah orang atau pihak yang memberikan pekerjaan dengan pembayaran yang disepakati.
6. Pekerja keluarga atau tak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha tanpa mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Diatara ke enam jenis pekerjaan utama, pekerjaan yang sama sekali tidak menguntungkan bagi para pekerja adalah pekerja keluarga atau tak dibayar. Hal ini karena walaupun mereka telah bekerja keras untuk membantu orang lain tetapi mereka tidak mendapatkan upah, baik dalam bentuk uang maupun barang sehingga bisa juga juga disebut sebagai pekerja sukarela.

Dibawah ini tabel yang menjabarkan mengenai penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan status pekerjaan utama.

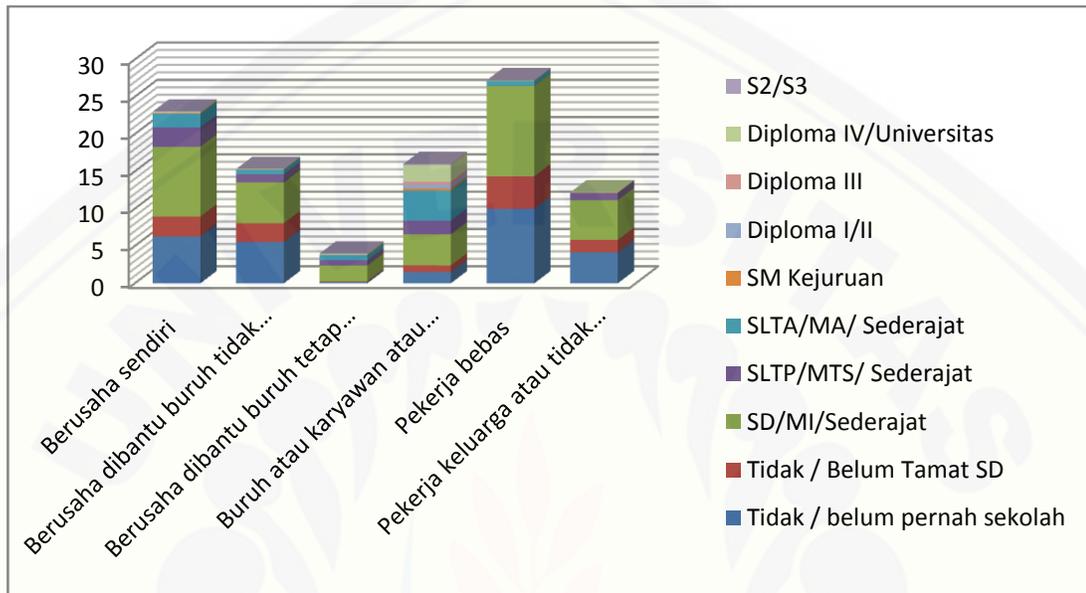


Diagram 1.1: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan dan Status Pekerjaan Utama

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010-Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dilihat dari data diatas dapat diketahui bahwa status pekerjaan utama yang paling banyak dikerjakan oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso adalah 26.9 persen sebagai pekerja bebas dan yang paling rendah adalah status pekerjaan utama yang berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar sebesar 3.5 persen. Tingginya jumlah pekerja bebas diantara status pekerjaan lainnya karena sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bondowoso bekerja dibidang usaha pertanian dan non pertanian. Hal ini semakin jelas apabila kita melihat dari data penduduk berumur 15 tahun keatas menurut kelompok umur dan lapangan pekerjaan utama.

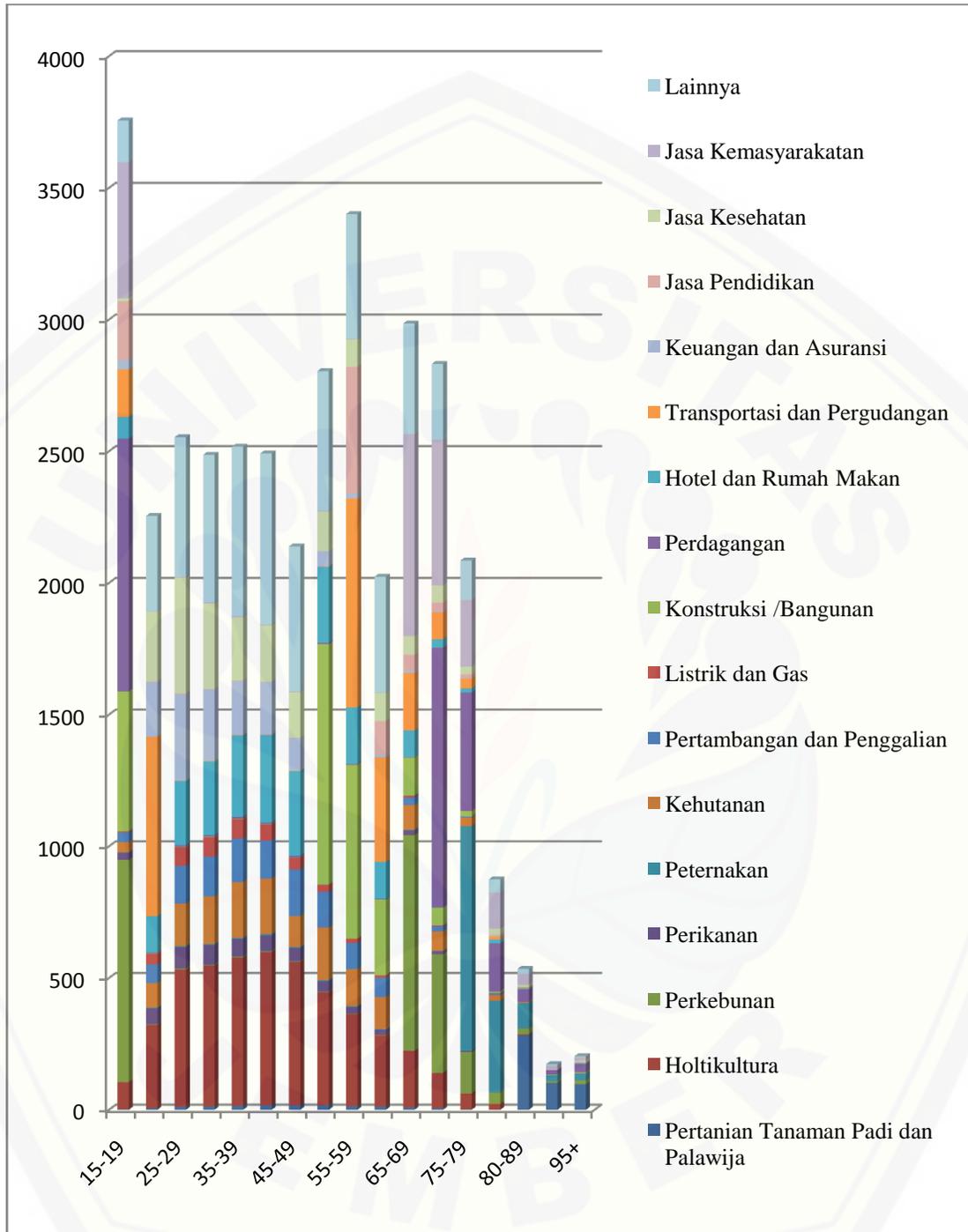


Diagram 1.2: Penduduk berumur 15 tahun keatas menurut kelompok umur dan lapangan pekerjaan utama Kabupaten Bondowoso

Sumber: Data Sensus Penduduk 2010-Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Dari data diatas sudah jelas bahwa mata pencaharian sebagai petani adalah pekerjaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Selain itu kita dapat melihat bahwa cukup banyak masyarakat yang termasuk dalam pekerja keluarga atau tidak dibayar dimana walaupun mereka sudah bekerja keras untuk membantu namun mereka seperti pekerja sukarela dimana mereka tidak memperoleh penghasilan baik dalam bentuk barang ataupun uang dan juga bisa disebut sebagai kategori setengah penganggur, belum lagi masih ada pengangguran yang sama sekali belum memperoleh pekerjaan yang biasa disebut pengangguran terbuka. Menurut Hamalik (2000:7), secara lebih khusus tenaga kerja pada hakikatnya mengandung aspek – aspek sebagai berikut.

1. Aspek potensial, bahwa setiap tenaga kerja memiliki potensi – potensi hereditas yang bersifat dinamis yang terus berkembang dan dapat dikembangkan. Potensi – potensi itu antara lain : daya mengingat, daya berpikir, daya berkehendak, daya perasaan, bakat, minat, motivasi dan potensi – potensi lainnya.
2. Aspek professional, dan atau vokasional, bahwa setiap tenaga kerja memiliki kemampuan dan keterampilan kerja atau kejuruan dalam bidang tertentu, dengan kemampuan dan keterampilan itu, dia dapat mengabdikan dirinya dalam lapangan kerja tertentu dan menciptakan hasil yang baik secara optimal.
3. Aspek fungsional, bahwa setiap tenaga kerja melaksanakan pekerjaannya secara tepat guna, artinya dia bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam bidang garapan yang sesuai pula, misalnya seorang tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang elektronik seyogiannya bekerja dalam bidang pekerjaan elektronika, bukan bekerja sebagai tukang kayu atau bangunan.
4. Aspek operasional, bahwa setiap tenaga kerja dapat mendayagunakan kemampuan dan keterampilannya dalam proses dan prosedur pelaksanaan kegiatan kerja yang sedang ditekuninya.

5. Aspek personal, bahwa tiap tenaga kerja harus memiliki sifat – sifat kepribadian yang menunjang pekerjaannya. Misalnya, sikap mandiri dan tangguh, bertanggung jawab, tekun dan rajin, mencintai pekerjaannya, berdisiplin dan berdedikasi tinggi.
6. Aspek produktivitas, bahwa tiap tenaga kerja harus memiliki motif berprestasi, berupaya agar berhasil, dan memberikan hasil, dan memberikan hasil dari pekerjaannya, baik kuantitas maupun kualitas.

Dari aspek yang telah dijelaskan diatas dapat disimpulkan, bahwa SDM merupakan salah satu faktor penentu pembangunan dimana potensi dan kemampuan yang dimiliki masyarakat menentukan kelangsungan kehidupan masyarakat. Konsep pembangunan menurut Susanto(dalam Anwas, 2013:41) adalah perubahan, pertumbuhan, pemenuhan kebutuhan, peningkatan martabat dan harga diri. Menurut Anwas (2013:44), pembangunan yang berpusat pada manusia juga harus berbasis pada kebutuhan dan potensi masyarakat, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan potensi apa yang dimiliki masyarakat untuk bisa dikembangkan. Menurut Mangum dalam Suroto (1992:14), SDM adalah semua kegiatan manusia yang produktif dan semua potensinya untuk memberikan sumbangan yang produktif kepada masyarakat. Apabila tenaga kerja yang sudah produktif namun masih kurang dalam segi potensinya, Maka, tenaga kerja tersebut perlu untuk dikembangkan. Pengembangan ini dirasa penting untuk meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia.

Sedarmayanti (2009:27) mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia (*human resouces development*) sebagai berikut.

Secara makro, adalah: suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan di sini mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan dan pengolahan sumber daya manusia.

Secara mikro, dalam arti lingkungan unit kerja (Departemen atau organisasi yang lain), maka sumber daya manusia adalah: tenaga kerja atau pegawai di dalam suatu organisasi, yang mempunyai peran

penting dalam mencapai keberhasilan. Fasilitas yang canggih dan lengkap, belum merupakan jaminan akan berhasilnya suatu organisasi tanpa diimbangi oleh kualitas manusia yang akan memanfaatkan fasilitas tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia yang cocok untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat adalah pengembangan sumber daya manusia secara makro, karena pengembangannya mencakup perencanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia dan hasilnya nanti bisa memandirikan masyarakat. Berdasarkan pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 menempatkan peningkatan kualitas SDM Indonesia sebagai salah satu fokus Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Tenaga Kerja Indonesia yang besar jumlahnya, apabila ditingkatkan kualitasnya dan dapat dioptimalkan pelayagunaannya, akan dapat menjadi modal dasar pembangunan yang kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing nasional di pasar global. Untuk itu, maka seluruh instansi peningkatan kualitas SDM Indonesia yang ada di berbagai sektor dan daerah, perlu dioptimalkan pemanfaatannya dan disinerjikan operasionalnya.

Dalam perencanaan tenaga kerja hendaknya diperhatikan pula “*supply induced*”. Pengertian yang terkandung disini yaitu bahwa manusia Indonesia harus aktif menciptakan kesempatan kerja sendiri, karena tidak tersedianya pekerjaan bagi mereka. Dengan demikian, kemudian mereka bergerak dalam sektor informal (Barthos, 1995:33). Menurut Siswanto (2005:3), penyusunan perencanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang harus disusun minimal meliputi:

1. Penduduk dan tenaga kerja
2. Kesempatan kerja
3. Pelatihan kerja
4. Produktifitas tenaga kerja
5. Hubungan industrial
6. Kondisi lingkungan kerja
7. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja

Perencanaan tenaga kerja yang salah satunya dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso adalah program pelatihan kerja. Pemerintah melalui UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso melaksanakan program pelatihan kerja yang ditujukan kepada masyarakat yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan ataupun yang masih belum memiliki pekerjaan. Pengertian pelatihan (Hamalik, 2000:10) sendiri adalah suatu program yang meliputi serangkaian tindak (upaya) yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional ke pelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektifitas dalam suatu organisasi.

Menurut pasal I ayat 9 Undang - Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Pelatihan yang dijelaskan diatas dalam pelaksanaannya harus lebih terarah pada peningkatan kemampuan dan keahlian sumberdaya manusia, agar tercipta kreatifitas dalam diri masyarakat sendiri, sehingga masyarakat dapat mengembangkan inovasinya sesuai bakat dan minat untuk membuka lahan usaha baru. Dengan adanya usaha baru tersebut, masyarakat dapat memperoleh penghasilan dari apa yang mereka pelajari sebelumnya dari program yang telah dijalankan pemerintah. Pelatihan yang dijalankan memiliki dampak positif dimana peserta pelatihan akan memperoleh tambahan pengetahuan sekaligus kreatifitas sehingga mereka memiliki peluang membuat usaha sendiri, dan dari usaha tersebut nantinya mampu menyerap tenaga kerja yang sekaligus mengurangi angka pengangguran.

Oleh karena itu, pemerintah melalui UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso melaksanakan program pelatihan kerja dimana pelatihan kerja ini

bertujuan untuk memberdayakan masyarakat Bondowoso. Menurut Mardikanto(2009), mendefinisikan pemberdayaan sebagai berikut ini :

“upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat (miskin) untu mampu dan berani bersuaraserta kemampuan dan kepribadian untuk memilih alternative perbaikan kehidupan yang lebih baik”.

Secara lebih rinci Slamet (dalam Anwas, 2013:49), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri.istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi,memiliki kesempatan, melihat, dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerja sama, tahu sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik membahas mengenai pelatihan kerja sebagai usaha dalam memberdayakan masyarakat karena menurut Parsons (dalam Anwas, 2013:49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Oleh karena itu pelatihan kerja merupakan salah satu program yang cocok untuk memberdayakan masyarakat, karena setelah mengikuti program pelatihan para peserta nantinya memperoleh keterampilan dan kemampuan sesuai dengan program pelatihan yang mereka ikuti dan mereka juga bisa membuka usaha sendiri sehingga bisa memberikan kersempatan bekerja untuk orang lain.

Menurut buku pedoman penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, peningkatan kualitas SDM Indonesia, terutama yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan kompetensinya, telah diatur dalam Undang – Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional dan Undang – Undang No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Kedua undang – undang tersebut mengamanatkan peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi yag menitikberatkan pada kemampuan kerja yang

mencakup kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan ditempat kerja sehingga masyarakat memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perusahaan sehingga peluang yang dimiliki peserta lebih besar.

Sebagaimana ditetapkan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1997 tentang ketenagakerjaan yang telah dilakukan perubahan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2000 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk.

1. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimum
2. Menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional
3. Memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraannya
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya

Pelatihan kerja sendiri telah dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Pemerintah republik Indonesia No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur. Pelatihan kerja ini menitikberatkan untuk penempatan di sektor informal dan usaha mandiri serta meningkatkan kualitas bagi tenaga kerja di berbagai bidang kejuruan yang diarahkan untuk penempatan maupun kerja mandiri, sehingga tersedia tenaga terampil dan berdaya saing di semua kejuruan yang dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan pelatihan kerja ini disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia di daerah Bondowoso apa yang perlu diperbarui dan apa yang perlu ditambah. Pelatihan kerja ini boleh diikuti oleh siapa saja yang berminat atau membutuhkan pelatihan kerja tersebut sesuai dengan program pelatihan yang diinginkan oleh calon peserta pelatihan, yakni angkatan kerja.

Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso telah berlangsung selama 4 tahun terakhir mulai 2010-2013. Berikut penjabarannya.

Tabel 1.4: Jumlah pelatihan dan peserta tahun 2010-2013

No	Tahun	Jumlah Pelatihan	Jenis Pelatihan	Jumlah Peserta
1	2010	5	Pembuatan pakan ternak dan bokhasi	50 Orang
			Pande besi	10 Orang
			Anyaman bamboo dan kerajinan tangan	20 Orang
			Meubelair	9 orang
			Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)	20 orang
2.	2011	11	Pelatihan kewirausahaan (wirausaha produktif)	40 orang
			Menjahit	40 orang
			Pelatihan Pertanian Terpadu	13 Orang
			Pelatihan Salon dan Pangkas Rambut	40 orang
			Meubelair	20 Orang
			Anyaman Bambu	40 Orang
			Gerabah	40 Orang
			Prosesing	40 Orang
			Las Otogen	40 Orang
Pande Besi	20 Orang			
3	2012	3	Budi Daya Jamur dan dan Melati	30 Orang
			Packing Bubuk Kopi	90 Orang
			Handycraft	120 Orang
4	2013	9	Perbengkelan	40 Orang
			Proseing Aneka Kerupuk	20 Orang
			Salon dan Potong Rambut	60 Orang
			Tape dan Besek	20 Orang
			Meubelair	20 Orang
			Las Otogen	40 Orang
			Rajut benang	20 Orang
			Menjahit	20 Orang
			Prosesing	20 Orang
Jumlah		28		982 Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti akibat dari pelaksanaan pelatihan kerja pada tahun 2010, karena diharapkan nantinya peneliti bisa mengetahui perkembangan para peserta pelatihan selama 4 tahun setelah pelaksanaan pelatihan kerja berlangsung. Adapun jenis pelatihan yang telah dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso pada tahun 2010 dengan rincian jumlah peserta sebagai berikut.

Tabel 1.5 Data peserta pelatihan kerja tahun 2010

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1.	Pembuatan pakan ternak dan bokhasi	50 Orang
2.	Pande besi	10 Orang
3.	Anyaman bamboo dan kerajinan tangan	20 Orang
4.	Meubelair	9 orang
5.	Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)	20 orang
JUMLAH		109 Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel diatas jumlah peserta pelatihan tidak merata. Jumlah peserta ini disesuaikan dengan permintaan dari masing – masing desa yang membutuhkan pelatihan tersebut. Pelatihan pembuatan pakan ternak dan bokhasi memiliki jumlah peserta paling banyak diantara pelatihan lainnya. Hal ini dikarenakan pelatihan kerja ini dilakukan di 5 desa yang setiap desanya terdiri dari 10 orang peserta dan dilakukan dilakukan disetiap desa, namun waktu pelaksanaannya tidak dilakukan secara bersamaan melainkan bergantian. Jumlah ini juga berlaku pada pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan yang terdiri dari 2 desa yang di setiap desanya diikuti sebanyak 10 orang. Namun jumlah ini tidak berlaku pada pelatihan kewirausahaan – teknologi tepat guna (TTG) karena pelaksanaan pelatihannya dilakukan di 1 kecamatan yang diikuti 3 desa dan 1 desa yang berasal dari kecamatan lain yang wilayahnya terdekat dengan tempat pelaksanaan pelatihan kewirausahaan – teknologi tepat guna (TTG) sehingga apabila dijumlahkan pesertanya terdiri 20 orang.

Pelaksanaan pelatihan dimulai dari proses seleksi, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi hasil pelatihan. Lama pelaksanaan program pelatihan tersebut berbeda – beda tergantung jenis pelatihan. Jenis pelatihan yang dilaksanakan di setiap wilayah di Bondowoso disesuaikan dengan permintaan dari Kepala Desa yang mengetahui pelatihan apa yang cocok atau perlu untuk diajarkan di desanya. Tempat pelaksanaan pelatihan kerja sendiri berbeda – beda disesuaikan dengan kemampuan peserta untuk mencapai tempat pelatihan.

Penentuan tempat pelatihan ini menyesuaikan kebutuhan pelatihan di setiap wilayah terutama dilihat dari potensi setiap wilayah tersebut, selain itu juga dapat dilihat dari jarak yang ditempuh oleh calon peserta dari tempat tinggalnya ke tempat pelatihan apakah dapat dijangkau oleh calon peserta atau tidak. Apabila pelatihan tersebut diikuti oleh umum atau diikuti oleh sekelompok orang dalam satu desa asal jarak tempuh yang dapat dijangkau oleh peserta pelatihan maka akan dilaksanakan di UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso, apabila pelatihan diikuti sekelompok orang dalam 1 desa atau tempat tinggal peserta berada di kecamatan yang sama dan jarak yang ditempuh tidak dapat dijangkau oleh peserta maka kebutuhan makan, alat, bahan dan juga hal lain yang diperlukan dalam pelatihan akan dibawa dari UPT langsung ke tempat pelaksanaan yang ditunjuk. Setelah peserta mengikuti pelatihan kerja tersebut maka akibat yang diperoleh selama pelatihan akan menentukan kualitas sumber daya manusia.

Dari pelaksanaan pelatihan yang telah dijalankan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso kita perlu untuk mengetahui dampak dari pelatihan terhadap masyarakat, maka perlu adanya evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan pelatihan kerja tersebut. Evaluasi perlu dilaksanakan untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan pelatihan kerja terhadap peserta pelatihan yang nantinya menentukan kualitas dari peserta pelatihan sekaligus untuk mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan peserta pelatihan setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Keberhasilan dari pelaksanaan pelatihan kerja ini tidak hanya diukur dari output pelatihan saja, tetapi juga outcome pelatihan. Karena pelatihan kerja bagi pencari

kerja harus bermuara pada penempatan kerja atau memiliki kemampuan untuk membuka usaha sendiri. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Kerja oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso”**

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Emory (1985) dalam Prof Dr. Sugiyono baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah, hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Untuk mempermudah kita dalam meneliti suatu masalah, maka kita perlu perumusan masalah.

Menurut sugiyono (2006:3), Perumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Evaluasi terbagi menjadi 2 (dua) jenis evaluasi (2008:549) yaitu evaluasi formatif yang merupakan evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang di implementasikan merupakan analisis tentang seberapa jauh program diimplementasikan dan evaluasi sumatif yang merupakan bagaimana kebijakan / program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya yang juga bisa disebut sebagai evaluasi *outcome* / evaluasi dampak. Dari kedua jenis evaluasi ini peneliti memilih evaluasi dampak untuk mengetahui dampak yang diterima oleh masyarakat setelah mengikuti program pelatihan kerja. Menurut Samodra Wibawa (1995:54-60) dampak keijakan menurut unit – unit sosial terbagi menjadi 4 antara lain, Dampak individu, dampak organisasional dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Peneliti memilih dampak individu karena pelatihan yang dilaksanakan oleh UPT-PK DISNAKERTRANS Kabupaten Bondowoso langsung berdampak pada individu karena diikuti oleh individu – individu.

Berdasarkan uraian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana dampak dari pelaksanaan pelatihan kerja dalam usaha**

memberdayakan masyarakat oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso?”

1.3 Tujuan penelitian

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh setiap orang pasti memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh masyarakat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak dari pelaksanaan pelatihan kerja yang telah dilaksanakan oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2010.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

a. **Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan bagi para pembaca, sehingga dapat dijadikan referensi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.

b. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sekaligus memberikan masukan bagi pelaksanaan program pelatihan kerja, sehingga program tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

c. **Manfaat Pribadi**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hoy dan Miskel (dalam Sugiyono) mengemukakan bahwa komponenen teori itu meliputi konsep dan asumsi. Konsep merupakan istilah yang bersifat abstrak dan bermakana generalisasi, sedangkan asumsi merupakan pernyataan diterima kebenarannya tanpa pembuktian.

Berdasarkan penjabaran singkat diatas tentang konsep dan teori, penulis menggunakan konsep dasar sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Pemberdayaan Masyarakat
3. Pelatihan Kerja
4. Konsep Evaluasi

2.1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting bagi pembangunan, dimana mereka dituntut untuk terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Menurut Simanjuntak (1998:1), sumber daya manusia atau human resources mengandung dua pengertian, yaitu:

1. Sumber daya manusia (SDM) mengandung pengertian usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal ini SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertntu untuk menghasilkan barang dan jasa.
2. SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Dari kedua pengertian SDM tersebut mengandung aspek kuantitas dalam arti jumlah penduduk yang mampu bekerja, dan aspek kualitas dalam arti jasa kerja yang tersedia dan diberikan untuk produksi (Simanjuntak, 1998:1). Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara jumlah penduduk yang mampu bekerja dengan jasa yang tersedia. Di Indonesia jumlah penduduk yang mencari kerja lebih banyak apabila dibandingkan dengan kesempatan kerja yang ada, sehingga masyarakat sebisa mungkin tidak hanya menenti kesempatan kerja tetapi juga membuka lapangan pekerjaan sehingga membuka kesempatan kerja bagi orang lain.

Menurut Notoatmodjo (2003:2), masalah sumber daya manusia dapat dilihat dari dua aspek yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan dan mental). Selanjutnya, kualitas sumber daya ini juga menyangkut pada dua aspek yaitu aspek fisik (kualitas fisik) dan aspek non fisik (kualitas non fisik) yang menyangkut kemampuan bekerja, berpikir, dan keterampilan – keterampilan lain.

Untuk mengatasi masalah sumber daya manusia yaitu dengan adanya pengembangan sumber daya manusia baik secara mikro dan makro. Menurut Notoatmodjo(1998:2-3) pengembangan sumber daya manusia secara makro, adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan pembangunan bangsa. Proses peningkatan disini mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan pendidikan, pelatihan dan pengelolaan tenaga atau karyawan untuk mencapai suatu hasil optimal.

Untuk mengembangkan masyarakat agar terampil dan berkualitas maka pengembangan secara makro yang lebih tepat, karena diharapkan hasilnya masyarakat mampu mengolah atau mengelola SDA, menguasai teknologi, megkreasikan produk, mampu memasarkan produk, melatih orang lain, membuka usaha sendiri sehingga

bisa memberikan kesempatan bagi masyarakat lain. Untuk pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Bondowoso salah satunya adalah program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans yang ditujukan bagi angkatan kerja bagi yang sudah memiliki pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan.

2.2 Pemberdayaan masyarakat

Hasil dari pengembangan sumber daya manusia adalah masyarakat yang berdaya. Menurut Mardikanto dan Purwoko (2012:61), pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Selanjutnya, Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu – individu yang mengalami masalah kemiskinan.

Kartasmita (dalam Mardikanto dan Purwoko, 2012:163) menyatakan bahwa pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan obyek dari berbagai obyek pembangunan, tetapi merupakan subyek dari pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

- a. Upaya itu harus terarah (*targeted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan, yang ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai dengan kebutuhannya.
- b. Pemberdayaan harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi penerima manfaatnya. Megikutsertakan masyarakat yang menerima manfaat, mempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan

kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan (*emperowing*) masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.

- c. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri – sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah – masalah yang dihadapinya, juga lingkup bantuan yang menjadi terlalu luas kalau penaganannya dilakukan secara individu, karena itu seperti telah disinggung dimuka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Disamping itu kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih maju harus terus menerus di bina dan dipelihara secara saling menguntungkan dan memajukan.

Dalam penerapan pendekatan pemberdayaan, dapat dilakukan melalui 5P yaitu(Suharto (2005)):

- a. Pemungkinan

Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekarat – sekarat cultural dan struktur yang menghambat.

- b. Penguatan

Memperkuat pegetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan – kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- c. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok – kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat terhadap kelompok kuat dan lemah, dan

mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan kepada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

d. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan perannya dan tugas – tugas kehiduannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

e. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setia orang memperoleh kesempatan berusaha.

Adapun kompetensi atau kemampuan yang diwujudkan dalam pengetahuan dan keterampilan serta ditunjang oleh sikapnya yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat diuraikan dalam beberapa dimensi sebagai berikut (Anwas, 2013:62).

1. Kompetensi pemahaman sasaran

Kompetensi dalam memahami potensi sasaran adalah kemampuan individu dalam mengidentifikasi sumber daya yang dapat dikembangkan sesuai tuntutan masyarakat sebagai sasaran pemberdayaan. Kompetensi ini meliputi pemahaman terhadap sumber daya (alam, sosial, dan budaya) yang dimiliki sasaran terutama yang bisa dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan dan kehidupan kearah yang lebih baik.

2. Kompetensi menumbuhkan kesadaran

Menumbuhkan kesadaran merupakan bagian inti dalam pemberdayaan masyarakat. Kompetensi ini diperlukan setelah agen pemberdayaan memahami karakteristik, potensi dan kebutuhan sasaran.

3. Kompetensi komunikasi inovasi

Dimensi komunikasi inovasi adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kompetensi dan kehidupannya. Kompetensi ini mulai dari kemampuan dalam mencari informasi inovasi.

4. Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan

Kompetensi pengelolaan dan pembaharuan dapat diartikan sebagai kemampuan agen pemberdayaan dalam memfasilitasi masyarakat agar dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang terus berubah. Kemampuan ini meliputi: (1) kemampuan membangkitkan motivasi untuk berubah, (2) kemampuan menumbuhkan kepekaan terhadap perubahan lingkungan, (3) kemampuan menerapkan teknologi atau ide – ide baru dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dilapangan.

5. Kompetensi pengelolaan pembelajaran

Kompetensi pengelolaan pembelajaran adalah kemampuan agen pemberdayaan dalam menciptakan proses belajar kepada masyarakat dalam mengubah perilakunya yaitu meningkatkan kemampuan, kualitas hidup dan kesejahteraannya. Melalui belajar, masyarakat diharapkan mampu menguasai dan menerapkan inovasi yang lebih menguntungkan bagi diri dan keluarganya.

6. Kompetensi pengelolaan pelatihan

Dalam kehidupan di masyarakat seperti petani atau nelayan, kegiatan pelatihan, kursus tani, sekolah lapang, atau istilah sejenis lainnya merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan mereka menuju peningkatan kualitas hidupnya. Dalam pemberdayaan masyarakat, keragaman masyarakat akan memberikan banyak pilihan jenis – jenis pelatihan yang akan dilakukan. Dalam hal ini agen pemberdayaan perlu memberikan prioritas kebutuhan pelatihan yang memang diperlukan masyarakat. Indikator prioritas tersebut dapat dipertimbangkan dari kebutuhan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas hidupnya, kebutuhan untuk mengatasi masalah – masalah yang darurat atau, berbagai pertimbangan lainnya.

7. Kompetensi pengembangan kewirausahaan

Kemampuan mengembangkan kewirausahaan bagi agen pemberdayaan diantaranya kemampuan dalam: menanamkan sikap mental kepada masyarakat untuk berani mengambil resiko, mencari peluang, cara pandang (visi) terhadap perubahan, dan inisiatif untuk berubah.

8. Kompetensi pemandu sistem jaringan

Kegiatan pemberdayaan hendaknya diarahkan pada bentuk kewirausahaan dan kemandirian. Oleh karena itu pemberdayaan perlu menciptakan kerjasama atau jaringan dengan lembaga yang menangani produk – produk pengolahan dan pemasaran hasil serta pihak – pihak penyedia modal. Membangun jaringan ini dimulai dari membangun kelompok masyarakat yang bersinergi dengan pihak – pihak luar terkait lainnya

9. Kompetensi menumbuhkembangkan kelembagaan

Kompetensi agen pemberdayaan dalam menumbuhkan kelembagaan masyarakat meliputi: kemampuan dalam menguatkan atau kemampuan dalam membentuk kelembagaan yang belum ada tetapi diperlukan oleh masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya, mensinergikan kelembagaan yang telah ada, termasuk dengan kelembagaan yang baru terbentuk. serta membangun kerjasama kelembagaan yang ada di masyarakat dengan kelembagaan diluar masyarakat, dengan prinsip saling memahami, menghargai, dan saling menguntungkan.

10. Kompetensi pendampingan

Pendampingan merupakan salah satu kemampuan yang sangat perlu dimiliki oleh agen pemberdayaan. Kemampuan yang harus dimiliki dalam aspek pendampingan meliputi: kemampuan memberikan motivasi untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan, kemampuan dalam meningkatkan kesadaran

bahwa masyarakat termasuk keluarga miskin memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk berubah dalam meningkatkan kualitas kehidupannya.

11. Kompetensi melek TIK

Teknologi informasi dan komunikasi telah merambah dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu agen pemberdayaan dituntut untuk mampu melek teknologi ini dalam menunjang kelancaran kegiatan pemberdayaan. Melek informasi dan komunikasi bagi agen pemberdayaan dapat berfungsi mulai dari: mencari informasi yang berkembang sesuai kebutuhan pemberdayaan, sebagai media komunikasi baik dengan masyarakat maupun dengan pihak lain dalam mendukung kegiatan pemberdayaan, sebagai media pendidikan dalam menambah wawasan dan keterampilan. Sebagai media hiburan, memudahkan dalam melakukan kerjasama untuk mendukung kegiatan kemasyarakatan, serta mencari dukungan partisipasi pihak – pihak luar yang mendukung kegiatan pemberdayaan.

12. Kompetensi mencari sponsorship

Untuk mensukseskan kegiatan pemberdayaan diperlukan dukungan sponsorship. Dukungan tersebut dalam pemberdayaan dapat berupa: tenaga, pemikiran/ide, fasilitas, kerjasama dan dukungan dalam bentuk financial. Dukungan sponsorship atau dukungan dana untuk kegiatan pemberdayaan dapat diperoleh melalui organisasi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dunia usaha, yayasan, lembaga – lembaga donor, atau individu.

13. Kompetensi mempengaruhi media masa

Sebagai agen pemberdayaan, media massa penting untuk dipertimbangkan. Bagaimana mempengaruhi media massa untuk kegiatan pemberdayaan. Agen pemberdayaan dapat mengundang media massa dalam event pemberdayaan, membuat press release, atau melibatkan institusi media massa kedalam berbagai kegiatan pemberdayaan.

Dilihat dari 13 dimensi diatas peneliti memilih Kompetensi pengelolaan pelatihan, karena pelatihan merupakan aspek penting guna meningkatkan kemampuan masyarakat menuju peningkatan kualitas hidupnya dan juga semakin beragamnya masyarakat, maka akan memberikan banyak pilihan jenis – jenis pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana program pelatihan.

2.3 Pelatihan Kerja

Pelatihan sebagai proses pemberdayaan dan pembelajaran, artinya individu (anggota masyarakat) harus mempelajari sesuatu (materi) guna meningkatkan kemampuan, keterampilan dan tingkah laku dalam pekerjaan dan kehidupan sehari – hari dalam menopang ekonominya (pendapatan) (Kamil 2007:151). Simamora (dalam Kamil, 2007:4) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Menurut Instruksi Presiden No. 5 tahun 1974, pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar system pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relative singkat, dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.

Menurut Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah, guna mencapai penyelenggaraan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, efektif dalam mencapai sasaran dan efisien dalam menggunakan sumber daya, perlu adanya “perencanaan pelatihan kerja” pada tingkat nasional, daerah propinsi maupun daerah kabupaten / kota.

Perencanaan pelatihan kerja dimaksud untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun dengan memuat antara lain:

1. Bidang, jenis dan kualifikasi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta peningkatan produktifitas pada tingkat kabupaten / kota, propinsi, nasional, dan pasar kerja global

2. Jumlah kebutuhan pelatihan pada setiap bidang, jenis dan kualifikasi pelatihan
3. Rencana dan program untuk memenuhi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2
4. Rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana program tersebut butir 3

Peter (dalam Kamil 2007:6) mengemukakan, “ konsep pelatihan bisa diterapkan ketika (1) ada sejumlah jenis keterampilan yang harus dikuasai, (2) latihan diperlukan untuk menguasai keterampilan tersebut, (3) hanya diperlukan sedikit penekanan pada teori. Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, mengembangkan keterampilan atau keahlian kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan tenaga kerja (Sastrohadiwiryono, 2001:16).

Adapun Indikator prioritas kebutuhan pelatihan yang dapat dipertimbangkan dari kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan potensi masyarakat dalam meningkatkan kualitas kehidupannya, kebutuhan untuk mengatasi masalah – masalah yang darurat, atau berbagai pertimbangan lainnya (Anwas 2013:69). Sehingga dengan adanya indikator prioritas pelatihan, maka kita dapat mengetahui apa saja yang perlu untuk diketahui sebelum melaksanakan program pelatihan baik dari segi kebutuhan, potensi masyarakat dan lain – lain.

Dale Yoder (Kamil 2007:14-15) mengemukakan jenis jenis pelatihan itu dengan memandangnya dari lima sudut, yaitu:

- a. Siapa yang dilatih (*who gets trained*), artinya pelatihan itu diberikan kepada siapa. Dari sudut ini maka pelatihan dapat diberikan kepada siapa. Dari sudut ini maka pelatihan dapat diberikan kepada calon pegawai, pegawai baru, pegawai lama, pengawas, manajer, staf ahli, remaja, pemuda, oaring lanjut usia, dan anggota masyarakat umumnya.
- b. Bagaimana ia dilatih (*how he gets trained*), artinya dengan metode apa dia dilatih. Dari sudut ini pelatihan dapat dilaksanakan dengan metode pemagangan, permainan peran, permainan bisnisn pelatihan sensitivitas, instruksi kerja, dan sebagainya.
- c. Dimana ia dilatih (*where he gets trained*), artinya dimana pelatihan mengambil tempat. Dari sudut ini pelatihan dapat diselenggarakan

- ditempat kerja , di sekolah, di kampus, ditempat khusus, di tempat kursus, atau di lapangan.
- d. Bilamana ia dilatih (*when he gets trained*), artinya kapan pelatihan itu diberikan. Dan dari sudut ini pelatihan dapat dilaksanakan sebelum seseorang mendapat pekerjaan, setelah seseorang mendapat pekerjaan, setelah seseorang mendapat pekerjaan, setelah ditempatkan, menjelang pension dan sebagainya.
 - e. Apa yang dibelajarkan kepadanya (*what he is taught*), artinya materi pelatihan apa yang diberikan. Dari sudut ini pelatihan dapat berupa pelatihan kerja atau keterampilan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keamanan, pelatihan hubungan manusia, pelatihan kesehatan kerja, pelatihan pelatihan penanggulangan bencana, pelatihan penumpasan teroris dan sebagainya.

Pemerintah melalui UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso melaksanakan program pelatihan kerja yang ditujukan kepada masyarakat yang termasuk dalam angkatan kerja, baik yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan ataupun yang masih belum memiliki pekerjaan. Pelatihan kerja ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah republik Indonesia No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan Peraturan Gubernur Jawa Timur No 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur. Pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans menitikberatkan pada penempatan di sektor informal dan usaha mandiri serta meningkatkan kualitas bagi tenaga kerja di berbagai bidang kejuruan yang diarahkan untuk penempatan maupunkerja mandiri, sehingga tersedia tenaga terampil dan berdaya saing disemua kejuruan yang dibutuhkan masyarakat.

Menurut Wentling (dalam Anwas 2013:70) ada tiga tahapan dalam proses pelatihan yaitu, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. Adapun tiga aktifitas dalam program pelatihan yaitu, penilaian kebutuhan pelatihan yaitu mengumpulkan informasi untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya program pelatihan, pengembangan program pelatihan yang bertujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode – metode yang dibutuhkan guna mencapai tujuan pelatihan , dan evaluasi program pelatihan (evaluation) yang bertujuan untuk menguji

dan menilai apakah program pelatihan yang telah dilaksanakan, secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah dilaksanakan (menurut Bernadin dan Russel dalam Anwas, 2013:80). Dalam pelaksanaan pelatihan sendiri megandung aspek – aspek yang meliputi (Kamil, 2007:152):

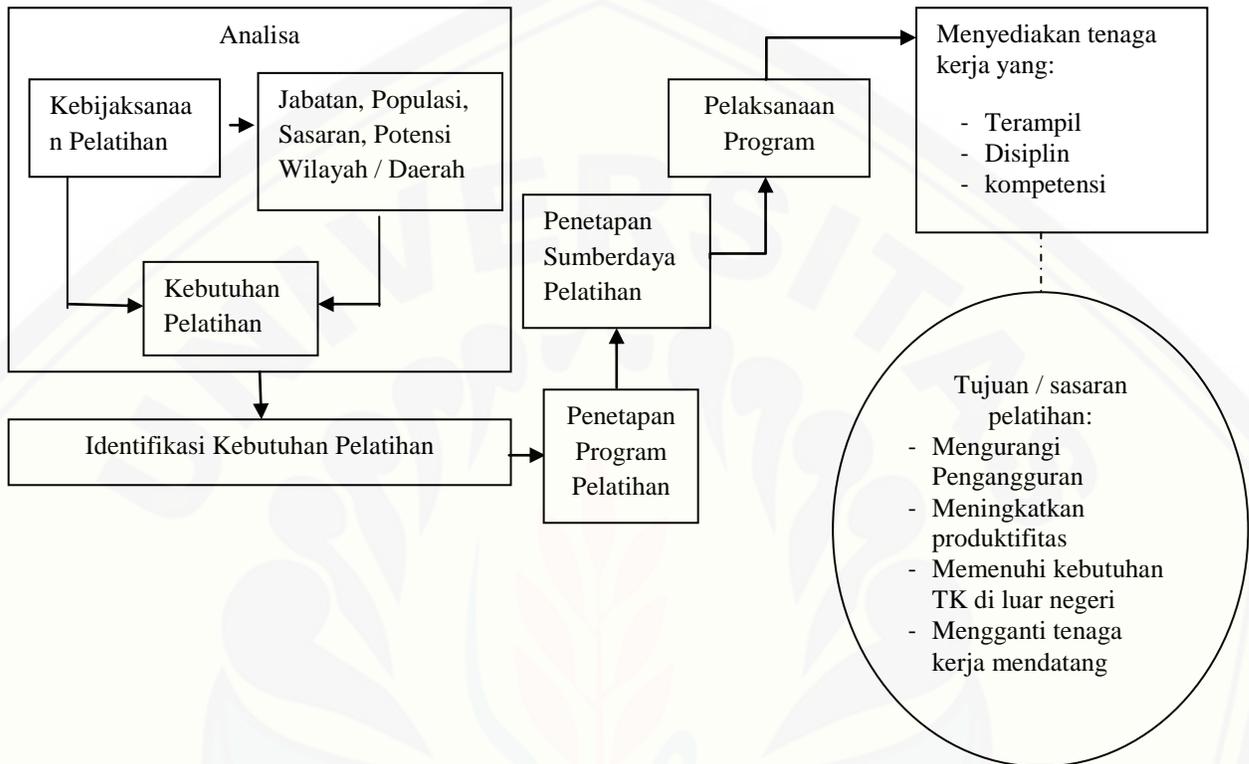
- a. Pelatih, yakni orang – orang yang memberikan pengetahuan dan keterampilan
- b. Peserta pelatihan, yakni orang – orang (dalam hal ini warga masyarakat) yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan.
- c. Proses pembelajaran, yakni peristiwa penyampaian pengetahuan dan keterampilan.
- d. Bahan pelatihan, yaitu berbagai materi yang akan disampaikan pelatih kepada peserta dalam proses pembelajaran dalam pelatihan.

Pelaksanaan pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans telah memenuhi aspek – aspek dalam pelaksanaan pelatihan. Peserta pelatihan berasal dari angkatan kerja, baik yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan ataupun yang masih belum memiliki pekerjaan namun dituntut untuk bisa membaca dan menulis dan juga memiliki kemampuan dasar tentang pelatihan yang akan diikuti. Pelatih dalam pelatihan disini UPT-PK bekerja sama dengan guru – guru smk dan lembaga pelatihan lainnya. Proses pembelajaran dan bahan pelatihan telah tersedia sesuai dengan kebutuhan pelatihan. Prinsip dasar dan kebijakan pelatihan kerja menurut buku Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah yaitu:

1. Berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan SDM
2. Berbasis pada kompetensi kerja
3. Merupakan bagian integral dan pengembangan profesionalisme sepanjang hayat
4. Diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif
5. Menjadi tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah dan masyarakat

Proses pelatihan perlu dievaluasi melalui kriteria yang telah disiapkan sehingga keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pelatihan dapat diketahui dan

dapat digunakan untuk penyusunan prosedur pelatihan dengan disertai perbaikan seperlunya terhadap diagram model proses pelatihan yang telah ada.



Gambar 2.1 Prosedur pelatihan

Sumber: Pengelola pelatihan departemen tenaga kerja pusat pendidikan dan latihan pegawai(1999)

Dari diagram diatas, prosedur pelatihan dimulai dengan menganalisa kebutuhan masyarakat akan pelatihan. Kemudian keluarlah kebijakan yang mengatur tentang pelatihan kerja yang disesuaikan dengan populasi, sasaran dan potensi daerah. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan sangatlah penting untuk mengetahui kebutuhan pelatihan seperti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Setelah terkumpul kebutuhan pelatihan yang dibutuhkan kemudian, menetapkan program pelatihan.

Program pelatihan telah ditetapkan, selanjutnya menentukan masyarakat yang mengikuti pelatihan sesuai dengan prosedur yang menjadi syarat untuk mengikuti program pelatihan tersebut, seperti peserta harus memiliki kemampuan dasar serta mengikuti proses seleksi. Peserta yang lulus dari proses seleksi berhak untuk mengikuti pelatihan dengan dilengkapi dengan alat – alat yang dibutuhkan selama proses pelatihan. Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan kerja akan menjadi lebih terampil, disiplin dan lebih kompeten, sehingga dapat mewujudkan tujuan dari adanya pelatihan itu sendiri yaitu mengurangi pengangguran, meningkatkan produktifitas, memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk di luar negeri dan mengganti tenaga kerja mendatang. Secara lebih komprehensif, dengan melihat pelatihan sebagai suatu system, Sudjana (Kamil 2007:20) mengemukakan komponen komponen pelatihan sebagai berikut:

- a. Masukan sarana (*instrumen input*), yang meliputi keseluruhan sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar masukan sarana dalam pelatihan ini mencakup kurikulum, tujuan pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan dan pengelola pelatihan.
- b. Masukan mentah (*raw input*), yaitu peserta pelatihan dengan berbagai karakteristiknya, seperti pengetahuan, keterampilan dan keahlian, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar belakang social budaya, latar belakang ekonomi, dan kebiasaan belajarnya.
- c. Masukan lingkungan (*environment input*), yaitu factor lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti lokasi pelatihan.
- d. Proses (*process*), merupakan kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar dengan warga belajardengan warga belajar peserta pelatihan
- e. Keluaran (*output*), yaitu lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran pelatihan.
- f. Masukan lain (*other input*), yaitu daya dukung pelaksanaan pelatihan, seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan situasi social – budaya yang berkembang.
- g. Pengaruh (*impact*), yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan, yang meliputi peningkatan taraf hidup, kegiatan membelajarkan orang lain lebih lanjut, dan peningkatan partisipasi dalam kegiatan social dan pembangunan masyarakat.

Adapun tujuan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat adalah “... untuk mempersiapkan anggota masyarakat agar mempunyai kemampuan profesional, dan kompetensi yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan hidupnya atau pekerjaan yang digelutinya”. Secara terperinci tujuan pelatihan dapat dijabarkan sebagai berikut(Kamil, 2010:152)

- a. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan warga masyarakat dalam mengidentifikasi potensi – potensi diri dan potensi masyarakat sehingga dapat dikembangkan dan dapat dijadikan landasan dalam pengembangan usaha.
- b. Untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan anggota masyarakat sehingga mampu menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat dan efektif.
- c. Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional.
- d. Untuk mengembangkan sikap sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerja dan bekerja sama.
- e. Untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat lebih kreatif, inovatif dalam mengembangkan usahanya.
- f. Mampu mengembangkan dan memajukan lembaga sebagai wadah dalam pengembangan usaha.

2.4 Konsep Evaluasi

Apabila suatu program telah dilaksanakan maka penting untuk dilakukan evaluasi untuk mengetahui dampak yang dihasilkan setelah program itu terlaksana. Malcolm, Provus, pencetus *Discrepancy Evaluation*, mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar yang mengetahui apakah ada selisih(dalam Tayibnapi, 2000:3). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan menyatakan bahwa evaluasi adalah “ rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar (SOP) dari program yang akan di evaluasi.

Evaluasi memiliki dua fungsi, yaitu fungsi formatif, evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan (program, orang, produk

dan sebagainya). Fungsi sumatif, evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban, keterangan, seleksi atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, pertanggungjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan duungan dari mereka yang terlibat (dalam Tayibnaps, 2000:4). Dalam Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, kegiatan evaluasi dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda yaitu:

1. Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya
2. Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
3. Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Menurut Abidin (2012:171), ada dua kelompok besar kegiatan dalam evaluasi. *Pertama*, evaluasi dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang ditetapkan. *Kedua*, evaluasi terhadap berbagai kegiatan dalam proses kebijakan. Anggapan yang melandasi kedua kelompok besar evaluasi itu, antara lain (1) terdapat kemungkinan penyimpangan, (2) kekurangan atau ketidakcocokan antara tujuan yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, (3) terdapat kemungkinan keberhasilan yang lebih baik dari yang biasa, dan diharapkan dapat menjadi contoh untuk kebijakan yang serupa di masa depan. Menurut Parsons (2008:549) evaluasi memiliki

2 (dua) jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif yang dijelaskan sebagai berikut.

1. Evaluasi formatif: evaluasi yang dilakukan ketika kebijakan atau program sedang diimplementasikan merupakan analisis tentang “seberapa jauh sebuah program diimplementasikan” (Palumbo,1987:40). Oleh karena itu, fase implementasi memerlukan evaluasi “formatif” yang memonitor cara dimana sebuah program dikelola atau diatur untuk menghasilkan umpan balik yang bisa berfungsi untuk meningkatkan proses implementasi. Rossi dan Freeman dalam Parsons (2008:549) mendeskripsikan mode evaluasi ini sebagai evaluasi pada tiga persoalan:

- a. Sejauh mana sebuah program mencapai target populasi yang tepat;
- b. Apakah penyampaian pelayanannya kosnsisten dengan spesifikasi desainn program atau tidak; dan
- c. Sumber apa yang dikeluarkan dalam melaksanakan program.

Monitoring terhadap proses implementasi ini menjadi alat bagi pembuat kebijakan, stakeholders, dan manajer untuk mengevaluasi cara program disampaikan atau dilaksanakan, sehingga penyampaian kebijakan secara lebih efektif.

2. Evaluasi sumatif: dalam fase ini siklus kebijakan Palumbo (fase dampak), informasi evaluatif “sumatif” yakni. Yakni ia berusaha mengukur bagaimana kebijakan /program secara aktual berdampak pada problem yang ditanganinya.

Adapun indikator utama untuk mengukur kinerja dibedakan menjadi dua yaitu (Purwanto dan Dyah, 2012:105): indikator *output* dan indikator *outcome*. Indikator *output* digunakan untuk mengetahui konsekuensi langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran sebagai akibat adanya realisasi kegiatan, aktivitas, pendistribusian hibah, subsidi, dan lain – lain yang dilaksanakan dalam implementasi suatu kebijakan. Indikator *outcome* yaitu untuk menilai hasil implementasi suatu

kebijakan. Dalam berbagai literature, indikator *outcome* juga disebut sebagai indikator dampak kebijakan (*policy impact*). Dalam pelaksanaan suatu kebijakan pasti menimbulkan konsekuensi sebagai hasilnya. Ada dua konsekuensi dari suatu kebijakan yang dikemukakan oleh Dunn (dalam Samodra Wibawa, 1945:5) antara lain:

a. Output

Merupakan sesuatu yang diterima oleh kelompok masyarakat tertentu baik yang menjadi sasaran kebijakan maupun kelompok lain yang tidak dimaksudkan untuk disentuh oleh kebijakan baik dalam bentuk barang, jasa, maupun fasilitas lain.

b. Dampak

Merupakan perubahan kondisi sebagai akibat dari output kebijakan baik perubahan kondisi fisik maupun kondisi social.

Hogwood (dalam Abidin, 2012:168) melihat evaluasi dalam hubungan dengan perubahan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai dampak suatu kebijakan. Dampak dari kebijakan itu tidak selalu sama seperti yang direncanakan semula. Ini berhubungan dengan ketidak pastian lingkungan dan kemampuan administrasi dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Dalam praktek, selalu ada keterbatasan untuk memahami suatu isu secara utuh. Sementara itu, juga perlu disadari bahwa kebijakan tidak boleh merasa cukup berakhir pada selesainya implementasi saja karena sebelum ada evaluasi akhir terdapat dampak yang dihasilkan.

Peneliti memilih untuk evaluasi dampak karena peneliti ingin mengetahui dampak yang diterima oleh masyarakat setelah mengikuti program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso. Samodra Wibawa (1994:5) menguraikan dampak sebagai suatu perubahan kondisi fisik maupun social sebagai akibat dari output kebijakan. Selanjutnya, Samodra Wibawa (1994:54-60) menjelaskan tentang dampak kebijakan menurut unit – unit social antara lain:

a. Dampak individu

Yaitu dampak terhadap individu meliputi dampak yang menyentuh aspek – aspek biologis / fisik, psikis, lingkungan hidup, ekonomi, social, serta personal. Dampak biologis / fisik, yaitu dampak yang menyangkut persoalan penyakit, cacat fisik dan kurang gizi. Sedangkan dampak psikis yaitu dampak yang berpengaruh pada jiwa seseorang dapat berupa cinta, emosi, stress, kepercayaan diri dan lain – lain. Dampak lingkungan dapat dicontohkan dengan pindahnya seseorang dari lingkungan tertentu karena dilaksanakannya suatu kebijakan. Untuk dampak ekonomi tidak hanya mengenai para pekerja, tetapi juga konsumen dan pemilik modal, yaitu mengenai naik turunnya pendapatan, naik turunnya keuntungan dan naik turunnya harga dan kualitas barang. Dampak social serta personal dapat dicontohkan dengan kebebasan berpendapat, berkumpul, keamanan, dan lain – lain.

b. Dampak Organisasional

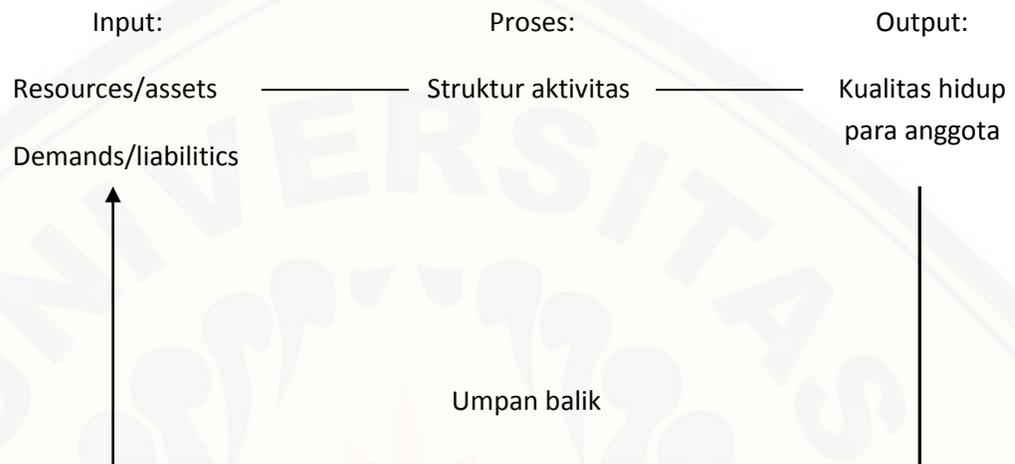
Merupakan suatu dampak terhadap organisasi atau kelompok yaitu mengenai seberapa jauh kebijakan membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan – tujuan suatu organisasi. Sementara itu, suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak tak langsung terhadap organisasi, misalnya melalui peningkatan semangat kerja para anggota organisasi.

c. Dampak Terhadap masyarakat

Dampak kebijakan terhadap masyarakat ini menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Dalam hal ini masyarakat dilihat sebagai input yang menyediakan sumber daya tetapi sekaligus menampung tuntutan, sedangkan kualitas hidup para anggotanyamerupakan output. Sementara itu, yang menjadi proses atau konversi dalam system ini adalah kegiatan yang

dilakukan oleh masyarakat untuk mengolah sumber daya guna memenuhi kebutuhan anggotanya.

Gambar 2.1 sistem masyarakat



Gambar 2.1 sistem masyarakat

Sumber: Samodra Wibawa (1994:58)

d. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Dampak terhadap lembaga dapat berupa perubahan bentuk lembaga, sedangkan terhadap system social berpengaruh terhadap tingkat kesadaran masyarakat.

Dari penjabaran diatas mengenai dampak kebijakan menurut unit – unit social, peneliti memilih dampak individu. Karena pelatihan ini diikuti oleh individu – individu, sehingga dampak yang diterima setiap anggota pelatihan berbeda – beda antara satu dengan yang lainnya. Menurut Rossi dan Freeman (dalam Parsons 2008:604), penilaian dampak adalah untuk memeperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan efek yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal.... Tujuan dasar dari penilaian dampak adalah untuk memeperkirakan “efek bersih” dari sebuah intervensi-yakni perkiraan dampak intervensi yang tidak

dicampuri oleh pengaruh dari proses dan kejadian lain yang mungkin juga mempengaruhi perilaku atau kondisi yang menjadi sasaran suatu program yang sedang dievaluasi itu.

Metodenya penilaian dampak, menurut Parsons (2008:604) antara lain sebagai berikut:

- a. Membandingkan problem / situasi/kondisi dengan apa yang terjadi sebelum intervensi.
- b. Melakukan eksperimen untuk menguji dampak suatu program terhadap suatu area atau kelompok dengan membandingkan dengan apa yang terjadi diarea atau kelompok lain yang belum menjadi sasaran intervensi.
- c. Membandingkan biaya dan manfaat yang dicapai sebagai hasil dari intervensi.
- d. Menggunakan model untuk memahami dan menjelaskan apa yang terjadi sebagai akibat dari kebijakan masa lalu.
- e. Pendekatan kualitatif dan judgemental untuk mengevaluasi keberhasilan/kegagalan kebijakan dan program.
- f. Membandingkan apa yang sudah terjadi dengan tujuan atau sasaran tertentu dari sebuah program atau kebijakan.

Menggunakan pengukuran kinerja untuk menilai apakah tujuan atau targetnya sudah terpenuhi. Menurut Wirawan (2011:21), Evaluasi keluaran (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Data yang dijarah antara lain mengenai.

1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan
2. Jumlah dan jenis orang yang dijalani apakah sesuai dengan yang direncanakan
3. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program
4. Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung secara terus - menerus.

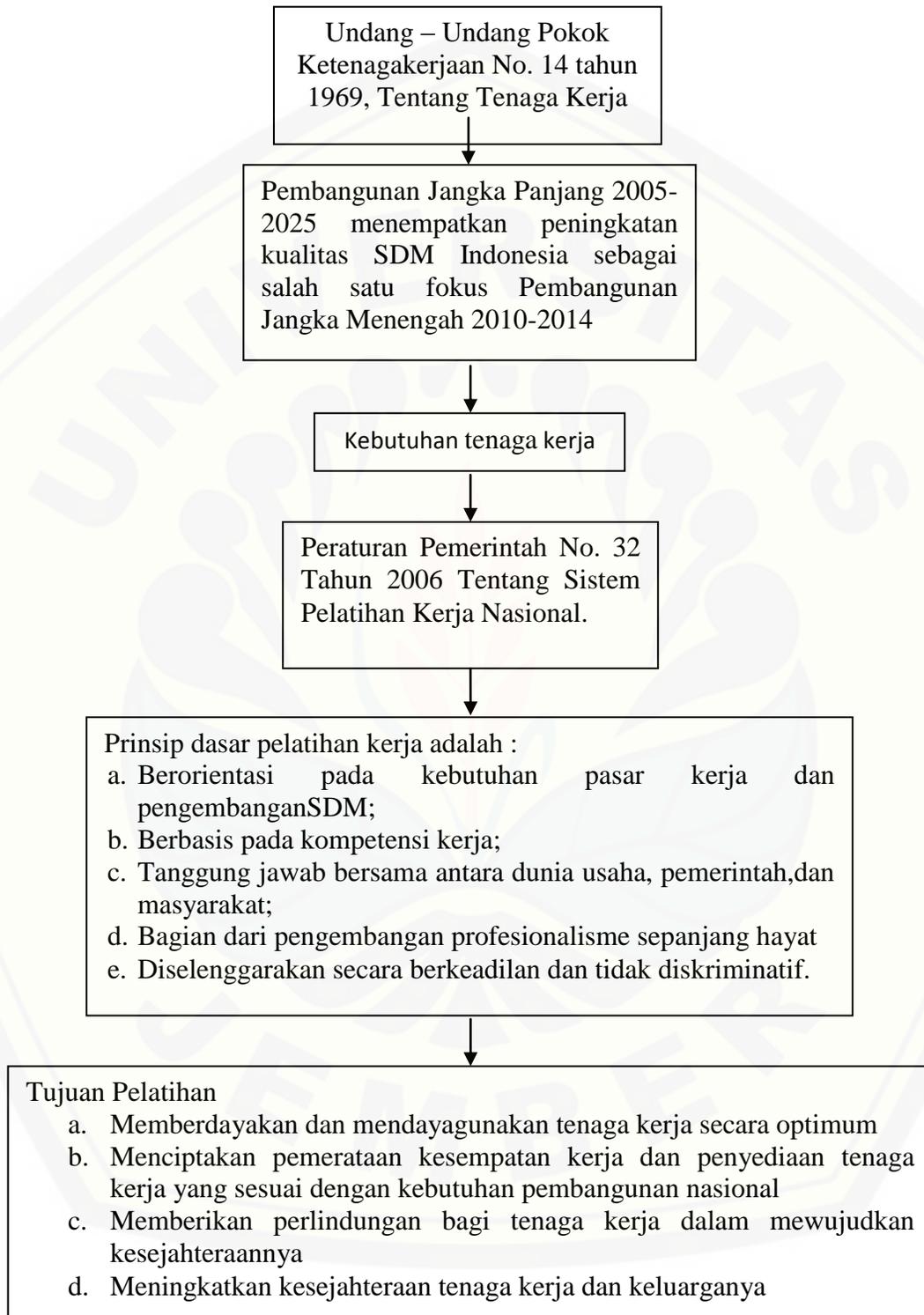
Menurut Poister (dalam Mutrofin, 2005:80), berdasarkan asumsi bahwa criteria untuk riset terapan seperti riset kebijakan juga berlaku untuk riset evaluasi, maka sekurang – kurangnya terdapat enam kriteria utama yang dapat digunakan sebagai acuan untuk riset evaluasi. kriteria – kriteria yang dimaksud antara lain sebagai berikut.

1. Effectiveness (efektifitas, keefektifan). kriteria ini berkaitan dengan apakah suatu program ataupun proyek mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan oleh program atau proyek. Pada umumnya efektivitas diukur berdasarkan unit produk, jasa layanan program atau nilai moneterinya karena secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis.
2. Efficiency (efisiensi). Riteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa banyak suatu usaha diperlukan guna mencapai hasil atau tujuan program dan proyek yang diharapkan. Jadi efisiensi berhubungan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektifitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi yang juga seringkali ditentukan atau diukur dari ongkos moneter dan ditentukan melalui perhitungan iaya perunit produk atau layanan. Suatu program atau proyek dikatakan efisien apabila mencapai efektifitas sangat tinggi namun dengan menggunakan dana atau biaya yang paling rendah.
3. Adequacy (kecukupan). Kritea ini berhubungan dengan pertanyaan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan para pihak yang terlibat dalam program atau proyek dalam memecahkan suatu masalah. Criteria kecukupan lebih menekankan pada pola hubungan antara alternative desain program atau proyek dengan hasil tujuan yang diinginkan.
4. Equity (kesamaan atau perataan). Criteria kesamaan atau perataan merujuk pada kemampuan program atau proyek dalam menjangkau berbagai kelompok masyarakat yang berbeda – beda. Jadi criteria ini berhuungan erat dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat atau hasil dan usaha secara adil.
5. Responsiveness (responsivitas). Kriteria ini digunakan untuk menjawab pertanyaan seberapa jauh hasil suatu program atau proyek dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok – kelompok masyarakat tertentu. Empat kriteria terdahulu biasanya belum dipandang memuaskan apabila belum juga menyertakan kriteria responsivitas. Apakah PKPS-BBM benar – benar menjangkau kelompok miskin atau dinikmati sejumlah kelompok keluarga berkecukupan merupakan objek kriteria

responsivitas. Termasuk misalnya apakah skema program kredit tanpa agunan benar – benar menjangkau atau dinikmati oleh unit usaha kecil, menengah dan mikro ataukah hanya dinikmati oleh kelompok usaha besar.

6. Appropriateness (ketepatan atau kelayakan). Criteria ini erat sekali hubungannya dengan rasionalitas substantif sebab pertanyaan tentang ketepatan atau kelayakan suatu program atau proyek tidak berkenaan dengan satuan criteria individu melainkan dua atau lebih criteria secara bersama-sama. Ketepatan atau kelayakan program dan proyek menunjuk pada nilai atau harga dari tujuan program atau proyek dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan – tujuan tersebut sebagaimana terpapar dalam matriks program / proyek (logika kerangka kerja program). Criteria ketepatan atau kelayakan tidak dapat didefinisikan secara baku karena dimaksudkan untuk menjangkau keluar criteria yang sudah ada. cara terbaik untuk menentukan criteria ini ialah dengan menggabung – gabungkan sejumlah criteria lain, misalnya criteria keadilan dan efisiensi, efisiensi, efektivitas, dan keadilan, dsb.

2.5 Kerangka Berfikir



BAB 3 METODE PENELITIAN

Dalam penelitian dibutuhkan cara ilmiah yang dapat digunakan untuk memperoleh data dan sebagai sarana untuk menemukan jawaban dari suatu masalah sehingga hasil penelitian nantiya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2010:6), metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, diemangan dan dibuktikan.

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian
2. Tipe Penelitian
3. Tempat dan waktu penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Penentuan Informan
6. Metode Analisis Data
7. Teknik Keabsahan Data

3.1 Fokus Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti memiliki permasalahan yang luas dan untuk menelitinya membutuhkan waktu yang lama. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian membutuhkan fokus penelitian yang memberi batasan agar peneliti dapat fokus pada hal diteliti, sehingga memudahkan penelitian dalam melakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono (2013:32), batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Peneliti meneliti dampak dari pelaksanaan pelatihan kerja yang telah

dilaksanakan oleh UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso pada tahun 2010.

Samodra Wibawa (1994:54-60) menjelaskan tentang dampak kebijakan menurut unit – unit social yang terdiri dari dampak individu, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Dalam hal ini dampak yang sesuai dengan penelitian ini adalah dampak terhadap individu karena pelatihan kerja ini diikuti oleh individu dan juga berdampak pada individu.

3.2 Tipe penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moelong, (2006:4)) menyatakan bahwa:

“Metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistic (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu kebutuhan.”

Sedangkan menurut Sugiyono (2013:1), metode penelitian kualitatif adalah:

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.”

Tipe penelitian sendiri menurut Nawawi dan Martini (dalam Ardiansyah, 2010:38) adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

3.3 Tempat dan waktu penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dipilih oleh peneliti sebagai obyek penelitian, dimana tempat penelitian ini akan dilakukan. Peneliti melakukan penelitian di Desa Tumpeng Kecamatan Wonosari, Desa Sumber Kemuning dan Desa Kalianyar Kecamatan Tamanan, Desa Koncer Darul Aman Kecamatan Tenggarang dan Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, karena tempat tersebut sebagai tempat tinggal peserta yang mengikuti pelatihan kerja pada tahun 2010 di Bondowoso. Penelitian dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 24 Agustus 2014.

3.4 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Arikunto (2006:134) mendefinisikan, teknik pengumpulan data sebagai cara – cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk megumpulkan data yang dimana cara tersebut menunjuk pada sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2010: 64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Teknik observasi ini meneliti tentang keadaan dan yang sebenarnya yang ada dilapangan, serta untuk memperoleh jawaban atas masalah sesuai dengan gejala – gejala yang ada didaerah penelitian.

b. Wawancara

Menurut Esteberg (dalam Sugiyono, 2013:72), wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic

tertentu. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa teknik wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh peneliti dengan responden yang dilakukan secara mendalam untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.

Licoln and Guba dalam Sanapiah Faisal (Sugiyono, 2013:76), mengemukakan ada tujuh langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
2. Menyiapkan pokok – pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
3. Mengawali atau membuka alur wawancara
4. Melangsungkan alur wawancara
5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
7. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

c. Metode Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi (Usman dan Akbar, 2003:73), ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen – dokumen. Contohnya : buku, artikel, foto dan lain – lain. Dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah semua dokumen yang berkaitan dengan hasil pelaksanaan pelatihan kerja yang diikuti oleh peserta pelatihan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso.

3.5 Menentukan informan

Menurut Sugiyono (2013:50), dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi social tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi

ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Selanjutnya, sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman, guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.

Berikut nama informan yang diwawancarai oleh peneliti,

1. Abd Salam, selaku Kepala UPT-PK Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten Bondowoso
2. Warsis selaku kepala desa Mandiro
3. Ansori / Pak Nur, selaku peserta pelatihan kerja meubelair
4. Karto / Pak Yunus, selaku peserta pelatihan kerja meubelair
5. Tosan, selaku peserta pelatihan kerja meubelair
6. Mail / Ismail selaku peserta pelatihan kerja meubelair
7. Hanapi, selaku peserta pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan
8. Badrih, selaku peserta pelatihan kerja pande besi
9. Hosman, selaku peserta pelatihan pembuatan pakan ternak dan bokhasi
10. Abdul Manab, selaku peserta pelatihan pembuatan pakan ternak dan bokhasi
11. Ibu Sop, selaku peserta pelatihan kewirausahaan Teknologi tepat guna (TTG)
12. Ibu Har, selaku peserta pelatihan kewirausahaan Teknologi tepat guna (TTG)

3.6 Metode analisis data

Nasution (dalam Sugiyono, 2013:89) menyatakan analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut Miles and Hubberman (dalam Sugiyono, 2013:91), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu:

a. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dilapangan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut berupa catatan dan hasil dokumentasi berupa foto serta hasil rekaman wawancara melalui ponsel, selanjutnya akan dilakukan penulisan hasil wawancara dalam bentuk transkrip wawancara.

b. Data Reduction (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, ompleks dan rumit. Mereduksi data berarti merangkum, memiliki hal – hal yang pokok, memfokuskan hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

c. Data Display

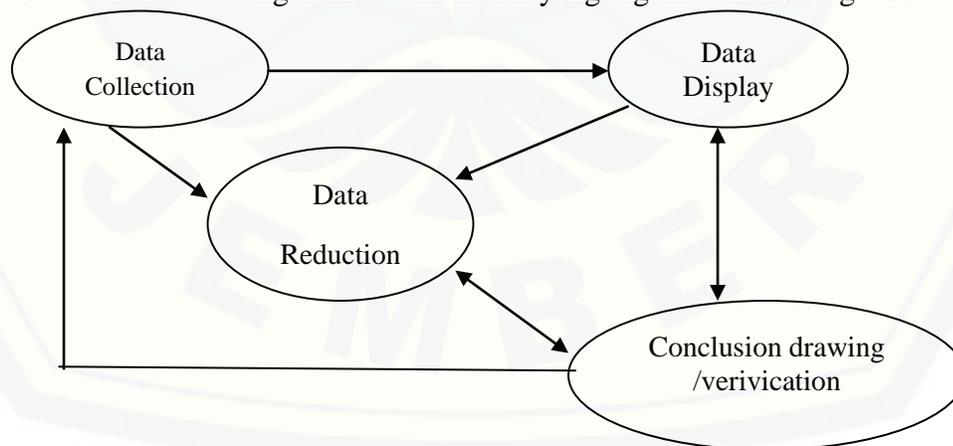
Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

d. Conclusion: drawing/verifying

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan. Komponen – komponen analisis data tersebut, keudian oleh Miles dan Huberman disebut dengan model interaktif yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1: analisis dengan menggunakan model interaktif
Sumber: Sugiyono 2010

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data ini sangat penting dalam penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013:121), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *Credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *Dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (oyektifitas). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas yang dilakukan dengan peningkatan ketekunan dalam penelitian dan triangulasi. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi – dokumentasi yang terkait dengan penemuan yang diteliti. Teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

BAB 4 PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

4.1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2008 angka pengangguran di Kabupaten Bondowoso relative cukup tinggi yaitu mencapai 13.849 orang dari jumlah penduduk usia kerja sebanyak 551.164 orang atau tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,51%. Sementara ketersediaan lapangan kerja formal di Kabupaten Bondowoso boleh dikatakan hampir tidak ada sedangkan perbandingan antara lowongan kerja dan pencari kerja di Jawa Timur pada saat itu sebesar 1:14 dengan rasio kualitas 10:4. Dengan memperhatikan keadaan ini, pemerintah Kabupaten Bondowoso dibawah kepemimpinan Bapak Bupati Drs. Amin Said Husni dalam rangka meningkatkan kualitas daya saing SDM masyarakatnya merasa perlu untuk mendirikan Balai Latihan Kerja untuk memenuhi kebutuhan dunia industri dan dunia usaha serta menciptakan lapangan kerja lokal dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada baik Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusianya.

Dengan keterbatasan APBD Kabupaten Bondowoso diusulkan pembangunan UTPK dengan menggunakan APBN dan usulan ini mendapatkan tanggapan positif dari pemerintah pusat dengan turunnya anggaran pembangunan UTPK sebesar 2 (dua) milyar rupiah. Namun karena anggaran tersebut turun pada akhir bulan Oktober 2009 dan harus selesai pertanggung jawaban pada akhir Desember 2009. Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Bondowoso sebagai SKPD yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan merasa tidak sanggup untuk melaksanakan dan anggaran tersebut dikembalikan ke pemerintah pusat dan diusulkan kembali untuk anggaran APBN tahun 2010 namun sampai dengan akhir 2011 belum ada realisasi, sehingga pada pembahasan APBD Tahun 2012 Badan Anggaran dan Tim Anggaran merasa perlu untuk segera mewujudkan keinginan

pemerintah untuk membangun UPT-PK di Bondowoso. Maka pada tahun 2012 dibangunlah Gedung Utama Balai Latihan Kerja dengan menggunakan dana APBD yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai. Dan UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Bondowoso pada tanggal 27 maret 2013 diresmikan oleh Bapak Bupati Bondowoso Drs. Amin Said Husni dan pada tanggal 24 juni 2013 Pejabat UPT-PK telah dilantik oleh Bapak Bupati Bondowoso Drs Amin Said Husni.

4.1.2 Visi dan Misi UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso

4.1.2.1 Visi

Visi dari UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso yaitu sebagai pusat pengembangan tenaga kerja yang kompeten, disiplin dan mandiri serta mampu berdaya saing mengisi kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri.

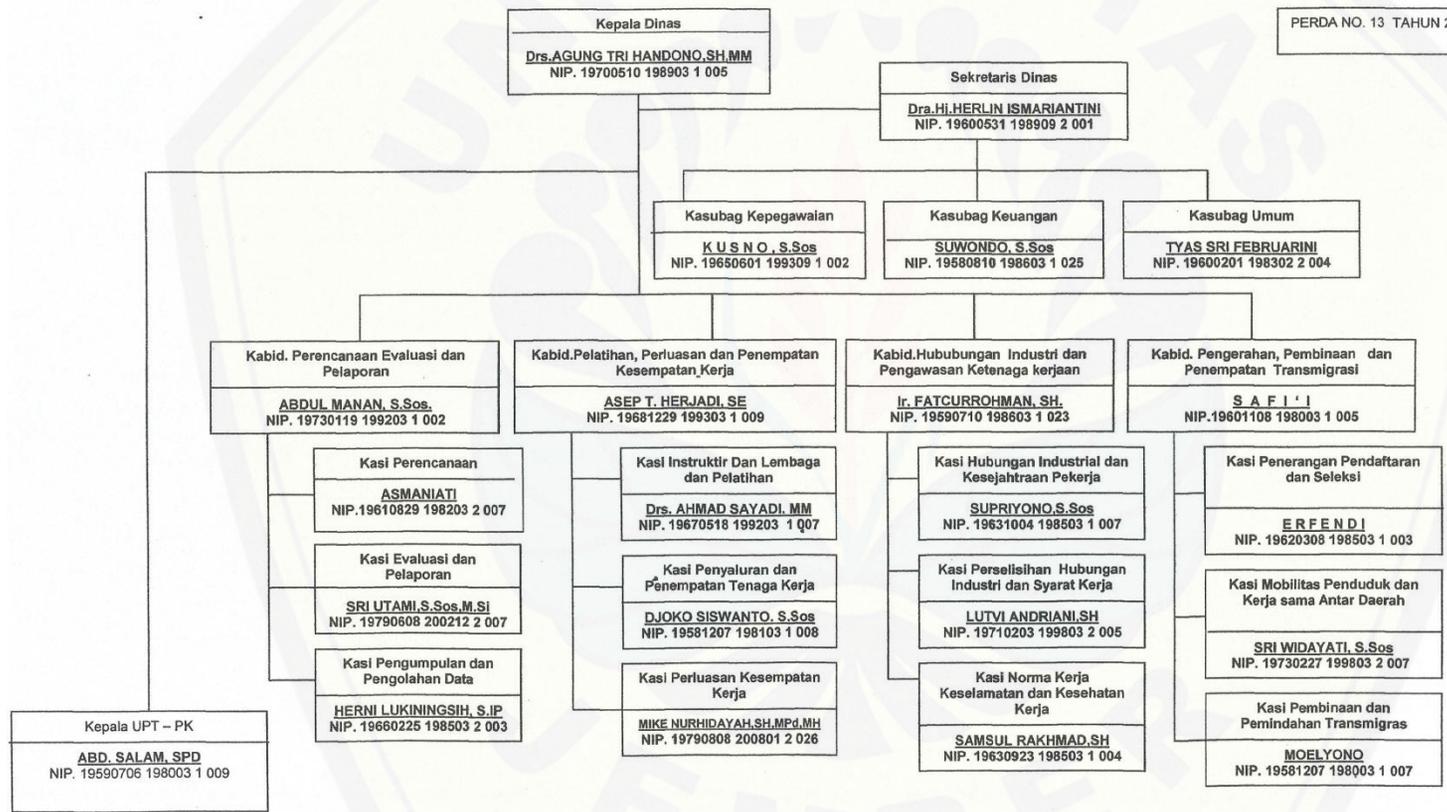
4.1.2.2 Misi

Misi UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso adalah mencetak dan meningkatkan kualitas dan produktifitas tenaga kerja di bidang usaha kecil dan menengah, melalui:

- a. Peningkatan dan pengembangan program pelatihan di bidang usaha kecil dan menengah
- b. Peningkatan dan pengembangan pemasaran program pelatihan, hasil produksi dan jasa di bidang usaha kecil dan menengah.
- c. Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pelatihan, uji kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
- d. Peningkatan dan pengembangan kompetensi instruktur melalui OJT, dan pengembangan karya ilmiah.
- e. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BONDOWOSO

PERDA NO. 13 TAHUN 2010



4.1.3 Tugas pokok dan fungsi UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso

4.1.3.1 Tugas Pokok

UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pelatihan keterampilan, pengetahuan dan kewirausahaan, kerja sama pelatihan penyiapan metode, kurikulum, jadwal dan alat peraga, penyebaran informasi pelatihan, pemasaran program dan jasa, pelaksanaan uji keterampilan dan sertifikasi tenaga kerja, pendayagunaan fasilitas pelatihan dan pelayanan, program masyarakat serta tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

4.1.3.2 Fungsi

- a. Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan serta kerja sama pelatihan.
- b. Pelayanan dan penyebarluasan informasi di bidang pelatihan.
- c. Penyiapan metode kurikulum jadwal dan alat peraga pelatihan.
- d. Pelaksanaan pemasaran program pelatihan hasil produksi dan jasa
- e. Pelaksanaan pelatihan dan uji keterampilan / kompetensi dan sertifikasi tenaga kerja.
- f. Pendayagunaan fasilitas pelatihan
- g. Pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat.
- h. Pelaksanaan tugas – tugas lain diberikan oleh kepala dinas.

4.1.4 Jenis - Jenis Pelatihan UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso

1. Program pelatihan berbasis kompetensi

Adalah *system* pelatihan kerja dengan berbagai kejuruan yang dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang sesuai dengan kebutuhan industri / pasar kerja.

2. Program pelatihan berbasis masyarakat
Adalah pelatihan kerja yang dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pasar kerja dengan berbagai kejuruan yang diarahakan untuk penempatan baik bekerja pada orang lain maupun mandiri.
3. Program pelatihan keliling (MTU)
Adalah pelatihan kerja yang dilaksanakan berdasarkan di daerah pedesaan.
4. Program adalah pelatihan berdasarkan permintaan pihak ke III (Lembaga Pemerintah, pendidikan, swasta dan masyarakat umum / perorangan) dimana seluruh biaya pelatihan ditanggung oleh pihak ke III.
5. Program pelatihan keterampilan bagi masyarakat pengangguran
Adalah pelatihan yang diarahkan bagi masyarakat yang tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau Drop Out.
6. Program pelatihan pemagangan
Adalah program pelatihan untuk masyarakat yang sudah bekerja dengan tujuan untuk memperdalam keterampilan yang sudah dimiliki.

4.1.5 Sasaran dan program pelatihan UTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso

4.1.5.1 Sasaran

- a. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan mampu berusaha mandiri.
- b. Tersedianya program dan metode pelatihan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Tersedianya sumber daya manusia di bidang ketatausahaan tenaga teknis pelatihan dan instruktur yang kompeten dan profesional.

4.1.6 Program

Tabel 4.2 Program Pelatihan

No	Jenis pelayanan	Sub kejuruan	Jenis pelatihan		Waktu pelayanan
			Inst.	Non inst.	Jumlah jam latih
1	2	3	4	5	6
1.	Pelatihan Kejuruan Teknologi Mekanik	- Las Listrik - Las Karbit - Las Argon/Las Tig - Las Co ₂ /Las Mig - Pipe Fitter - Mesin Perkakas - CNC - Autocad	V v v v v v v v	- v - - - - - -	160, 480 160, 480 80, 160 80, 160 80, 160 480 80, 160 80, 160
2.	Pelatihan Kejuruan Listrik	- Instalasi Tenaga - Instalasi Listrik - Mesin Listrik - Teknik Pendingin - PLC - Listrik Industri - Televisi - Alat Listrik Rumah Tangga - Teknisi Komputer - Elektronika	V v v v v v v v v v	V v v v - - v v v v	320, 480 320, 480 320, 480 320, 480 80, 160 320, 480 320, 480 160 160 320, 480
3.	Pelatihan Kejuruan Bangunan	- Bangunan Kayu/Meubel - Gambar Teknik - Surveyor	V v v	V - -	320, 480 320, 480 80, 160
4.	Pelatihan Kejuruan Otomotif	- Mobil Diesel - Mobil Bensin - Sepeda Motor	V v v	- - V	320, 480 320, 480 320, 480
5.	Pelatihan Kejuruan Tata Niaga	- Sekertaris Kantor - Akuntansi Kantor - Adminstrasi Kantor - Perhotelan - Bahasa Inggris - Komputer - Tata Boga	V v v v v v v	- - - - - - V	320, 480 320, 480 320, 480 320, 480 160, 200 160, 240 80, 160
6.	Pelatihan Aneka Kejuruan	- Menjahit - Bordir - Bordir dan Menjahit - Salon - Salon Kecantikan - Rias Pengantin	V v v v v v	V - v - - -	160, 320 160, 320 320, 480 80 160 160

Keterangan:

Pelatihan institusional : Dilaksanakan di BLK

Pelatihan Non Institusional : Dilaksanakan di lokasi pelatihan

Sumber: Profil UPT-PK Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans kabupaten Bondowoso

4.1.6 Instruktur UPTPK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso

Kebutuhan instruktur yang memiliki potensi sebagai instruktur yang memiliki potensi sebagai instruktur pelatihan kerja adalah mutlak bagi suatu Balai Latihan Kerja untuk pemerintah kabupaten Bondowoso, melalui BKD telah mengusulkan calon – calon instruktur dari PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso untuk mengikuti Diklat Instruktur berbagai kejuruan keterampilan kerja ke PUSDIKLAT Kementrian Nakertrans. Sebelum BLK-IP memiliki sendiri instruktur yang berkompeten memberikan pelatihan keterampilan kerja, maka pelaksanaan pelatihan berbagai kejuruan di BLK-IP Bondowoso dilakukan dengan pola kerja sama dengan melibatkan Praktisi DIDU, Akademisi, Birokrasi / instansi terkait dan para instruktur yang ada di UPT-PK Propinsi yang ada di Jember dan Situbondo.

4.2 Pelaksanaan Program Pelatihan Kerja

Pelatihan kerja dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat Bondowoso sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan juga kemiskinan. Banyaknya angka pengangguran dan kemiskinan ini tidak lain karena jumlah tenaga kerja yang ada tidak sebanding dengan lapangan kerja yang ada, ada juga masyarakat yang kurang memiliki keterampilan dalam pekerjaannya. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan energi kasar seperti bahan mentah, air, tenaga otot dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya, tetapi mereka dituntut untuk memiliki sifat kompetitif dalam berinovasi. Apabila masyarakat mampu memiliki inovasi maka masyarakat akan berlomba – lomba menghasilkan produk yang berkualitas. Tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas saja, melainkan juga dapat memperoleh penghasilan dan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus memberikan pengalaman dan pelajaran baru bagi masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso mengajukan program pelatihan kerja yang diperuntukkan untuk masyarakat Bondowoso agar memperoleh tambahan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dan diharapkan nantinya masyarakat dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan juga memiliki kemungkinan untuk membuka lapangan usaha sendiri sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran.

Pelaksanaan pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan juga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur. Dana yang dipergunakan untuk melaksanakan pelatihan kerja ini menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang telah dijelaskan pada pasal 2 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur yang berisi.

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dialokasikan dalam undang – undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja Negara dan perubahannya.
- (2) Alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada daerah propinsi kabupaten / kota ditetapkan dalam Peraturan menteri keuangan.

Diperkuat dengan pasal 3 yang menjelaskan bahwa dana bagi hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan:

- a. Peningkatan kualitas bahan baku;
- b. Pembinaan industri;
- c. Pembinaan lingkungan sosial;
- d. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
- e. Pemberantasan barang kena cukai illegal.

Adapun dalam pasal 8 dijelaskan, pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, meliputi:

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. Penerapan manajemen limbah industri hasil tembakau yang mengacu kepada analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL);
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan atau
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakakan antara lain melalui bantuan permodalan dan saran produksi.

Pelaksanaan pelatihan kerja ini masuk kedalam 3 poin dari pembinaan lingkungan sosial yang dipergunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri yang dijabarkan dalam pasal 9, yaitu:

- a. Pembinaan masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya melalui prioritas program yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangan potensi daerah, melalui:
 - 1) Pemetaan, pembinaan kemampuan, keterampilan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
 - 2) Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau dalam rangka alih profesi tenaga kerja, meliputi:
 - Tenaga kerja ter-PHK

- Tenaga kerja yang terkena efisiensi pengurangan jam kerja dan/atau dirumahkan
 - Tenaga kerja kontrak, borongan dan/atau musiman; dan
 - Tenaga kerja yang tempat usahanya mengalami pailit dan/atau gulung tikar
- 3) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, melalui:
- Bantuan penguatan permodalan; dan
 - Bantuan sarana dan prasarana
- 4) Fasilitasi penempatan kerja disektor formal bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya diindustri hasil tembakau, lingkungan sekitar industry hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
- 5) Peningkatan kualitas, kompetensi dan manajerial SDM pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industry rokok
- 6) Pemberdayaan, peningkatan kemampuan, keterampilan kerja, pendampingan dan/atau pemberian bantuan sosial di daerah industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk penanganan penyandang masalah kesejahteraan masyarakat(PKMS).
- b. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dala pasal 8 huruf e, meliputi;
- 1) Penguatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan guna mendukung penguatan ekonomi produktif masyarakat dan atau alih profesi tenaga kerja di industry hasil tebakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau dan atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; dan

- 2) Pembentukan dan pembangunan balai penelitian, pendidikan dan pengembangan industri tembakau (on farm sampai off farm).
- c. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf f, meliputi:
- 1) Pemulihan penyelamatan dan pengalihan usaha bagi industri hasil tembakau dengan pengembangan diversifikasi dan alih profesi usaha di sektor perdagangan, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku tembakau melalui program penumbuhan wirausaha baru disektor industri.
 - 2) Bimbingan teknis peningkatan kemampuan keterampilan teknis produksi dan manajemen usaha bagi SDM pelaku usaha dan masyarakat di sektor perdagangan, jasa, dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau
 - 3) Bimbingan dan fasilitasi perolehan legalitas usaha pedagang, jasa, dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - 4) Bimbingan, pendampingan dalam pengembangan usaha di sektor industri pada masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.
 - 5) Bimbingan, pendampingan dan fasilitasi perolehan hak dan kekayaan intelektual atas produk hasil diversifikasi dan alih profesi usaha baru di sektor industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau.

- 6) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan permodalan dan sarana usaha produksi.
- 7) Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha ekonomi sejenis di sektor perdagangan, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industry hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industry hasil tembakau.
- 8) Fasilitasi peningkata dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri terhadap produk industri hasil tembakau, bahan baku untuk industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industry hasil tembakau dengan mengikutsertakan pada pameran promosi, pasar lelang, temu bisnis dan bisnis dagang.
- 9) Fasilitasi kemitraan antara usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi dengan usaha besar dalam pengembangan usaha hasil produk diversifikasi usaha dalam alih profesi usaha baru bagi masyarakat industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, dan
- 10) Penerapan Social Responsibility Tobbaco Programme (SRTP) dan Social Responsibility programme (SRP) meliputi penyusunan, sosialisasi, dan pelatihan SRTP dan SRP.

Adapun tujuan pelatihan kerja menurut Bapak ABD. Salam, Kepala UPT-PK Disnakertrans hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2014, pukul 11.00 WIB, yaitu:

“tujuan dari pelatihan kerja ini untuk memberdayakan masyarakat dari yang tidak memiliki keterampilan hingga memiliki keterampilan, dari yang tidak bisa berinovasi menjadi bisa berinovasi dan bisa memberikan motivasi pada orang lain.”

Oleh karena itu penting bagi setiap orang untuk memiliki suatu keterampilan dimana nantinya hasilnya selain dapat dimanfaatkan untuk diri sendiri juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya, membantu memperoleh pekerjaan, memberikan tambahan pengetahuan sehingga mampu membuat suatu produk dan juga mampu berinovasi serta memperoleh penghasilan. Untuk mewujudkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, pelaksanaannya dapat mencapai sasaran dan mampu memanfaatkan sumber daya maka perlu adanya perencanaan tenaga kerja, dimana perencanaan tenaga kerja ini dimaksudkan untuk jangka waktu minimal 5 tahun.

Pelaksanaan pelatihan kerja di Bondowoso telah sesuai dengan perencanaan tenaga kerja yang ada dalam Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional, yang dijabarkan dalam setiap poinnya sebagai berikut.

1. Bidang, jenis dan kualifikasi pelatihan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja serta peningkatan produktifitas pada tingkat kabupaten / kota, propinsi, nasional, dan pasar kerja global.

Untuk melaksanakan program pelatihannya sendiri, dimulai dari mencari potensi apa saja yang tersedia di Kabupaten Bondowoso. Pemerintah turun ke lapangan untuk melihat dan juga mengecek potensi apa saja yang tersedia, dilihat dari Sumber Daya Alam (SDA) dan juga Sumber Daya Manusia (SDM). Setelah mengetahui potensi apa yang ada di Bondowoso maka, pemerintah menyerahkan hasilnya kepada UPT-PK Disnakertrans yang berwenang dalam menciptakan pelatihan kerja, menentukan jenis pelatihan kerja yang akan dilaksanakan di setiap desa dan juga sebagai pelaksana program pelatihan. Setelah itu, UPT-PK Disnakertrans menentukan jenis pelatihan kerja apa saja yang diperlukan oleh masyarakat dilihat dari potensi yang dimiliki dan untuk melancarkan pelatihan kerja yang akan dilaksanakan maka perlu juga untuk menentukan kualifikasi apa saja yang harus dipenuhi oleh calon peserta pelatihan. Kualifikasi yang dimaksud seperti, memiliki kemampuan dasar atas

pelatihan yang ingin diikuti, minimal jenjang pendidikan SMA, dan yang paling penting adalah peserta tidak buta aksara.

2. Jumlah kebutuhan pelatihan pada setiap bidang, jenis dan kualifikasi pelatihan

Jumlah kebutuhan pelatihan kerja yang ada di Kabupaten Bondowoso tidaklah sedikit, karena setiap lokasi di Bondowoso membutuhkan pelatihan kerja baik yang jenis pelatihan kerjanya berbeda ataupun sama sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah yang ada di Kabupaten Bondowoso. Untuk memperoleh data jumlah peserta yang membutuhkan pelatihan kerja bisa diperoleh dari pengajuan program pelatihan kerja dengan menggunakan proposal yang dilakukan oleh masing – masing Kepala Desa. Sebelum Kepala Desa mengajukan proposal agar warganya dapat memperoleh bantuan pelatihan kerja, UPT-PK Disnakertrans memberikan informasi kepada setiap desa mengenai program pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan. Kemudian masing – masing Kepala Desa memilih pelatihan kerja apa yang tepat untuk wilayahnya. Setelah menemukan yang tepat, maka Kepala Desa mengajukan program pelatihan yang tepat dengan mengajukan proposal.

Ketika proposal tersebut telah diterima, selanjutnya petugas dari UPT-PK Disnakertrans melakukan pengecekan apakah pelatihan kerja yang diajukan memang cocok untuk dilaksanakan di desa tersebut atau tidak dilihat dari potensi SDM dan SDAny. Apabila desa tersebut sudah layak mendapatkan pelatihan kerja yang sudah diajukan, petugas UPT-PK Disnakertrans melakukan penyuluhan tentang pelatihan kerja yang diajukan oleh Kepala Desa selain menjelaskan mengenai program pelatihan kerjanya dan pelaksanaan pelatihan kerja, serta merekrut peserta yang ingin mengikuti pelatihan pada saat itu juga. Namun tetap harus memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Selain itu ada pelatihan tertentu yang bisa langsung mendaftar di UPT-PK Disnakertrans Kabupaten

Bondowoso. Salah satunya adalah pelatihan komputer, yang mana baik pendaftaran, seleksi dan pelaksanaannya dilakukan di UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso. Berikut jenis pelatihan kerja yang tersedia di UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso.

Tabel 4.3 Program pelatihan yang tersedia

No	Jenis pelayanan		Sub kejuruan
1.	Pelatihan Teknologi Mekanik	Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Las Listrik - Las Karbit - Las Argon/Las Tig - Las Co₂/Las Mig - Pipe Fitter - Mesin Perkakas - CNC - Autocad
2.	Pelatihan Listrik	Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Intalasi Tenaga - Instalasi Listrik - Mesin Listrik - Teknik Pendingin - PLC - Listrik Industri - Televisi - Alat Listrik Rumah Tangga - Teknisi Komputer - Elektronika
3.	Pelatihan Bangunan	Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Kayu/Meubel - Gambar Teknik - Surveyor
4.	Pelatihan Otomotif	Kejuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Mobil Diesel - Mobil Bensin - Sepeda Motor
5.	Pelatihan Niaga	Kejuruan Tata Niaga	<ul style="list-style-type: none"> - Sekertaris Kantor - Akuntansi Kantor - Adminsitrasia Kantor - Perhotelan - Bahasa Inggris - Komputer - Tata Boga
6.	Pelatihan Kejuruan	Aneka	<ul style="list-style-type: none"> - Menjahit - Bordir - Bordir dan Menjahit - Salon - Salon Kecantikan - Rias Pengantin

Sumber: Profil UPT-PK Disnakertrans kabupaten Bondowoso

Dalam pelaksanaan pelatihan ini boleh diikuti oleh siapa saja baik yang sudah bekerja tetapi masih mencari pekerjaan ataupun yang masih

belum memiliki pekerjaan namun, calon peserta ini harus memenuhi syarat – syarat untuk menjadi peserta pelatihan yang telah ditentukan oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso. Ketentuan peserta pelatihan setiap pelatihan berbeda – beda tergantung pada jenis pelatihan yang dilaksanakan. Adapun kualifikasi peserta pelatihan secara umum yang tidak hanya dipergunakan pada satu pelatihan saja melainkan semua pelatihan, yaitu:

- a. Pendidikan minimal SMA
 - b. Umur minimal 18 tahun sampai dengan 40 tahun
 - c. Sehat jasmani dan rohani
 - d. Lulus seleksi oleh pelaksana
3. Rencana dan program untuk memenuhi kebutuhan pelatihan sebagaimana dimaksud butir 1 dan 2

Untuk memenuhi jumlah kebutuhan masyarakat akan pelatihan kerja, maka diperlukan adanya rencana agar dalam pelaksanaannya nantinya dapat merata. Perencanaan yang dimaksud dimulai dari perencanaan jenis pelatihan, materi yang akan diajarkan, alat – alat yang dibutuhkan selama pelatihan, ketersediaan instruktur yang mengajarkan tentang pelatihan, menentukan kualifikasi peserta yang berhak untuk mengikuti pelatihan, menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan dana yang ada untuk menentukan pelatihan apa saja yang akan dilaksanakan, serta menentukan lokasi dimana pelatihan itu akan diselenggarakan. Setelah melalui tahap – tahap tersebut diatas maka pelatihan kerja dapat dilaksanakan.

UPT-PK Disnakertrans menawarkan berbagai jenis program pelatihan kerja yang disebar di berbagai Desa di daerah Bondowoso. Setelah masing – masing kepala desa memperoleh program pelatihan kerja yang ditawarkan, maka setiap kepala desa memilih program pelatihan kerja apa yang dibutuhkan oleh warganya melalui MUSRENBANGDES. Hasil musrenbangdes ini akan dikirimkan kembali ke UPT-PK Disnakertrans

selaku pelaksana program pelatihan kerja, dan nantinya akan dipilih daerah mana saja yang akan dilatih. Pelaksanaan pelatihan ini diusahakan merata disetiap daerah di Kabupaten Bondowoso. Jadi untuk mewujudkan hal tersebut maka, pelaksanaan pelatihan kerja dilaksanakan secara bergantian di setiap tahunnya disesuaikan dengan anggaran yang ada dan pelatihan apa yang akan dilaksanakan.

4. Rencana biaya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana program tersebut butir 3

Merencanakan biaya perlu untuk dilakukan demi kelangsungan dan kelancaran pelaksanaan program pelatihan. Biaya yang digunakan untuk melaksanakan program pelatihan berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Pelaksanaan pelatihan sendiri ditentukan sesuai dengan jumlah dana yang ada. Dana yang diterima nantinya akan dibagi menjadi beberapa jenis pelatihan sesuai dengan pelatihan yang sudah diajukan dan telah disetujui, serta menentukan jumlah peserta yang mengikuti program pelatihan.

Untuk menentukan jumlah peserta pelatihan dilihat dari berapa pelatihan yang akan dilaksanakan, biaya apa saja yang diperlukan baik dari honor pelaksana program, honor tenaga ahli/instruktur/ narasumber, belanja alat tulis kantor, belanja bahan dan alat , belanja cetak dan pengadaan, belanja sewa, belanja makanan dan minuman dan lain – lain, sehingga kita dapat mengetahui berapa jumlah kuota peserta yang harus dipenuhi. Apabila kuota yang tersedia tidak terpenuhi maka akan menarik warga dari desa terdekat yang membutuhkan pelatihan yang sama atau memberikan kuota tersebut pada pelatihan lain yang jumlah kuotanya kurang sedangkan jumlah calon peserta melebihi kuota.

Di Kabupaten Bodowoso, pelatihan kerja ini memiliki 2 program yang dijelaskan oleh Bapak ABD Salam, Kepala UPT-PK Disnakertrans pada tanggal 30 Juni 2014, pukul 11.00 WIB sebagai berikut:

“Disini ada 2 program pelatihan kerja. Instusional sama MDU. Institusional itu Orangnya datang kesini, dilatih disini dan sudah disediakan alatnya di sini. Kalau MDU, orangnya berkumpul di Balai Desa, kemudian alat, instruktur, bahan, dan kalau ada makanan ya dibawa kesana juga.”

Semua keputusan dimana pelatihan itu dilaksanakan ditentukan sesuai dengan keadaan yang ada. Apabila peserta tidak dapat menjangkau tempat pelatihan maka pelatihan tersebut dapat diselenggarakan di Balai Desa sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat, namun apabila peserta bersedia dilatih di tempat pelatihan maka pelatihan akan dilaksanakan di UPT-PK Disnakertrans. Untuk tahun 2010 sendiri, pelaksanaan program pelatihan semuanya dilakukan di Balai Desa atau Kecamatan dimana para peserta itu tinggal. Biasanya, setiap program pelatihan selalu dilaksanakan di tempat yang menyelenggarakan program pelatihan. Karena terkendala tempat yang kecil maka pelaksanaan pelatihan dilakukan di Balai Desa atau Kecamatan. Berikut penuturan Bapak ABD Salam, Kepala UPT-PK Disnakertrans pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 11.00 WIB,

“Biasanya pelatihan kerja dilakukan disini. Tapi kan dulu tahun 2010 BLK masih gabung sama DISNAKER, disana kan tempatnya sempit jadi pelaksanaan pelatihannya di Balai Desa atau Kecamatan.”

Setiap tahunnya, pelatihan kerja yang dilaksanakan ada yang sama ada yang berbeda disetiap tahunnya. Menurut Bapak ABD. Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans yang telah diwawancarai pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 11.00 WIB, ada dua cara untuk menentukan program pelatihan yang akan dilaksanakan, yaitu:

1. Kita kalau mau ke desa, kita raih untuk mencari data tentang misal jumlah penduduk pengangguran, potensi yang ada didesa apa saja, di analisis kemudian ditentukan pelatihan apa yang layak untuk desa itu.

2. Desa bisa mengajukan melalui Musrenbangdes, hasilnya dikirim ke kecamatan. Kecamatan mengambil beberapa sampel untuk dikirimkan ke kabupaten. Kabupaten menyaring lagi bisa jadi pelatihan apa. Itu pun tidak bisa terakomodasi semua kadang – kadang, karena mengingat disesuaikan dengan anggaran.

Setiap desa diberi jatah satu paket pelatihan setiap tahunnya dan setiap paketnya berisi 20 orang atau lebih tergantung pada anggaran yang ada. Penerapan sistem seperti ini, berguna untuk meratakan program pelatihan kerja yang dijalankan di desa agar sebagian masyarakat yang membutuhkan pelatihan dapat merasakan atau memperoleh pengalaman mengikuti pelatihan kerja. Terkadang, ada beberapa desa yang sama – sama mengajukan atau memerlukan adanya pelatihan yang sama di tahun yang sama dan terkadang juga ada pelatihan yang kekurangan jumlah peserta dikarenakan tidak memenuhi kuota yang tersedia. Ketika beberapa desa mengajukan pelatihan yang sama di tahun yang sama, maka menurut Bapak ABD Salam Kepala UPT-PK Disnakertrans pada tanggal 30 juni 2014 pukul 11.00 WIB menyampaikan seperti ini,

“Misalnya, hasil dari musrenbang desa ini butuh ini, di desa ini butuh ini, diambil contoh Kecamatan Bondowoso yang mewakili kabupaten Bondowoso, biasanya untuk mengambil peserta kita analisis terlebih dahulu di Bondowoso ada beberapa kecamatan yang membutuhkan pelatihan yang sama di tahun yang sama. Ditemukan ada 7 kecamatan yang membutuhkan pelatihan yang sama maka, jumlah kuota yang tersedia dibagi dengan jumlah kecamatan yang membutuhkan pelatihan. Misal kuotanya 20 maka 20 di bagi 7, jadi disetiap kecamatan diberi 2 atau 3 orang peserta. cara mengambil pesertanya, dikembalikan lagi ke petugas kecamatan, biasanya diberi PMD. Saya punya ini pak, cuman ini harus merata jadi mereka yang tentukan sesuai kuota yang ada. siapa yang diambil menurut pak camat siapa yang baik untuk pelatihan.”

Apabila ada suatu kondisi dimana pelatihan yang kekurangan jumlah peserta dikarenakan peserta yang memerlukan pelatihan di suatu desa tidak memenuhi kuota yang tersedia, maka peneliti melakukan wawancara dengan Bapak ABD Salam selaku

Kepala UPT-PK Disnakertrans pada tanggal 30 juni 2014 pukul 11.00 WIB, dan beliau mengambil langkah,

“Biasanya saya mengambil keputusan memberikan kesempatan pada desa lain yang membutuhkan pelatihan untuk memenuhi kuota peserta atau memindahkan jumlah kuota peserta yang kosong itu ke pelatihan yang lain.”

Dalam pelatihan ini, telah disediakan alat – alat yang akan menunjang selama pelaksanaan pelatihan, tenaga pengajar dan konsumsi (bila ada) yang di danai oleh Cukai. Tidak hanya itu, peserta juga memperoleh uang saku sebesar Rp 30.000 per-orang dipotong pajak. Untuk tenaga pengajarnya sendiri, pihak UPT-PK Disnakertrans bekerja sama dengan guru – guru SMK dan orang – orang yang memiliki keahlian di bidangnya. Berikut penuturan dari Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 11.00 WIB,

“untuk staf pengajar dari pelatihan kerja disini, kami bekerja sama dengan guru – guru SMK dan juga orang – orang yang ahli sesuai dengan bidang keahlian masing – masing. Terkadang kita juga bekerja sama dengan para instruktur yang ada di UPT-PK Propinsi yang ada di Jember dan Situbondo.”

Syarat bagi peserta yang secara individu mendaftar program pelatihan yang tersedia perlu untuk ditetapkan untuk mempermudah proses pengajaran pelatihan kepada peserta. Pengumuman pelatihan disampaikan kepada Kepala Desa beserta syarat dan kualifikasinya, namun diutamakan yang sudah memiliki pengetahuan dasar. Di contohkan dalam penuturan singkat Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 11.00 WIB seperti,

“Misal orang mebel bisa pasrah tapi tidak bisa buat mebel. Berarti mereka sudah mempunyai pengalaman dasar. Kalau tidak ditentukan bisa susah nantinya, buta huruf misalnya otomatis mereka tidak bisa

mengikuti pembelajaran. Karena pada waktu pelatihan yang diajarkan bukan prakteknya saja, tapi sebelum itu diajarkan teorinya dulu.”

Oleh karena itu penting bagi masyarakat yang ingin mengikuti program pelatihan bisa membaca dan menulis karena para peserta tidak hanya diajarkan secara prakteknya saja melainkan juga secara teori. Setelah calon peserta memenuhi syarat untuk seleksi administrasi, maka selanjutnya calon peserta pelatihan tersebut perlu untuk diseleksi kembali yaitu dengan mengikuti seleksi tertulis. Adapun isi dari tes tertulis yang telah dicontohkan oleh Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans hasil wawancara pada tanggal 30 juni 2014 pukul 11.00 WIB seperti berikut,

“Misal orang ikut pelatihan, kemudian diseleksi tertulis. Yang berisi nama, alamat, tujuan sampean ikut pelatihan apa, setelah pelatihan sampean mau kemana. Nanti dari sana bisa dianalisa. Wong iki niat opo setengah – setengah, apa cari – cari uang saku dan lain sebagainya”.

Untuk menentukan peserta pelatihan tidak hanya dari seleksi administratif saja melainkan juga tes tertulis. Dimana tes tersebut akan menentukan apakah orang tersebut layak untuk diberi pelatihan. Layak disini dapat dimaksudkan apakah calon peserta ini benar – benar berniat untuk mengikuti pelatihan atau tidak, atau hanya ingin mendapat pesangon saja. Karena dalam pelatihan ini setiap orang dan setiap hari selama 10 hari mereka memperoleh pesangon sebesar Rp 30.000,00 dipotong pajak.

Setelah calon peserta terpilih maka mereka berhak mengikuti serangkaian materi pelatihan kerja yang berhak mereka ikuti. Materi yang diajarkan disetiap pelatihan berbeda – beda karena jenis pelatihannya juga berbeda. materi tersebut terbagi menjadi 3 kelompok yaitu, kelompok umum, kelompok inti dan kelompok penunjang. Adapun materi secara umum yang dipakai oleh semua pelatihan adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok umum yang terdiri dari, visi da misi, manajemen usaha, pembukuan sederhana, pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan permodalan.
- b. Kelompok inti yang terdiri dari pengenalan bahan dan alat, serta praktek.
- c. Kelompok penunjang yang terdiri dari evaluasi dan laporan.

Waktu pelatihan dilakukan selama 10 hari dengan 105 jam pelajaran dan setiap materi yang diajarkan masing – masing selama 45 menit. Dalam pelaksanaannya, materi praktek yang memakan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan materi tentang teori. Hal ini karena dalam materi praktek peserta dituntut untuk menghasilkan sesuatu dari yang sudah diajarkan, misalnya pelatihan meubelair dalam prakteknya harus menghasilkan kursi pojok, pelatihan pande besi dalam prakteknya harus menghasilkan pisau beserta sabuknya, pelatihan pakan ternak dan bokhasi harus menghasilkan pakan ternak serta bokasi dan lain – lain.

Tahap terakhir dalam pelaksanaan pelatihan kerja adalah tahap evaluasi dan laporan, yang diperoleh dari hasil jadi pelatihan kerja, misalnya peserta pande besi telah menghasilkan pisau beserta sabuknya, maka kita bisa mengevaluasi hasil kerjanya atau kita dapat mengevaluasi melalui tes tertulis untuk mengetahui kemampuan peserta. Pada tahun 2010, UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program pelatihan kerja yang terdiri 5 jenis pelatihan yaitu:

Tabel 4.3 Jenis pelatihan dan jumlah peserta pelatihan tahun 2010

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA
1.	Pembuatan pakan ternak dan bokhasi	50 Orang
2.	Pande besi	10 Orang
3.	Anyaman bamboo dan kerajinan tangan	20 Orang
4.	Meubelair	9 orang
5.	Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)	20 orang
JUMLAH		109 Orang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan tabel diatas jumlah peserta pelatihan tidak merata. Jumlah peserta ini disesuaikan dengan permintaan dari masing – masing desa yang membutuhkan pelatihan tersebut. Pelatihan pembuatan pakan ternak dan bokhasi memiliki jumlah peserta paling banyak diantara pelatihan lainnya. Hal ini dikarenakan pelatihan kerja ini dilakukan di 5 desa yang setiap desanya terdiri dari 10 orang peserta dan dilakukan dilakukan disetiap desa, namun waktu pelaksanaannya tidak dilakukan secara bersamaan melainkan bergantian. Jumlah ini juga berlaku pada pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan yang terdiri dari 2 desa yang di setiap desanya diikuti sebanyak 10 orang. Namun jumlah ini tidak berlaku pada pelatihan kewirausahaan – teknologi tepat guna (TTG) karena pelaksanaan pelatihannya dilakukan di 1 kecamatan yang diikuti 3 desa dan 1 desa yang berasal dari kecamatan lain yang wilayahnya terdekat dengan tempat pelaksanaan pelatihan kewirausahaan – teknologi tepat guna (TTG) sehingga apabila dijumlahkan pesertanya terdiri 20 orang.

Pada pelaksanaan pelatihan kerja pada tahun 2010, setiap desa menerima informasi mengenai pelatihan kerja yang akan dilaksanakan, kemudian kepala desa memilih pelatihan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Setelah menemukan pelatihan yang tepat maka dikembalikan lagi ke UPT-PK Disnakertrans. Selanjutnya pihak penyelenggara pelatihan mengadakan penyuluhan kepada setiap warga, dan mengajak warga untuk berpartisipasi mengikuti program pelatihan tersebut. Menurut Bu Har selaku peserta pelatihan kerja kewirausahaan dan teknologi tepat guna hasil wawancara 14 agustus 2014 pukul 12.00 WIB sebagai berikut,

“saya waktu ada pelatihan itu diberi tahu sama pak Kades. Trus saya diajak untuk jadi salah satu pesertanya. Jadi saya ya ikut saja, lumayan buat tambah – tambah ilmu.”

Berbeda dari Bu Har yang ditunjuk langsung oleh Kepala Desa, Bapak Hanapi selaku peserta pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan mengajukan sendiri untuk mengikuti pelatihan tersebut dan diungkapkan dalam hasil wawancara tanggal 12 agustus 2014 pukul 14.00 WIB kepada peneliti yang menyatakan sebagai berikut,

“Saya dulu diundang sama kepala desa untuk mengikuti rapat di Balai Desa. Ternyata ada penyuluhan tentang pelatihan kerja dan mengajak saya dan warga lain untuk berpartisipasi. Jadi kami yang berminat ya ikut berpartisipasi.”

Selain itu Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tosan pada tanggal 15 juli 2014 pukul 09.00, beliau mengatakan,

“Saya dari dulu sudah bikin mebel. Waktu ada pelatihan saya ikut buat nambah – nambah pengalaman. Saya dulu hanya bisa mebel dari alat yang sederhana. Sekarang saya sudah bisa pakai alat yang lebih bagus, seperti pasrah dan bor listrik.”

Dari tiga hasil wawancara diatas, dalam menentukan jumlah warga yang mengikuti pelatihan ada yang Kepala Desa mengajukan warganya yang memang

memerlukan pelatihan dan ada juga yang mengajukan diri sebagai peserta pada saat penyuluhan mengenai pelatihan berlangsung. Pelatihan kerja ini dilaksanakan mulai tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan 9 Agustus 2010 yang dilakukan secara berurutan. Selama pelaksanaan pelatihan, peserta pelatihan tidak perlu untuk membawa alat – alat dari rumah, hanya langsung datang saja ke tempat pelatihan. Karena semua alat dan bahan yang diperlukan selama pelatihan telah disediakan oleh pihak penyelenggara pelatihan. Peralatan yang ada selama pelatihan menurut para peserta sudah lengkap, berikut penuturan Bapak Hanapi selaku peserta pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan hasil wawancara tanggal 12 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB,

“Alat yang disediakan ditempat pelatihan sudah lengkap dan setiap orang memegang alat masing – masing satu. Jadi tidak saling meminjam alat antar teman.”

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Badrih selaku peserta pelatihan pande besi hasil wawancara pada tanggal 13 Agustus 2014 pukul 15.00 WIB sebagai berikut,

“Saya senang mbak, alatnya lengkap. Jadi enak bisa buat macam – macam dan berkreasi juga terserah kita. Lagipula kita dibebaskan untuk berkreasi sesuai dengan keinginan kita.”

Namun hal ini berbeda dengan peserta pelatihan meubelair, karena menurut mereka alatnya kurang lengkap, berikut penuturan Bapak Nur selaku peserta pelatihan meubelair hasil wawancara tanggal 14 Juli 2014 pukul 14.00 WIB,

“Alat yang kita pakai masih kurang lengkap. Karena meubel yang dibuat harus segera di selesaikan karena keterbatasan waktu. Namun alat yang ada ternyata kurang menunjang sehingga pihak penyelenggara pelatihan harus menyewa alat untuk mempercepat pengerjaan dimana waktu itu 2

hari sebelum pelatihan itu berakhir dan pelatihan tersebut harus selesai 2 hari setelahnya karena pelatihannya berakhir hari itu.”

Selain ada keterbatasan alat, waktu pelaksanaan pelatihan pun terbatas. Hanya 10 hari, sedangkan materi yang perlu diajarkan sangat banyak. Menurut Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2014 pukul 11.00 WIB,

“Misalnya saya ambil contoh pelatihan bengkel dan sepeda motor. 10 hari dibagi dengan seluruh jumlah poin – poin materi ya tidak cukup. 1 kali materi tapi kalau cuma 3 jam itu kan kurang. Seandainya bikin gambar atau konstruksi untuk mebel apa 3 jam itu cukup. Kan kurang waktunya. Dengan waktu hanya segitu, tidak cukup kalau dibuat layak agar siapa pakai”

Salah satu jenis pelatihan yang merasakan dampak dari kurangnya waktu pelatihan pada tahun 2010 adalah pelatihan kerja meubelair. Peneliti melakukan wawancara Bapak Tosan sebagai salah satu peserta pelatihan kerja meubeler pada tanggal 15 juli 2014 pukul 09.00 WIB, menyatakan bahwa,

“Waktu pelatihannya kurang lama, terutama waktu prakteknya. Materi yang diajarkan banyak. Kalau waktu prakteknya lebih lama, lebih enak ngerjakannya. Ada waktu untuk belajar caranya dan ada juga waktu untuk prakteknya, waktu itu bahan bakunya juga hanya bisa dibuat 1 jenis kursi pojok. Jadi waktu pekerjaannya kita kerjakan ber-Sembilan dan sekali diajarkan langsung praktek.”

Namun, berbeda halnya dengan 4 pelatihan lainnya, berikut penuturan dari Bapak Badrih sebagai salah satu peserta pande besi hasil wawancara 12 agustus 2014 pukul 15.00 WIB.

“Dulu waktu pelatihannya cuma 10 hari. Alhamdulillah waktunya gak kurang, soalnya waktu buat pisau sama sabuknya selesai sebelum hari terakhir pelatihan.”

Hal yang senada disampaikan oleh Bapak Hosman selaku peserta pembuatan pakan ternak dan bokhasi tanggal 19 agustus 2014 yaitu pukul 14.00 WIB,

“Waktunya gak kurang mbak. Soalnya buat pakan ternak sama bokhasi asal ada alat sama bahannya, ya tinggal buat saja gak butuh waktu lama.”

Dari kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa dalam penelitian meubelair tidak seperti pelatihan lain yang memiliki peralatan yang lengkap dan jangka waktu pelatihan tepat sesuai dengan apa saja yang diajarkan dalam pelatihan tersebut. Sedangkan pelatihan meubelair memiliki alat yang kurang lengkap dan waktu pelatihannya kurang lama, sehingga penyelenggara pelatihan menyewa alat yang dapat menunjang selesainya pengerjaan meubel agar selesai tepat waktu. Waktu yang terlalu terbatas membuat pelatihan meubelair menjadi kurang optimal, selain itu ditambah dengan alat yang hanya ada satu paket digunakan 9 orang itupun alatnya masih belum bisa dikatakan lengkap bahkan layak. Karena keterbatasan waktu yang singkat, dari dinas menyewa alat untuk mempermudah/mempercepat pengerjaan meubel tersebut.

Setiap selesai mengikuti program pelatihan, peralatan yang dipakai selama pelatihan akan diberikan kepada peserta pelatihan. Adapun tujuan dari pemberian alat yang dipakai selama pelatihan tersebut adalah untuk menunjang peserta setelah mengikuti pelatihan kerja. Namun peralatan yang diberikan tidaklah lengkap seperti waktu mereka mengikuti pelatihan jadi hanya sebagian saja seperti alat – alat dasar yang biasa digunakan di masing – masing pelatihan. Berikut penuturan Bapak Hanapi selaku peserta pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan hasil wawancara tanggal 13 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB sebagai berikut.

“Kami dikasih alat tapi gak semuanya hanya sebagian. Alat yang diberikan itu alat dasar untuk membuat anyaman bamboo yaitu gergaji pisau, petil, pisau dan kapak. Lumayan untuk bikin usaha apalagi kita kerjanya berkelompok.”

Menurut Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans hasil wawancara pada tanggal 30 Juni 2014 puku 11.00 WIB,

“Alat jika dibilang lengkap tidak, karena peserta pelatihan dipancing untuk berwira usaha dengan alat yang ada.”

Alat yang sudah diberikan menjadi salah salah satu modal yang bisa digunakan untuk menunjang usaha mereka selain ilmu keterampilan yang sudah diberikan selama pelatihan.

4.3 Hasil Pelatihan Kerja

Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk tidak hanya memanfaatkan energi kasar seperti bahan mentah, air, tenaga otot dan sebagainya dalam melakukan pekerjaannya, tetapi mereka dituntut untuk memiliki sifat kompetitif dalam berinovasi. Apabila masyarakat mampu memiliki inovasi maka masyarakat akan berlomba – lomba menghasilkan produk yang berkualitas. Tidak hanya menghasilkan produk yang berkualitas saja, melainkan juga dapat memperoleh penghasilan dan membuka lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran sekaligus memberikan pengalaman dan pelajaran baru bagi masyarakat lainnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah Kabupaten Bondowoso mengajukan program pelatihan kerja yang diperuntukkan untuk masyarakat Bondowoso agar memperoleh tambahan pengetahuan, keterampilan serta pengalaman dan diharapkan nantinya masyarakat dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dimiliki dan juga memiliki kemungkinan untuk membuka lapangan usaha sendiri sehingga dapat menyerap tenaga kerja dan sekaligus dapat mengurangi angka pengangguran. Pelaksanaan pelatihan kerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional dan juga Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang

Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Di Jawa Timur.

Peneliti memilih pelaksanaan pelatihan kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2010. Apabila dilihat dari tahun pelaksanaannya, pelatihan ini sudah berlangsung 4 tahun, sehingga bisa dipastikan bahwa pelatihan tersebut telah menghasilkan akibat yang diterima oleh semua peserta pelatihan. Akibat yang dihasilkan atau dirasakan oleh peserta pelatihan berbeda-beda, Ada yang masih menekuni usaha sesuai keterampilan yang sudah diperoleh, ada yang menggunakan materi yang diajarkan untuk membuat produk baru, ada yang memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan ada juga yang sudah beralih profesi.

Adapun penjabaran akibat pelatihan yang dirasakan oleh peserta pelatihan, sebagai berikut:

a. Pelatihan Meubelair

Pelatihan meubelair ini diikuti oleh 9 peserta yang tinggal di Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso. Setelah mengikuti pelatihan, setiap peserta memperoleh alat yang selama ini digunakan selama pelatihan. Namun pada kenyataannya alat tersebut tidak diterima oleh peserta pelatihan meubelair. Bapak Tosan, selaku peserta pelatihan meubelair hasil wawancara tanggal 15 juli 2014 pukul 09.00 WIB menyatakan seperti ini,

“Dari penyelenggara pelatihan kami memang diberi peralatan dan diberikan kepada kepala desa sebagai perwakilan dari kami untuk serah terima alat. Namun setelah itu, kami tidak memperoleh alat tersebut karena dipegang pak kepala desa.”

Jadi peserta pelatihan meubelair tidak menerima alat yang diberikan oleh UPT-PK Disnakertrans, melainkan menggunakan alat yang memang sudah dimiliki oleh para peserta. tidak semua peserta memiliki mata pencaharian sebagai pengrajin meubel sebelum mereka mengikuti program pelatihan, karena para peserta ini berasal dari berbagai macam profesi. Sehingga, pengaruh yang ditimbulkan ada yang tidak terpengaruh dengan tidak diterimanya alat – alat tersebut karena mereka dasarnya

bekerja di bidang meubelair yang pasti sudah memiliki alat untuk membuat meubel dan ada juga yang terpengaruh yaitu peserta yang tidak menekuni usaha meubel namun ingin memulai usaha meubelair namun batal, serta ada juga peserta yang memang sudah menekuni usaha meubelair namun karena tidak memiliki alat jadi peserta tersebut tidak menekuni usaha meubelair lagi.

Peneliti contohkan 2 peserta yang tidak terpengaruh dengan tidak diberikannya alat kepada mereka, yaitu Bapak Tosan dan Bapak Ansori/ Nur. Berikut penjabaran akibat dari pelatihan yang dialami keduanya.

1. Bapak Tosan

Bapak Tosan ini bekerja sebagai pengrajin meubel. Beliau mengikuti program pelatihan kerja meubelair pada tahun 2010. Sebelum mengikuti pelatihan hasil meubelnya masih belum halus. Namun setelah Bapak Tosan, sekarang beliau sudah mampu membuat hasil meubelnya lebih baik dari sebelumnya. Berikut pernyataan bapak Tosan hasil wawancara 15 juli 2014 pukul 09.00 WIB.

“Dulu waktu sebelum ikut pelatihan hasil meubel saya masih kurang halus. Dan sekarang sudah lebih halus. Walaupun dulu alatnya saya tidak punya tetapi dapat pinjaman dari bos.”

Selain juga pekerja meubel beliau ini juga bekerja di toko bangunan.

Berikut penuturannya,

“Bos saya tahu kalau saya selain kerja sama bos juga kerja meubel. Teman bos dulu minta buat lemari sama saya. Terus saya bilang sama bos kalau saya gak punya alat buat ngalusin kayunya. Kalau Cuma pakai ampelas masih kurang halus, terus bos saya meminjamkan alat buat ngalusin kayu lemariya. Akhirnya bos minjami saya alat itu dengan sewa. Sewanya dipotong sedikit dari gaji saya. Ketika lemarnya sudah jadi ya sekalian saja buat lemari untuk tempat piring buat dirumah. Hasilnya lumayan bagus tinggal di ampelas sedikit dan diberi plitur.” (hasil wawancara 15 juli 2014, pukul 09.00 WIB)

Gambar di bawah ini adalah hasil dari lemari untuk piring hasil buatan Bapak Tosan namun masih perlu dihaluskan sedikit dengan amplas dan di beri plitur.



Gambar 4.2 lemari piring
Sumber: Bapak Tosan

Pesanan yang diterima biasanya diselesaikan sendiri. Kecuali jika permintaan mebelnya lebih besar dan bapak tosan tidak bisa melakukannya sendiri maka bapak tosan akan mengajak temanya untuk membantunya. Bapak Tosan menjelaskan,

“Kalau pesenan banyak biasanya ngajak teman. Saya juga buat kosen lemari dan pintu, soalnya saya kadang – kadang diminta tolong tetangga bikin rumah. Jadi temen yang lain ngerjain bangun rumahnya, saya yang bikin kusen, jendela sama pintu. Kalu pekerjaan saya selesai juga saya juga bias nuking. Waktu penyelesaian biasanya tergantung tingkat kesulitannya misalnya seperti desainnya yang rumit dan alat yang digunakan masih sederhana.” (hasil wawancara 15 juli 2014, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya Bapak Tosan menambahkan,

“Kemarin saya buat kusen dan pintu buat tetangga depan. Tinggal pasang kacanya saja sama dipernis. Saya buat itu 3 hari. Bahan kayunya sudah disediakan sama yang mesan. Jadi saya tinggal buat sendiri.” (hasil wawancara 15 juli 2014, pukul 09.00 WIB)

Berikut gambar hasil kusen dan pintu yang sudah jadi,



Gambar 4.3 kusen dan pintu
Sumber: Bapak Tosan

Dilihat dari gambar diatas, barang yang dihasilkan sudah bagus dalam waktu pengerjaan hanya 3 hari. Menurut Bapak Tosan selaku peserta hasil wawancara 15 juli 2014 pukul 09.00 WIB,

“ 3 hari kalau pake alat yang masih tradisional gak bisa cepet. Saya pake pasrah kayu yang pake listrik jadi bahannya cepet halus. Cara nyambung setiap komponennya pakai bor listrik. Jadinya cepet.”

Dengan alat tersebut, Bapak Tosan mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan hasil yang memuaskan. Bapak Tosan telah memiliki pasrah kayu tenaga listrik dan juga meminjam alat bor listrik sehingga dapat mempermudah beliau dalam mengerjakan pekerjaannya. Berikut penuturannya,

“Saya dulu gak punya pasrah kayu itu, tapi sekarang udah punya. Tiap bulannya nyicil sama bos 20.000 tiap bulan sekarang udah 6 kali nyicil. Kalau bor listriknya saya sewa ke bos. Kalau pasrah

kayunya sudah lunas, saya mau usaha beli bor listrik juga.” (hasil wawancara 15 juli 2014, pukul 09.00 WIB)

Ternyata Bapak Tosan ini memiliki kedua alat tersebut yang pertama dengan menyicil kepada bosnya dipotong uang gaji, dan menyewa bor listrik. Dilihat dari usaha yang dilakukan dalam penjelasan diatas, bapak tosan memiliki keyakinan dan usaha untuk mengembangkan kualitas dari barang mebel yang dia buat. Terbukti dengan waktu yang singkat bapak tosan mampu menghasilkan kusen, pintu dan jendela. Beliau ini juga tidak membuka usaha mebel sendiri, dikarenakan tidak adanya modal. Menurut Bapak Tosan,

“Walaupun saya anggap saja sudah punya perlengkapan yang lengkap, setiap ada pekerjaan mebel ataupun tukang bangunan saya ngitungnya harian. Penghasilan yang saya peroleh dari pengrajin mebel sekarang hitungnya masih harian tidak seperti dikota pakai meteran.” (hasil wawancara 15 juli 2014, pukul 09.00 WIB)

Selanjutnya Bapak Tosan menambahkan,
“Tapi untuk saat ini saya untuk memikiran membuat usaha mebel sendiri, saya tidak memiliki kemampuan untuk modal. Kalau ada pasti insyaallah saya sudah buka usaha sendiri. Untuk sementara ya gini – gini saja mbak, bikin mebel kalau ada yang mesen, kadang jadi kuli bangunan, dan juga bekerja di toko bangunan.” (hasil wawancara 15 juli 2014, pukul 09.00 WIB)

Jadi untuk sekarang ini bapak tosan masih menekuni usaha mebel, namun tidak membuka usaha meubel sendiri karena tidak adanya modal. Untuk pekerjaan mebelnya dan pembuatan kosen masih terus berjalan tergantung pada pesanan.

2. Bapak Ansori/Nur

Bapak Ansori sehari – hari biasanya membuat rumah tetapi bagian pembuatan kusen pintu dan jendela. Bila disebut pengusaha mebel, Bapak Ansori ini bukan pengusaha mebel sebelum beliau mengikuti pelatihan kerja meubelair, karena beliau hanya membuat kosen saja. Dalam pembuatannya sendiripun sesuai dengan permintaan konsumen. Berikut pernyataan dari Bapak Ansori tanggal 16 juli 2014 pukul 14.00 WIB,

“Saya cuma kerja sehari – hari buat rumah. Profesi saya bukan dengan usaha mebel tapi hanya dengan membuat kosen saja. Membuat kosen ini kalau ada pesanan saja. Kalau ada yang bangun rumah baru buat”

Kegiatan beliau masih sama dengan pekerjaannya sebelum mengikuti pelatihan meubeler sebagai pembuat kosen. Namun beliau tidak menutup kemungkinan apabila ada orang yang ingin memesan untuk dibuatkan kursi. Berikut pernyataan Bapak Ansori hasil wawancara tanggal 16 juli 2014 pukul 14.00 WIB,

“Saya terkadang juga menerima pesenan membuat kursi. Kalau ada yang mau nggarap kursi biasanya dikerjakan berebutan atau berkelompok. Namanya juga di desa.”

Beliau ini tidak hanya mengikuti pelatihan kerja di Bondowoso saja melainkan juga pernah mengikuti pelatihan di Bali selama satu minggu. Berikut pernyataan dari Bapak Ansori tanggal 16 juli 2014 pukul 14.00 WIB,

“ Saya pernah dikirim oleh desa untuk mengikuti pelatihan di Bali selama satu minggu. Pelatihannya itu tentang membuat barang kerajinan dengan bahan baku kayu. Seperti asbak, cobek, piring kayu dan lain – lain.”

Hasil yang dirasakan oleh beliau setelah mengikutii program pelatihan adalah beliau untuk saat ini tidak hanya mengerjakan kosen dan mebel saja, melainkan juga sekarang mulai membuat peralatan rumah tangga dengan bahan dasar kayu. Dalam pengerjaannya dilakukan di Desa Pejaten. Hasilnya biasanya tidak hanya dijual didaerah Bondowoso saja, melainkan juga dijual diluar kota, seperti Bali. Berikut gambar hasil kerajinan tangan membuat peralatan rumah tangga berbahan dasar kayu,



Gambar 4.4 hasil kerajinan tangan berbahan dasar kayu
Sumber: Bapak Ansori

Barang yang dihasilkan dan dijual ke Bali jumlahnya tidak sedikit, terakhir produksi 1 jenis barang dalam bentuk layah, barang yang dikirim sebanyak 5.000 buah dan hanya dikembalikan 1 buah saja. Bapak Ansori, menjelaskan pada 16 juli 2014 pukul 14.00 WIB sebagai berikut,

“Saya mengirim 5.000 buah layah, yang dikembalikan hanya 1 buah. Ngirim lagi asbak 3.000 buah yang dikembalikan hanya 1 buah saja. Dengan alasan untuk layahnya msih kurang dalam dan asbaknya ukurannya. Jadi dua barang yang dikembalikan ini dijadikan patokan untuk pemesanan selanjutnya”

Barang – barang kerajinan seperti ini tidak dibuat di rumah tempat Bapak Ansori tinggal melainkan di Pejaten. Berikut penuturan Bapak Ansori hasil wawancara tanggal 16 juli 2014 pukul 14.00 WIB,

“Kalau ada pesenan nggarapnya di Pejaten. Kalau nggarap disini gak ada yang tau cara buatnya. Hanya saya saja yang bisa. Alat – alatnya sudah ada juga disana, kalau disini tidak ada. kalau ada pesenan saya disuruh bikin layah misalnya saya tidak mengirim contoh kesana. Melainkan langsung di buat semuanya sesuai dengan permintaan.”

Walupun Bapak Ansori tidak menekuni mebel namun dengan pelajaran dasar mebel, beliau mampu membuat alat – alat rumah tangga dengan bahan baku kayu. Jadi tidak semua orang yang mempelajari mebel hanya bisa membuat mebel saja, melainkan juga bisa menghasilkan hasil jadi yang berbeda dengan bahan baku yang sama yaitu dengan kayu.

Akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan pelatihan kerja diatas tidak hanya memberikan dampak yang sama terhadap peserta pelatihan kerja yang lain. Diantaranya ada yang masih menekuni usaha mebel seperti diatas dan ada juga yang sudah tidak menekuni usaha mebel dan beralih profesi kebidang yang lain, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserta itu sendiri. Menurut Bapak Warsis selaku Kepala Desa mengatakan,

“Warga yang dulu ikut pelatihan, sekarang tidak semuanya menekuni meubel. Hanya 5 orang saja yang masih aktif, seperti pak ansori, pak mail, pak tosan, pak yunus dan pak ansori / pak nur. Sedangkan, peserta yang lainnya sudah tidak menekuni mebel lagi.”(hasil wawancara tanggal 13 Juli 2014 pukul 10.00 WIB)

Selanjutnya, Menurut Bapak Warsis selaku kepala desa mandiro, menjelaskan bahwa,

“ Keempat orang dari yang ada di data mbak ini, seperti pak Imam Sunardi itu sekarang sudah jadi perangkat desa, kalau Agustir petani,

Muhlisin itu menjalankan mesin bajak, dan Hosin/ pak Us dagang dan ternak sapi.” (hasil wawancara tanggal 13 Juli 2014 pukul 10.00 WIB)

Dari pernyataan tersebut hanya 5 orang saja yang masih menekuni mebel, sedangkan sisanya sudah beralih profesi. Berikut penuturan Bapak Warsis selaku Kepala Desa hasil wawacara tanggal 13 Juli 2014 pukul 10.00 WIB,

“Keempat peserta memilih untuk tidak menekuni mebel karena mereka tidak memiliki modal, bahan baku dan alat yang digunakan untuk membuatnya. Sehingga mereka lebih memilih melakukan pekerjaannya yang sekarang.”

Kesimpulan dari pernyataan diatas adalah mereka lebih nyaman dengan pekerjaan yang digeluti sekarang. Walaupun mereka telah memiliki kemampuan, namun apabila tidsendiriak memiliki alat ataupun modal tetap saja, jangankan membuat usaha mebel, untuk membuat 1 mebelpun tidak akan bisa. Saya mengambil 1 contoh dari peserta yang sudah tidak lagi berprofesi sebagai tukang mebel, yaitu bapak mail. Menurut penuturan sebelumnya dari bapak warsis selaku kepala desa bahwa pak mail, masih menekuni usaha mebel, ternyata baru akhir – akhir ini bapak mail sudah tidak lagi menenkuni usaha mebel lagi. Berikut penuturan Bapak Mail selaku peserta pelatihan meubelair hasil wawancara tanggal 13 Juli 2014 pukul 11.00 WIB,

“Setelah saya mengikuti pelatihan saya masih menekuni usaha mebel. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Saya tidak punya alat, modal dan bahan baku. Sekarang saya cuma jadi ketua RT sama ternak sapi saja.”

Bapak mail masih menekuni usaha mebel walupun tidak berlangsung lama karena tidak punya alat ataupun modal. Menurut Bapak Mail,

“Dulu waktu saya masih jadi tukang mebel, saya buatnya sesuai dengan pesenan. Saya tidak buat jadi lalu dijual. Saya hanya buat kalau ada pesanan saja. Alatnya minjem ketetangga, kadang – kadang juga kalau diajak teman kerja mebel sama – sama alatnya sudah disediakan sama teman. Tapi Karen sekarang sudah gak ada yang ngajak, gak ada

pesenan juga, ya sudah saya jadi ketua rt saja sama melihara sapi.”(hasil wawancara tanggal 13 Juli 2014 pukul 11.00 WIB). Kalau ada alatnya saya pingin buat lagi. Coba kalau ada bantuan kesini alat saja sudah cukup.” (hasil wawancara tanggal 13 Juli 2014 pukul 11.00 WIB)

Bapak mail masih memiliki keinginan untuk membuat mebel lagi. Dan penyebab tidak meneruskan usaha mebel adalah modal dan alat. Pada kenyataannya walaupun sudah memiliki kemampuan dalam membuat mebel, namun tidak memiliki kemampuan akan modal dan alat memang tetap saja tidak bisa membuat mebel. Berikut kesimpulan dari hasil pelatihan kerja meubelair pada tahun 2010.

4.4 Hasil pelatihan kerja meubelair tahun 2010

	Dulu	Sekarang	Keterangan
Kuantitas	5 orang	4 orang	Jumlah peserta yang masih menekuni usaha mebel berkurang dari jumlah sebelumnya. Hal ini dikarenakan tidak adanya modal dan juga alat.
Kualitas	Mereka hanya menghasilkan 1 jenis barang saja sesuai dengan keahlian mereka ada yang membuat kusen, dan ada juga yang membuat meja kursi walaupun hasilnya masih kurang halus.	Ada yang mampu berkreasi menjadi beberapa jenis barang berbahan dasar kayu dan ada yang tetap menekuni usaha meubel saja namun dapat mendesign ukiran meubelnya dan hasil karya mereka lebih halus daripada sebelumnya	
Modal	Modal tergantung pada pesanan	Modal masih tergantung pesanan	Masalah modal mereka yang masih menekuni meubel mendapatkan modal sesuai dengan pesanan, baik berupa bahan baku kayu atau dalam bentuk uang. Mereka tidak memiliki biaya atau bahan untuk membuat terlebih dahulu karena tidak memiliki modal.
Alat	Alat yang digunakan masih menggunakan peralatan tradisional	Sudah mulai menggunakan alat yang lebih modern	Untuk alat ada yang mereka usaha dengan menyicil dan ada juga yang sudah tersedia di tempat kerjanya.
Bahan	Bahan baku tergantung pada pesanan	Bahan baku masih tergantung pada pesanan	Apabila mereka sudah ada pesanan baru mereka memiliki bahan baku, apabila tidak ada pesanan maka tidak ada bahan baku.

Sumber: Wawancara dengan peserta pelatihan meubelair 2010

b. Pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan

Pelatihan ini diikuti oleh 2 desa masih dalam satu kecamatan yang sama yaitu kecamatan wonosari yang dilakukan selama 2 periode yaitu tanggal 26 Mei – 7 Juni 2010 dan tanggal 21 Juni – 1 juli 2010. Didaerah ini banyak memiliki pohon bamboo yang menjadi bahan utama dari pembuatan kerajinan ini. Oleh karena itu diharapkan nantinya peserta pelatihan di daerah tersebut dapat memanfaatkan bamboo yang melimpah. Pelatihan ini telah memberi manfaat kepada para peserta dari segi materi, praktek maupun alat. Berikut penuturan Bapak Hanapi yang menjadi ketua kelompok dari 19 orang yang mengikuti pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan hasil wawancara tanggal 13 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB,

“Kami sangat terbantu dengan adanya pelatihan ini. Karena selain memperoleh keterampilan baru juga hasil keterampilan yang dibuat dapat dijual, sehingga dapat menambah penghasilan. Contohnya saja saya, saya membuka toko dan ditambah sekarang kegiatan membuat kerajinan dari bamboo. Lumayan selain mendapat penghasilan dari toko, saya juga mendapat penghasilan dari kerajinan bamboo ini.”

Tidak hanya Bapak Hanapi yang merasakan hal seperti itu, anggota kelompok yang dipimpin oleh beliau juga merasakan hal yang sama. Berikut penuturan Bapak Hanapi tanggal 13 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB.

“Teman – teman juga sama dengan saya menjadikan kerajinan bamboo ini sebagai tambahan penghasilan dan menjadikan pekerjaan sampingan bukan pekerjaan pokok. Karena pekerjaan pokok kita bukan itu”

Walaupun didaerah itu memiliki pohon bamboo yang melimpah namun bukan berarti mata pencaharian sehari – hari masyarakatnya adalah membuat kerajinan bamboo. Sebenarnya potensi bamboo yang melimpah berada di Desa Pelalangan. Jadi apabila mereka memperoleh pesanan maka membuatnya di rumah Bapak Ahyari yang tinggal di Desa Pelalangan, seperti yang dikatakan oleh Bapak Hanapi,

“kalo’ ada pesenan biasanya kita ngerjakan dirumah Bapak Ahyari. Tapi tidak semuanya ikut bikin kerajinan tergantung bisa atau tidaknya teman – teman. Biasanya yang kerja hanya 5-10 orang tergantung pesenan.”(tanggal 13 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB)

Jadi tidak semua peserta pelatihan membuat kerajinan tangan tersebut sesuai dengan pesenan. Adapun produk yang dihasilkan oleh peserta yang dikatakan oleh Bapak Hanapi tanggal 13 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB adalah,

“Barang – barang yang kami hasilkan biasanya rantang, lampu, lampion dan juga aneka souvenir.”

Bapak Hanapi dan teman – teman sebenarnya ingin membuat banyak kerajinan dan kemudian dipasarkan namun mereka tidak bisa melakukan itu. Adapun alasan yang diungkapkan oleh Bapak Hanapi tanggal 13 Agustus 2014 pukul 14.00 WIB sebagai berikut,

“Saya dan kawan – kawan pengen bikin banyak kerajinan, tapi kendalanya kami tidak tahu harus dipasarkan kemana. Kami biasanya cuma nerima pesenan saja. Untuk membuat usaha sendiri selain tidak ada modal kami sudah memiliki pekerjaan lain.”

Apabila memang berniat untuk menjual sesuatu kita harus mengetahui dimana tempat yang cocok untuk menjual hasil karyannya. Apabila tidak tahu dimana hasil itu dipasarkan, maka akan lebih baik untuk menerima pesenan saja. Berikut kesimpulan dari hasil pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan.

Tabel 4.5 Hasil pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan tahun 2010

	Dulu	Sekarang	Keterangan
Kuantitas	Tidak ada	20 Orang	Setelah mengikuti program pelatihan ke 20 orang ini menekuni usaha anyaman bamboo dan kerajinan tangan sebagai pekerjaan tambahan
Kualitas	Tidak ada	Mereka mampu menghasilkan kerajinan dari bamboo berupaperalatan rumah tangga dan souvenir untuk pernikahan maupun sunatan.	Sebelum mereka mengikuti pelatihan kerja, mereka hanya mengerjakan pekerjaan yang biasa mereka tekuni. Namun sekarang mereka tidak hanya menekuni pekerjaan utama, mereka juga menekuni usaha kerajinan tangan walaupun berdasarkan pesanan saja
Modal	Modal dalam bentuk bahan baku berupa bamboo	Modal dalam bentuk bahan baku berupa bamboo	Modal yang mereka peroleh melimpah namun dulu mereka tidak memanfaatkannya namun sekarang sudah mulai dimanfaatkan karena sudah menjadi penghasilan tambahan walaupun dihasilkan berdasarkan pesanan saja
Alat	Tidak memiliki alat	Sudah memiliki alat	Karena mereka tidak menekuni maka mereka tidak memiliki alat, dan sekarang mereka sudah memiliki alat yang mereka dapatkan setelah mengikuti program pelatihan
Bahan	Bahan baku telah tersedia	Bahan baku telah tersedia	Baik dulu maupun sekarang bahan baku sudah tersedia namun perbedaannya dulu tidak memanfaatkannya dan sekarang telah dimanfaatkan

Sumber: Wawancara dengan peserta pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan 2010

c. Pelatihan Pande Besi

Pelatihan ini diikuti oleh 10 orang yang terdiri dari 2 desa yang berada di kecamatan yang sama yaitu Sumber Kemuning dan Sumber Anom yang letaknya berdekatan. Di Desa Sumber Anom banyak pengrajin pande besi, selain dari Desa Sumber Anom pengrajin pande besi juga ada yang berasal dari Desa Sumber Kemuning. Hal ini karena tempat kerja mereka ada di Desa Sumber Anom bukan di Sumber Kemuning. Adapun Barang – barang yang dihasilkan oleh peserta pelatihan

ini yang diungkapkan oleh Bapak Badrih selaku ketua kelompok pelatihan pande besi hasil wawancara pada tanggal 14 Agustus 2014 pukul 15.00, adalah membuat pisau, celurit, bedung dan samurai.

Dari data yang mengikuti pelatihan pande besi hanya 9 orang saja yang masih menekuni profesi tersebut, karena satu orang lagi beralih profesi sebagai madin (orang yang mengurus urusan pernikahan di Desa). Sehingga orang tersebut tidak lagi menekuni profesinya sebagai pande besi. Berikut pernyataan bapak Badrih mengenai profesi peserta pelatihan pande besi,

“Diantara 10 orang yang ada di data mbak, saya mengajak adik saya hosen kerja ditempat saya. Kakak saya Ikno dan enam peserta lainnya punya tempat sendiri – sendiri. Sedangkan pak Cholily sudah tidak menekuni pande besi karena sudah menjadi madin disini.” (tanggal 14 Agustus 2014 pukul 15.00)

Karena mereka sudah memiliki usaha sendiri – sendiri kecuali adik Bapak Badrih maka pengerjaan pande besi tidak dilakukan secara berkelompok. Hasil kerajinan yang dibuat oleh Bapak Badrih sekarang hanya membuat pisau tanpa ada pegangannya, jadi hanya besinya saja sedangkan pegangannya dibuat oleh pihak lain. Berikut penuturan Bapak Badrih,

“Saya kan buatnya berdasarkan pesenan kan ya mbak. Dan pesenannya biasanya cuma pisau tanpa ganggangnya. Sebenarnya saya bisa buat pisau dengan ganggangnya. Tetapi karena pesenannya hanya itu saja jadi saya buatnya ya hanya itu. Tapi kalau disesuaikan dengan modal saya saya lebih milih buat pisau tanpa ganggang. Karena modal saya cukup untuk membuat 100 pisau tanpa ganggang, sedangkan yang pake ganggang hanya jadi 35. Dan penghasilannya lebih banyak yang membuat pisau tanpa ganggang.” (tanggal 14 Agustus 2014 pukul 15.00)

Apabila didaerah bondowoso bapak Badrih membuat Bedung atau pisau dengan sabuk dari kayu. Karena di daerah Bondowoso yang laku adalah produk yang itu. Berikut penuturan bapak Badrih,

“Di Bondowoso biasanya yang paling laku itu pisau sama bedung. Walaupun pesannya cuma sedikit karena memang harganya lebih mahal. Mahalnya dari segi bahan baku buat pisau sama buat gagang dan sabuk. Untuk bahan pisau saya gak pke besi – besi soalnya kalau pake besi itu cepat tumpul. Kalau saya make pir, karena hasilnya gak cepet tumpul. Untuk bahan sabuknya saya pake dari kayu, karena lebih awet dari kulit hewan yang katanya awet. Padahal bohong. Kalau disimpan terlalu lama sabuknya bisa rusak, kalau dari kayu kan enggak.” (tanggal 14 Agustus 2014 pukul 15.00)

Dalam proses pemasarannya tidak hanya di lakukan di Bondowoso saja melainkan di Bali. Menurut bapak Badrih,

“Kalau dijual disini penghasilannya sedikit jadi lebih enak dijual di bali harganya lebih tinggi. Tapi saya baru bikinnya sekitar bulan desember sampe mei. Soalnya kalau dijual diantara bulan juni sampe November jarang ada yang beli. Jadi biar gak rugi dijualnya pas bulan desember sampe mei. Lagian juga saya juga melihat harga bahan baku, yang terkadang mahal dan harga Pir lebih mahal daripada besi bekas.” (tanggal 14 Agustus 2014 pukul 15.00)

Diantara semua peserta pelatihan hanya Bapak Badrih saja yang menjual di Bali, sedangkan yang lainnya hanya di Bondowoso saja, seperti yang diungkapkan bapak Badrih tanggal 14 Agustus 2014 pukul 15.00 berikut ini.

“Karena kebanyakan orang disini yang jualnya di bondowoso, jadi saya mencari alternatif lain dimana menjual barang saya dan saya disarankan ke bali. Daripada disini penghasilannya lebih sedikit ketimbang yang dikirimkan ke Bali lebih baik kan ngirim ke Bali mbak.”

Jadi akibat yang diterima oleh peserta yang berbeda adalah tempat dimana mereka menjual barang dagangannya karena sebagian besar masih lebih suka menjual barang tersebut di daerah bondowoso saja yang merupakan tempat tinggal mereka. Selain itu bahan baku yang dibutuhkan oleh pengrajin pande besi juga tergantung pada persediaan dan juga harga bahan baku yang kebanyakan menggunakan bahan

baku pir, karena dengan bahan tersebut dan kualitasnya lebih bagus. Berikut penjabaran dari hasil pelatihan kerja pande besi.

Tabel 4.6 Hasil pelatihan kerja pande besi tahun 2010

	Dulu	Sekarang	Keterangan
Kuantitas	10 Orang	9 Orang	Jumlah pengrajin menurun karena 1 orang peserta bekerja sebagai mudin.
Kualitas	Mereka hanya membuat pisau, parang dan kapak	Mereka tidak hanya semakin mahir membuat pisau parang dan kapak, mereka juga mampu mengukir pegangan pisau atau kapak, membuat sabuknya menggunakan kayu dengan ukiran.	Dulu mereka membuat produknya hanya dengan design yang standart namun sekarang mereka mampu membuat produknya dengan pegangan dan sabuk yang diukir.
Modal	Modal diperoleh dari hasil penjualan sebelumnya	Modal tidak hanya berasal dari hasil penjualan sebelumnya namun juga berasal dari pesanan	
Alat	Alat sudah lengkap	Alat semakin lengkap	Alat yang dimiliki oleh mereka sudah lengkap, karena mereka memang berprofesi sebagai pengrajin pande besi setelah mereka mengikuti mereka memperoleh peralatan tambahan
Bahan	Bahan baku tersedia tergantung pada modal yang mereka miliki dan juga tersedia bahan baku yang dibutuhkan	Bahan baku tersedia tergantung pada modal yang mereka miliki dan juga tersedia bahan baku yang dibutuhkan	Walaupun modal untuk memperoleh bahan baku sudah ada, namun apabila bahan baku tidak tersedia ataupun harganya mahal mereka tetap saja tidak bisa menghasilkan produknya.

Sumber: wawancara dengan peserta pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan 2010

d. Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak dan Bokashi

Pembuatan pakan ternak diikuti oleh 50 peserta dimana terdiri dari 5 desa dan kecamatan yang berbeda. selain itu pelaksanaannya juga terbagi menjadi 5 periode. Warga yang memperoleh pelatihan ini adalah yang sudah memiliki atau memelihara hewan ternak dan juga sebagai petani. Pelatihan ini sangat cocok untuk 2 pekerjaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Menurut Bapak Abdul Manab selaku

peserta pembuatan pakan ternak dan Bokhasi sekaligus wakil ketua dari kelompok usaha tani hasil wawancara tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00 WIB yaitu,

“Pelatihan ini sangat pas buat kelompok tani dan peternak sapi seperti kami. Kalau dari pakan ternaknya, kita bisa tahu cara memelihara hewan ternak dan juga bisa membuat pupuk tanaman sendiri apabila pupuk langka.”

Hal yang senada diungkapkan oleh Bapak Hosman selaku peserta pembuatan pakan ternak dan Bokhasi sekaligus ketua dari kelompok usaha tani hasil wawancara tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00 yaitu,

“Kami dapat banyak pengalaman dan ilmu juga. Selain itu pelatihan ini sangat membantu usaha saya, seperti membuat bokhasi yang bisa dijadikan pengganti pupuk dasar dan juga saya merasa terbantu juga dalam perawatan hewan ternak yang saya punya.”

Pelatihan pakan ternak sendiri memiliki tujuan untuk membantu para peternak khususnya hewan sapi dalam memberikan asupan yang tepat untuk ternak mereka. Menurut Bapak Hosman,

“Dulu kita ngasih makan sapi hanya pake rumput saja sama air. Pemberian makanannya hanya 1 hari sekali dipagi hari saja. Tapi sejak mengikuti pelatihan saya sudah bisa merawat sapi saya dengan baik. Dari asupan makanan apa saja yang dimakan, bagaimana cara merawat sapi kalau sakit dan berapa kali pemberian makanannya. Sejak saya mengikuti pelatihan itu dan menerapkan ke sapi yang saya punya hasilnya sapi gemuk – gemuk, jadi pas dijual mahal. Kemarin saja sapi saya di tawar 20 juta, bisa beli 1 sepeda montor. Bayangkan mbak kalau saya jual 2, bisa dibuat pergi haji.”(Tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00)

Bapak Abdul Manab juga merasakan hal yang sama, berikut penuturan beliau,

“Sapi saya cuma 2 gak sebanyak pak Hosman. Tapi memang pelatihannya sangat membantu. Walaupun memang sedikit merepotkan alias tidak praktis waktu bikin pakannya, soalnya kan makanannya gak hanya rumput saja. Masih ada campuran bekatulnya sama air. Tapi hasilnya memang bagus, ternaknya gemuk – gemuk dan sehat juga.” (Tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00)

Dengan adanya pelatihan pembuatan pakan ternak ini dapat membantu semua peternak bagaimana cara merawat ternaknya dengan baik dimulai dari makanan dan minuman apa yang harus dikonsumsi oleh hewan ternaknya, berapa kali ternak diberi makan, bagaimana menjaga kebersihan tempat tinggal hewan ternak dan lain - lain. Namun para peserta tidak hanya memperoleh pelatihan pakan ternak saja melainkan juga pemanfaatan kotoran ternak sapi untuk dijadikan bokhasi. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu para peserta untuk membuat pupuk sendiri sebagai pengganti apabila mengalami kelangkaan pupuk. Menurut Bapak Abdul Manab,

“Kalau pupuk langka saya biasanya membuat pupuk sendiri dari kotoran sapi. Biasanya buatnya bersama- bersama, kemudian hasil pupuknya dibagi.” (Tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00)

Bokhasi ini cukup membantu untuk pertumbuhan tanaman di area persawahan. Selain itu cara pembuatannya cukup mudah, berikut penuturan Bapak Hosman,

“Cara bikinnya gampang mbak, tinggal nyari tempat yang luas, terus bawa persiapan apa saja yang dipakai untuk buat bokhasi dari alat, kotoran sapi dan campuran – campuran lainnya.” (Tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00)

Pupuk ini sangat mudah untuk membuatnya dan dapat dibuat dimana saja asalkan memiliki tempat yang luas. Pupuk ini tidak hanya memberikan dampak positif, namun ada juga dampak negatifnya yaitu, pupuk ini ternyata tidak bisa dipergunakan untuk semua jenis tanaman hanya untuk jenis tanaman tertentu ataupun pupuk ini hanya bisa dipergunakan sebagai pupuk dasar diawal pertama menanam bukan untuk tanaman yang sudah tumbuh besar, dan hasil akhir yang ditimbulkan ada yang bagus dan ada yang jelek. Berikut penuturan Bapak Abdul Manab,

“Pupuk bokhasi ini jenisnya kayak pupuk dasar mbak, yang biasa dipakai waktu awal nanem tanaman. Tapi kalau tanamannya sudah besar pupuknya gak bisa dipakai. Soalnya bentuknya nggak kristal. Jadi gak bisa dipakai. Kalau saya punya alat buat pupuknya jadi kristal ya nanti walaupun tumbuhannya sudah besar masih bisa dipakai. Selain itu, pupuk bokhasi tidak bisa dipakai segala macam tanaman. Salah satunya tembakau. Kalau nanam tembakau pakai pupuk bokhasi nanti hasilnya coklat mbak. Itu nggak bagus, bisa – bisa dijual gak laku. Pupuk itu bisa dipakai buat tanaman cabe sama padi.” (Tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00)

Walaupun hanya bisa dijadikan pupuk dasar, tapi cukup membantu dalam proses penanaman awal. Namun biasanya mereka mengalami kesulitan pupuk disaat tanaman sudah tumbuh besar yaitu pupuk N. pupuk ini sulit untuk didapatkan karena jumlahnya terbatas. Berikut penuturan Bapak Hosman,

“Saya pengen ikut pelatihan lagi bikin pupuk yang fungsinya bisa sama seperti pupuk N. soalnya pupuk itu sulit dapetnya mbak. Soalnya jumlahnya terbatas.” (Tanggal 19 agustus 2014 pukul 14.00)

Pupuk bokhasi ini memang sangat berguna untuk mengurangi penggunaan pupuk yang berbahan kimia pada tanaman, karena berasal dari kotoran ternak. Selain itu untuk mencari bahan untuk membuat pupuk tersebut mudah, karena terbuat dari kotoran ternak maka mereka bisa memanfaatkan kotoran hewan ternak yang dimiliki untuk dijadikan pupuk dan sekaligus membuat kandang hewan ternak mereka bisa bersih.

Berikut penjabaran dari hasil pelatihan kerja pande besi.

Tabel 4.7 Hasil pelatihan kerja Pakan Ternak dan Bokashi tahun 2010

	Dulu	Sekarang	Keterangan
Kuantitas	Tidak Adan	50 Orang	Semua peserta masih menggunakan metode yang diajarkan selama pelatihan untuk kepentingan pribadi
Kualitas	Tidak ada	Untuk pembuatan pakan ternak telah berhasil karena telah menghasilkan ternak yang gemuk dan sehat. Untuk pupuk bokhasinya kualitasnya masih kurang baik.	Pakan ternak cukup baik sehingga menghasilkan hewan ternak yang berkualitas, namun untuk pupuknya masih kurang bagus selain hanya pupuk dasar saja, pupuk ini juga kurang cocok untuk semua tanaman.
Modal	Tidak ada	Untuk pakan ternak ada namun dengan biaya sendiri, untuk pupuknya tidak memerlukan modal	Pakan ternak perlu untuk biaya bekatul dan juga vitamin, sedangkan pupuk bokhasi tidak membutuhkan modal karena cukup dengan memanfaatkan kotoran ternak
Alat	Alat sudah lengkap baik untuk pembuatan pakan ternak maupun pupuk.	Alat sudah lengkap baik untuk pembuatan pakan ternak maupun pupuk.	Alat untuk membuat pakan ternak dan pupuk sudah dimiliki oleh peserta dan mereka juga memperoleh tambahan peralatan setelah mengikuti pelatihan
Bahan	Bahan baku untuk pakan ternak dan pupuk bokhasi telah tersedia. Namun untuk pakan ternaknya sendiri hanya tersedia air dan rumput saja sedangkan untuk pupuknya hanya memerlukan kotoran ternak	Bahan baku untuk pakan ternak dan pupuk bokhasi telah tersedia.	Semua bahan yang diperlukan baik untuk pakan ternak maupun pupuk bokhasi telah tersedia.

Sumber: Wawancara dengan peserta pelatihan kerja pakan ternak dan bokashi tahun 2010

e. Pelatihan Kewirausahaan-Teknologi Tepat Guna(TTG)

Pelatihan Kewirausahaan-Teknologi Tepat Guna(TTG) dilaksanakan di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso. Pelatihan kerja ini mengajarkan kepada pesertanya untuk membuat keripik yang terbuat dari ketela dengan aneka rasa. Hasil dari pelatihan yang diikuti oleh peserta yang mayoritas ibu – ibu ini sangat bermanfaat dan bernilai jual. Selain menambah pengetahuan kepada para ibu juga bisa menambah penghasilan untuk keluarga.

Menurut Ibu Sop selaku salah satu peserta pelatihan Kewirausahaan-Teknologi Tepat Guna (TTG) hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2014 pukul 12.00,

“Setelah saya ikut pelatihan bikin keripik, sekarang saya jualan keripik yang dikirim ke warung – warung atau ke pasar. Saya biasanya jual sampai 300 bungkus seminggu. Hasilnya lumayan bisa bantu – bantu penghasilan suami.”

Hal yang senada diungkapkan oleh Ibu Har selaku peserta pelatihan Kewirausahaan-Teknologi Tepat Guna(TTG) hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2014 pukul 12.00,

“Saya sama seperti Sop, saya juga jualan keripik. Tapi jualan saya gak sebanyak sop. Saya Cuma usaha kecil – kecilan mbak buat nambah – nambah sanga anak. Dijualnya biasanya di sekolah – sekolah atau tempat ngajinya anak.”

Setiap peserta pelatihan Kewirausahaan-Teknologi Tepat Guna (TTG) juga memperoleh peralatan alat pemotong keripik, pisau dan juga alat perekat plastik elektrik. Namun tidak semuanya alat tersebut dipakai oleh peserta, berikut alasan Ibu Sop mengenai kekurangan alat tersebut selaku peserta pelatihan kerja kewirausahaan dan teknologi tepat guna hasil wawancara tanggal 14 Agustus 2014 pukul 12.00,

“Alat pemotong yang dibuat motong singkong itu bikin cepet selesai, tapi hasilnya gak bagus. Biasanya kalau buat kripik singkong potongannya tipis, tapi pake alat ini potongannya besar jadi banyak menyerap minyak. Saya juga tidak pakai perekat plastic yang pake listrik. Soalnya kelamaan, lebih enak pakai lilin”

Penuturan yang sama juga disampaikan oleh Ibu Har yang mengungkapkan seperti ini,

“Kalau alat pemotongnya saya gak make mbak, lebih enak pakai pisau. Kalau alat buat bungkus plastik yang pake listrik itu sama saya dipakai. Jualan saya kan sedikit mbak jadinya gampang. Lagian juga nyenenin anak – anak, soalnya anak – anak saya suka bantuin saya bungkus keripik pakai alat itu.”(tanggal 14 Agustus 2014 pukul 12.00)

Namun untuk sekarang menghentikan sejenak membuat keripik karena bahan baku ketelanya sedang mahal. Berikut penuturan Ibu Har,

“Sekarang saya gak buat keripik dulu mbak, soalnya harga telanya mahal mbak. Nanti kalau sudah murah saya baru bikin lagi. Kebanyakan disini gak ada yang nanam tela sendiri. Mesti beli ke pasar.”(tanggal 14 Agustus 2014 pukul 12.00)

Dari penuturan diatas alasan ibu – ibu ini menghentikan untuk sementara penjualan keripiknya adalah kurangnya modal, tidak memiliki kebun untuk menanam ketela sendiri dan juga harga ketela yang mahal. Namun tidak semuanya mengalami hal yang sama seperti ibu Har dan Ibu Sop, salah satunya ibu Hatik yang masih memproduksi keripik bahkan juga memproduksi kerupuk. Berikut penuturan yang disampaikan oleh ibu Sop selaku peserta pelatihan kerja kewirausahaan dan teknologi tepat guna (TTG) hasil wawancara tanggal 14 agustus 2014,

“Hatik ini dulu sama kayak saya buat keripik, tetapi sekarang juga bikin kerupuk seperti kerupuk ikan sama kerupuk beras. Tapi cara jualannya nggak seperti saya, dia hanya bikin saja dirumah sesuai pesanan nggak nyebarin keripik ke toko – toko atau sekolah. Sekarang dia cuma bisa terima pesanan, soalnya dia keteteran kalau buat pesanan keripik dan kerupuk tetapi masih juga bikin keripik dan kerupuk untuk dijual di toko – toko di pasar atau di sekolah. Jadi dia lebih memilih menerima pesanan karena hasil produksinya itu juga dijual ke toko – toko atau sekolah walaupun lewat pemesanan dari orang lain. Jadi tempat jualnya leih luas. Kalau pesanannya agak longgar baru bikin buat di jual di toko – toko atau di sekolah. Kadang kalau saya nganggur saya bantu – bantu disana. ”

Dari penuturan di atas Ibu Hatik ini tidak hanya memproduksi produk keripik saja tapi juga memproduksi kerupuk. Pemesanan dari konsumen yang banyak membuat beliau lebih memilih untuk menerima pesanan saja daripada juga harus membuat keripik dan kerupuk untuk dikirim ke sekolah ataupun toko – toko dipasar. Salah satu kendalanya adalah kurangnya tenaga kerja yang dimiliki.

Berikut penjabaran dari hasil pelatihan kerja pande besi.

Tabel 4.8 Hasil pelatihan kerja kewirausahaan dan teknologi tepat guna (TTG) tahun 2010

	Dulu	Sekarang	Keterangan
Kuantitas	8 Orang	15 Orang	Jumlah orang yang menekuni usaha ini bertambah. Walaupun pekerjaan ini hanya sebagai tambahan penghasilan
Kualitas	Peserta yang mulai dari awal menekuni usaha ini hany membuat satu jenis produk kerupuk atau keripik saja	Sekarang baik peserta yang menekuni atau tidak menekuni mampu menghasilkan berbagai macam jenis produk	Setelah mengikuti pelatihan mereka mampu membuat keripik baik dari singkong ataupun pisang dan juga kerupuk dengan aneka rasa
Modal	Menekuni modal brasal dari hasil penjualan produknya	Baik yang menekuni maupun baru menekuni memiliki modal yang berasal dari hasil penjualan sebelumnya	
Alat	Alat sudah lengkap	Alat yang dimiliki sudah lengkap dan para peserta juga memperoleh peralatan setelah pelatihan.	Alat yang telah diberikan kurang bisa berfungsi dengan baik jadi hampir sebagian besar tidak menggunakannya
Bahan	Bahan baku sudah tersedia baik baik dari kebun milik sendiri ataupun harus membeli bahan baku di pasar	Bahan baku sudah tersedia baik baik dari kebun milik sendiri ataupun harus membeli bahan baku di pasar	Namun kebanyakan dari peserta menekuni usaha tersebut tidak memiliki bahan sendiri sehingga membelinya di pasar. Apabila harga bahan baku tinggi maka mereka memilih untuk tidak memproduksi

Sumber: Wawancara dengan peserta pelatihan kewirausahaan dan teknologi tepat guna (TTG) tahun 2010

Dari penjabaran mengenai akibat dari 5 pelatihan yang dilakukan pada tahun 2010 terbukti menghasilkan akibat dan masalah yang berbeda bagi peserta pelatihan. Walaupun tidak semuanya peserta pelatihan menekuni apa yang mereka pelajari, tetapi masih ada peserta yang masih menekuni sesuai dengan pelatihan yang mereka ikuti bahkan ada sebagian dari mereka yang mampu menghasilkan produk baru yang

terinspirasi dari pelatihan yang mereka ikuti. Berikut hasil akhir peserta secara keseluruhan setelah mengikuti program pelatihan kerja.

Tabel 4.9 Peserta yang masih menekuni dan yang tidak lagi menekuni program pelatihan kerja yang diikuti.

No	Jenis pelatihan kerja	Yang masih menekuni	Keterangan	Yang tidak menekuni	Keterangan
1.	Pembuatan pakan ternak dan bokhasi	50 orang	Peserta masih menekuni, namun digunakan untuk konsumsi pribadi, yaitu untuk memupuk tanaman dan untuk memberi makanan ternaknya sendiri.	-	-
2.	Pande besi	9 orang	Masih menekuni usaha pande besi hanya saja berbeda target penjualannya.	1 orang	Sudah menjadi mudin
3.	Anyaman bamboo dan kerajinan tangan	20 orang	Masih menekuni sebagai tambahan penghasilan.	-	-
4.	Meubelair	5 orang	Masih menekuni namun ada produk yang menghasilkan produk meubel ada yang menghasilkan produk rumah tangga.	4 orang	Sudah tidak menekuni karena tidak adanya alat dan modal dan ada juga yang menjadi perangkat desa.
5.	Kewirausahaan Teknologi Tepat Guna (TTG)	15 orang	Masih menekuni usaha keripik, bahkan ada yang memproduksi keripik dengan bahan baku yang lain seperti pisang atau kerupuk beras	5 orang	Sudah tidak menekuni, karena pengajaran itu untuk tambahan pengalaman saja.

Sumber: hasil wawancara dengan peserta pelatihan dan perangkat desa

4.4 Analisis evaluasi hasil pelatihan kerja tahun 2010

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat dianalisis bahwa konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Ruang lingkup atau tingkatan evaluasi dalam penelitian ini adalah evaluasi kegiatan pelatihan kerja pada tahun 2010.
2. Tipe evaluasi yang digunakan yaitu ex-Post evaluation (evaluasi yang dilaksanakan setelah program selesai dilaksanakan). hal ini karena, peneliti ingin mengetahui hasil pelatihan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2010.
3. Penelitian ini termasuk dalam jenis Evaluasi keluaran (*outcome*) dan evaluasi eksternal. Evaluasi keluaran (*outcome*) yang merupakan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh evaluator dari luar, dalam hal ini peneliti berasal dari kalangan mahasiswa yang bukan merupakan evaluator dari program tersebut.
4. Kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh mutrofin terdiri dari 6 kriteria. Dari hasil wawancara peneliti menggunakan 5 kriteria evaluasi yaitu effectiveness (efektifitas), adquency (kecukupan), equity (kesamaan atau perataan), responsiveness (responsifitas), appropriateness (ketepatan atau kelayakan). Peneliti tidak menggunakan criteria efficiency (efisiensi), karena criteria tersebut digunakan untuk menghitung ratio cost benefit, manfaat bersih dan unit biaya yang mengalami kesulitan. Keberadaan ratio cost benefit , manfaat bersih, dan unit biaya merupakan pegangan yang dimiliki oleh pemberi kebijakan.
5. Indikator yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.
 1. Hasil atau keluaran program apakah sesuai dengan yang direncanakan
 2. Jumlah dan jenis orang yang dijalani apakah sesuai dengan yang direncanakan

3. Pengaruh atau akibat dari program terhadap orang yang mendapatkan layanan, apakah terjadi perubahan atau perbedaan dari sebelum dan sesudah mendapatkan layanan program
4. Evaluasi keluaran juga mengidentifikasi apa yang harus dilakukan agar pengaruh program dapat berlangsung secara terus - menerus.

Berdasarkan analisis dari peneliti maka ditemukan kendala yang dihadapi oleh peserta setelah mengikuti program pelatihan kerja pada tahun 2010, yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Masalah peralatan

Kendala pertama yang dialami oleh peserta setelah mengikuti pelatihan kerja adalah masalah peralatan. Masing – masing peserta pelatihan tidak hanya memperoleh materi pelatihan, uang saku saja melainkan juga memperoleh bantuan peralatan yang biasanya diberikan setelah mengikuti program pelatihan sebagai modal awal bagi peserta. Namun ada sedikit masalah dalam pemberian peralatan, yang pertama ada peserta yang tidak memperoleh peralatan dan kedua adalah masalah mengenai kualitas alat yang diberikan.

Setiap pelaksanaan pelatihan kerja yang diadakan, peralatan yang dipakai selama pelaksanaan pelatihan sebagian diberikan kepada peserta sebagai modal awal untuk membuka usaha baru sesuai dengan pelatihan yang telah mereka ikuti. Dalam pelaksanaan pelatihan meubelair, peralatan yang dipergunakan oleh peserta pelatihan memang diperuntukkan kepada 1 kelompok peserta pelatihan meubeler, yang dilakukan dengan tujuan agar 1 kelompok tersebut dapat berdaya dengan membuka usaha mebel bersama.

Berikut penuturan dari Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso hasil wawancara tanggal 1 juli 2014,

“peralatan yang digunakan selama pelatihan tidak dikembalikan kepada kami melainkan diberikan kepada peserta pelatihan. Karena selain mereka memperoleh uang saku, makanan dan juga minuman, para peserta juga memperoleh peralatan yang berjumlah 1 paket yang diperuntukkan untuk 9 orang yang sudah diserahkan melalui Kepala Desa. Agar nantinya dapat bekerja sama - sama membentuk kelompok kecil sebagai pengrajin mebel dan juga diharapkan dapat berinovasi dengan mengeluarkan produk baru yang khas berasal dari Desa Mandiro Kecamatan Tegal Ampel.”

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh Bapak mail salah satu peserta pelatihan meubeler, hasil wawancara tanggal 13 juli 2014 pukul 11.00 WIB sebagai berikut,

“waktu pelatihan memang diberi uang, makan sama peralatan. Diberi 1 paket buat 9 orang sama Dinas dan diserahkan ke Kepala Desa. Tapi alat yang diberikan oleh dinas kita tidak megang, setau saya alatnya ada di Balai Desa.”

Hal ini juga turut ditambahkan oleh bapak Ansori/Nur salah satu peserta pelatihan kerja meubeler yang juga merasa tidak menerima peralatan yang diberikan oleh UPT-PK Disnakertrans dalam hasil wawancara tanggal 16 Juli 2014 pukul 12.00 WIB sebagai berikut,

“kita memang dapat peralatan dari dinas tapi yang megang Kepala Desa. Dulu pernah ada bantuan peralatan, tapi karena disini desa terpencil bantuan tidak masuk. Adanya hanya pelatihan kerja tahun 2010 saja.”

Dari pernyataan tersebut peralatan yang diberikan pada waktu pelatihan kerja berlangsung memang telah diberikan kepada peserta pelatihan melalui Kepala Desa, namun pada akhirnya mereka tidak menikmati untuk jangka panjang peralatan tersebut. Pernah ada bantuan peralatan namun bantuan tersebut tidak masuk ke dalam wilayah itu karena daerah tersebut termasuk desa terpencil. Sehingga bantuan yang warga Desa Mandiro peroleh tersebut hanya pelatihan kerja saja pada tahun 2010.

Masalah mengenai peralatan yang kedua adalah kurang berfungsinya peralatan yang telah diberikan yang dialami oleh peserta Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG). Contohnya adalah alat untuk mengiris ketela. Alat tersebut tidak bekerja sesuai fungsinya, contohnya hasil potongnya yang terlalu tebal. Dalam pembuatan keripik, dibutuhkan irisan tipis sehingga keripik yang dihasilkan akan memiliki rasa renyah, tidak menyerap banyak minyak, dan tidak keras. Sedangkan hasil potongan dari alat yang diberikan tebal – tebal, sehingga pada waktu digoreng menyerap banyak minyak, dan peserta pun memilih untuk memakai pisau saja daripada menggunakan alat tersebut.

2. Masalah modal

Kendala yang kedua adalah masalah modal. Modal yang dimaksud bisa dalam bentuk bahan baku dan juga uang. Karena untuk memulai suatu usaha pasti membutuhkan modal baik bahan baku maupun uang, jika tidak memiliki modal maka sulit bagi mereka untuk membuka usaha. Kedua modal ini juga saling terkait, apabila kita memiliki modal uang, tapi bahan baku yang diperlukan tidak ada maka tidak dapat membuka usaha, walaupun bahan baku ada tapi harganya mahal tetap saja tidak bisa membeli.

3. Memasarkan barang yang sudah dihasilkan

Kendala terakhir adalah cara memasarkan barang yang dihasilkan. Dilihat dari beberapa peserta, mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan barang terutama peserta pelatihan anyaman bamboo dan kerajinan tangan. Mereka memiliki kemampuan untuk membuat kerajinan tangan yang terbuat dari bamboo namun mereka tidak tahu bagaimana atau kepada siapa barang itu dipasarkan. Oleh karena itu tidak hanya pelatihan kerja saja yang diajarkan melainkan juga perlu juga dipelajari bagaimana proses pemasaran barang yang telah dihasilkan.

4.4.1 Analisis hasil wawancara dari akibat pelaksanaan pelatihan kerja pada tahun 2010

Evaluasi keluaran (*outcome*) merupakan evaluasi sumatif (*summative evaluation*) yaitu mengukur dan menilai keluaran dan akibat atau pengaruh dari program. Setiap program yang dijalankan pasti menghasilkan akibat. Pelaksanaan pelatihan kerja ini sudah berlangsung empat tahun yang lalu, sudah pasti kita akan akibat yang diperoleh para peserta dalam jangka waktu tersebut. Semua peserta pelatihan menerima perlakuan yang sama, walaupun ada sebagian masalah dari waktu pelatihan yang kurang sesuai dengan materi yang diajarkan dan juga alat yang kurang lengkap serta kurang berfungsi dengan baik.

Akhirnya dampak yang ditimbulkanpun beraneka ragam, meski dalam pelaksanaan pelatihan tidak ada masalah sekalipun tidak menjamin peserta memiliki akibat yang sama. Dari wawancara dengan para penerima program, maka diperoleh hasil dibawah ini.

1. *Effectiveness* (efektifitas, keefektifan).

Pelaksanaan pelatihan ini sudah mencapai tujuan yang hendak dicapai, karena peserta sudah memiliki keterampilan yang sudah didapatkan selama mengikuti program pelatihan. Setelah mengikuti

program pelatihan, peserta pelatihan tidak semuanya membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diikuti pada tahun 2010 karena untuk memulainya mereka mengalami berbagai kendala. Misalnya dari tidak adanya modal, peralatan, bahan baku, tidak mengetahui cara memasarkan barang yang sudah dilaksanakan dan ada yang lebih nyaman dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini daripada harus menggeluti sesuai dengan pelatihan yang diikuti.

2. *Adequacy* (kecukupan).

Desain program yang diajarkan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara pelatihan. Hasil dari mengikuti pelatihan kerja ada yang memuaskan kebutuhan dan kesempatan peserta untuk berkembang dalam bidang yang ditekuni dan ada yang tidak. Memuaskan kebutuhannya bisa dalam bentuk penghasilan dan bisa juga untuk dijadikan konsumsi pribadi. Bagi yang kebutuhan belum terpenuhi, mereka tidak memiliki modal untuk memulainya dalam bentuk uang dan juga mengalami kesulitan dalam memasarkan barang yang sudah mereka hasilkan.

3. *Equity* (kesamaan atau perataan).

Dari hasil wawancara, hasil pelatihan kerja mengalami ketidaksamaan atau perataan atas akibat yang diterima oleh peserta pelatihan kerja. Karena, diantara setiap peserta ada yang masih menekuni usaha sesuai dengan pelatihan yang diikuti, ada yang menunggu pesanan dan bahan baku, ada yang kebingungan dalam memasarkan hasil kerajinannya dan ada ada juga yang tidak menekuni sesuai dengan pelatihan yang sudah diikuti.

4. *Responsiveness* (responsivitas).

Pelatihan kerja ini sudah memberikan materi yang sesuai, dan peserta cukup puas dengan pelatihan ini karena menjangkau sampai didaerah yang masih terpencil. Pelatihan ini mampu memuaskan kebutuhan dalam hal memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, namun ada peserta pelatihan yang kurang mengalami kepuasan dalam hal penghasilan dengan mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini karena, kurangnya modal dan juga tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan barang yang sudah mereka hasilkan.

5. *Appropriateness* (ketepatan atau kelayakan).

Pelatihan kerja yang diterima oleh peserta telah tepat sasaran, dimana mereka adalah perwakilan dari desa yang dapat diberdayakan terlebih mereka sudah memiliki keterampilan dasar. Dari segi kelayakan yang diterima oleh peserta berbeda – beda. Ada yang masih ada yang menekuni usaha yang mereka geluti, ada yang kembali ke pekerjaan awal, ada yang mampu berinovasi sehingga mampu membuat produk baru dan ada juga yang memanfaatkan produk yang mereka hasilkan untuk dikonsumsi secara pribadi.

Dalam pelaksanaan pelatihan ini memiliki akibat positif dan negatif terhadap peserta pelatihan. Itu semua tergantung dari bagaimana usaha dari peserta pelatihan setelah dipancing dengan adanya pelatihan meubeler tersebut. Apabila mereka merasa cocok dan memiliki kemampuan dari segi peralatan, maka beliau akan terus menekuni usaha tersebut. Apabila peserta pelatihan tidak memiliki kemampuan alat maka tidak menutup kemungkinan, peserta pelatihan akan kembali ke mata pencaharian semula.

Mengikuti pelatihan kerja, tidak menuntut pesertanya harus menekuni pelatihan kerja yang diikuti setelahnya. Melainkan dengan adanya pelatihan kerja diharapkan peserta pelatihan memiliki keterampilan dan mampu menghasilkan produk

yang bisa dikonsumsi sendiri atau dapat dijual sehingga dapat memperoleh penghasilan.

Tabel 4.10 Verifikasi evaluasi hasil pelaksanaan program pelatihan kerja pada tahun 2010

No	Kriteria Evaluasi	Standar	Hasil Penelitian	Analisis Data
1.	<i>Effectiveness</i> (efektifitas, kefektifan)			
	a. Meubelair	Apakah pelatihan yang dilaksanakan telah memberikan hasil yang efektif bagi peserta pelatihan?	Hasil pelatihan memuaskan karena mereka memperoleh pengetahuan baru atau tambahan mengenai meubelair.	Cukup efektif walaupun tidak semuanya menekuni usaha meubelair
	b. Pande besi		Hasil pelatihan yang diterima sangat baik sehingga peserta mampu mendesign dan membentuk produknya sesuai dengan keinginan	Pelatihan ini sangat efektif dimana peserta mampu mengkreasikan produk mereka
	c. Anyaman bamboo dan kerajinan tangan		Pelatihan ini sangat berguna, karena peserta memanfaatkan potensi banyaknya bamboo di wilayah mereka	Cukup efektif, karena peserta mampu menghasilkan produk baik peralatan rumah tangga ataupun souvenir

<p>d. Pembuatan pakan ternak dan bokhasi</p>	<p>Pelatihan ini sangat berguna bagi peserta untuk mengetahui bagaimana cara merawat hewan yang baik dan benar, serta memanfaatkan kotoran hewan ternak yang dimiliki untuk dijadikan pupuk</p>	<p>Cukup efektif, karena peserta mampu merawat hewan ternaknya dengan baik, dan mampu membuat pupuk sendiri</p>
<p>e. Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)</p>	<p>Hasil dari mengikuti pelatihan membuat mereka untuk mampu membuat keripik dan kerupuk</p>	<p>Hasilnya cukup efektif karena mereka mampu menghasilkan produk keripik dan kerupuk</p>
<p>2. <i>Adequacy</i> (kecukupan)</p>		
<p>a. Meubelair</p>	<p>Apakah materi yang telah diajarkan sudah mengembangkan kreatifitas peserta?</p>	<p>Materi yang diberikan tentang meubelair membeikan tambahan pengetahuan pada peserta. Baik dari pembuatan pola sampai menghasilkan barang jadi</p>
<p>b. Pande besi</p>	<p>Pelatihan ini cukup membuat peserta mampu berkreasi sesuai dengan keinginan mereka</p>	<p>Peserta tidak hanya menghasilkan benda tajam juga pegangan dari produk yang dibuat dan sabuk</p>

		benda tajam diukir sedemikian rupa sehingga terlihat indah
c. Anyaman bamboo dan kerajinan tangan	Pengetahuan peserta cukup untuk menghasilkan produk kerajinan tangan yang berasal dari bamboo	Pelatihan ini telah membuat peserta kreatif dengan menghasilkan produk berupa peralatan rumah tangga dan juga souvenir
d. Pembuatan pakan ternak dan bokhasi	Pelatihan ini bukan meningkatkan kreatifitas lebih kepada bagaimana cara merawat hewan ternak dan bagaimana cara memanfaatkan kotoran ternak	Pelatihan ini cukup membantu peserta dalam merawat hewan ternak dan memanfaatkan kotoran ternak.
e. Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)	Cukup meningkatkan kreatifitas peserta	Pelatihan ini membuat peserta mampu membuat aneka macam kerupuk dan juga keripik.

 3. Equity/ pemerataan

- | | | | |
|--|--|--|---|
| a. Meubelair | Apakah dampak yang diterima oleh peserta pelatihan merata? | Dampak yang mereka peroleh berbeda-beda. | Hanya 4 orang yang masih menekuni usaha meubelair sedangkan yang lain sudah tidak menekuni. |
| b. Pande besi | | Dampak yang mereka peroleh berbeda-beda | Walaupun hanya satu yang sudah tidak menekuni, namun hasil yang diterima peserta yang masih bekerja sebagai pande besi memiliki perbedaan dari jumlah penghasilan, karena tergantung dimana tempat mereka memasarkan produknya. |
| c. Anyaman bamboo dan kerajinan tangan | | Dampak yang mereka peroleh sama | Hal ini karena anyaman bamboo dan kerajinan tangan hanya dijadikan sebagai pekerjaan sampingan oleh peserta dan dalam pengerjaannya berdasarakan pesanan dan dilakukan bersama |
-

d. Pembuatan pakan ternak dan bokhasi

Dampak yang mereka peroleh sama, kecuali satu orang yang sudah tidak memiliki hewan ternak

Peserta pelatihan lebih menggunakan keterampilan merawat dan membuat paan ternak untuk kepentingan pribadi bukan untuk memperoleh penghasilan.

e. Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)

Dampak yang mereka peroleh berbeda-beda

Hal yang membedakan adalah dari besarnya modal dan produk yang dihasilkan serta tempat memasarka produknya

4. Responsiveness

a. Meubelair

Bagaimana respon yang didapat peserta setelah mengikuti program pelatihan kerja?

Pelatihan ini telah memberikan pengetahuan dari teori hingga praktek.

Responnya cukup baik karena masih ada yang menekuni meubelair walaupun tidak semuanya.

b. Pande besi

Senang dengan adanya pelatihan ini karena mereka memperoleh pengetahuan baru.

Responnya cukup baik walaupun hasilnya berbeda – beda.

<p>c. Anyaman bamboo dan kerajinan tangan</p>	<p>Peserta senang karena dengan mempelajari pelatihan tersebut mereka dapat memperoleh penghasilan tambahan.</p>	<p>Responya sangat baik dan hasilnya dapat digunakan untuk menambah penghasilan keluarga.</p>
<p>d. Pembuatan pakan ternak dan bokhasi</p>	<p>Mereka senang karena sudah bisa merawat hewan ternaknya dengan baik dan benar dan mampu membuat pupuk apabila terjadi kelangkaan pupuk</p>	<p>Responnya baik bahkan mereka berharap untuk mengikuti pelatihan lagi untuk membuat pupuk yang sangat dibutuhkan oleh peserta yang mayoritas petani.</p>
<p>e. Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)</p>	<p>Mereka senang, terutama para ibu – Ibu yang merasa terbantu dengan adanya pelatihan ini.</p>	<p>Responnya sangat baik karena peserta yang mayoritas ibu – ibu bisa menambah penghasilan keluarga dengan menjual keripik</p>
<p>5. Appropriatness / ketepatan dan kelayakan a.Meubelair</p>	<p>Apakah pelatihan kerja ini telah tepat sasaran dan juga menghasilkan sesuatu yang layak bagi peserta? Pelatihan ini tepat sasaran karena hampir semua warga yang bekerja sebagai tukang kayu atau memiliki kemampuan</p>	<p>Tepat sasaran, namun masih kurang layak karena tidak semua peserta mengalami hal yang sama seperti</p>

	dasar	pelatihan yang lain.
b. Pande besi	Telah tepat sasaran	Karena semua peserta pelatihan bekerja sebagai pande besi
c. Anyaman bamboo dan kerajinan tangan	Telah tepat sasaran	Bahan baku bamboo sangat banyak didaerah tempat tinggal peserta. jadi sayang apabila tidak dimanfaatkan.
d. Pembuatan pakan ternak dan bokhasi	Telah tepat sasaran	Karena peserta yang menerima program pelatihan mayoritas petani dan memiliki hewan ternak
e. Kewirausahaan – Teknologi Tepat Guna (TTG)	Telah tepat sasaran	Mayoritas yang mengikuti pelatihan ini adalah ibu-ibu. Selain untuk menambah penghasilan keluarga pelatihan ini sekaligus juga bisa memberdayakan ibu rumah tangga.

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai evaluasi pemberdayaan angkatan kerja melalui pelatihan kerja oleh UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Effectiveness* (efektifitas, keefektifan).

Pelaksanaan pelatihan ini sudah mencapai tujuan yang hendak dicapai, karena peserta sudah memiliki keterampilan yang sudah didapatkan selama mengikuti program pelatihan. Setelah mengikuti program pelatihan, peserta pelatihan tidak semuanya membuka usaha sesuai dengan pelatihan yang diikuti pada tahun 2010, karena untuk memulainya mereka mengalami berbagai kendala. Misalnya dari tidak adanya modal, peralatan, bahan baku, tidak mengetahui cara memasarkan barang yang sudah diproduksi dan ada yang lebih nyaman dengan pekerjaan yang ditekuni saat ini daripada harus menggeluti sesuai dengan pelatihan yang diikuti.

2. *Adequacy* (kecukupan).

Desain program yang diajarkan sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penyelenggara pelatihan. Hasil dari mengikuti pelatihan kerja ada yang memuaskan kebutuhan dan kesempatan peserta untuk berkembang dalam bidang yang ditekuni dan ada yang tidak. Memuaskan kebutuhannya bisa dalam bentuk penghasilan dan bisa juga untuk dijadikan konsumsi pribadi. Bagi yang kebutuhan belum terpenuhi, mereka tidak memiliki modal untuk memulainya dalam bentuk uang dan juga mengalami kesulitan dalam memasarkan barang yang sudah mereka hasilkan.

3. *Equity* (kesamaan atau perataan).

Dari hasil wawancara, hasil pelatihan kerja mengalami ketidaksamaan atau perataan atas dampak yang diterima oleh peserta pelatihan kerja. Karena, diantara setiap peserta ada yang masih menekuni usaha sesuai dengan pelatihan yang diikuti, ada yang menunggu pesanan dan bahan baku, ada yang kebingungan dalam memasarkan hasil kerajinannya dan ada juga yang tidak menekuni sesuai dengan pelatihan yang sudah diikuti.

4. *Responsiveness* (responsivitas).

Pelatihan kerja ini sudah memberikan materi yang sesuai, dan peserta cukup puas dengan pelatihan ini karena menjangkau sampai didaerah yang masih terpencil. Pelatihan ini mampu memuaskan kebutuhan dalam hal memberikan pengetahuan dan pengalaman baru, namun ada peserta pelatihan yang kurang mengalami kepuasan dalam hal penghasilan setelah mengikuti pelatihan tersebut. Hal ini bukan karena pelatihan kerja yang diikuti, tetapi mereka memiliki kesulitan dalam memperoleh modal dan juga tidak mengetahui bagaimana cara memasarkan barang yang sudah mereka hasilkan.

5. *Appropriateness* (ketepatan atau kelayakan).

Pelatihan kerja yang diterima oleh peserta telah tepat sasaran. dimana mereka adalah perwakilan dari desa yang dapat diberdayakan terlebih mereka sudah memiliki keterampilan dasar. Dari segi kelayakan yang diterima oleh peserta berbeda – beda. Ada yang masih ada yang menekuni usaha yang mereka geluti, ada yang kembali ke pekerjaan awal, ada yang mampu berinovasi sehingga mampu membuat produk baru dan ada juga yang memanfaatkan produk yang mereka hasilkan untuk dikonsumsi secara pribadi.

6. Adapun kendala – kendala yang mereka alami sebagai dampak mengikuti pelatihan kerja yaitu, pertama masalah peralatan yang tidak semua memperoleh bantuan peralatan dan walaupun memperoleh alat, alatnya kurang berfungsi dengan baik. Kedua adalah masalah modal, karena modal yang mereka peroleh tergantung pada pesanan atau menyesuaikan harga

bahan baku. Kendala terakhir adalah cara memasarkan barang yang telah dihasilkan. Dilihat dari beberapa peserta, mereka mengalami kesulitan dalam memasarkan barang.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti terkait dengan hasil penelitian diatas adalah sebagai berikut.

1. Perlu untuk memberikan bantuan berupa modal dan juga peralatan agar masyarakat bisa membuka usaha sendiri
2. Perlunya untuk adanya pelatihan kerja lanjutan atau dilatih dengan pelatihan yang baru untuk mengembangkan daerah tidak hanya satu pelatihan saja sehingga dapat menambah masyarakat yang berdaya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwas, Oos M. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung; Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta:Reinka Cipta
- Barthos, Basir 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: PT Karya Unipress
- _____, 1999. *Manajemen Sumber Daya Manusia Suatu Pendekatan Makro*, Jakarta: PT Karya Unipress
- Dr.Samodra wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*Hamalik, Jakarta:Grafindo
- Oemar Hamalik. 2000. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Manajemen Pelatihan Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. Jakarta: pt bumi aksara
- Kamil, Mustofa. 2010. *Model Pendidikan Dan Pelatihan (Konsep Dan Aplikasi)*. Bandung: CV Alfabeta
- Mardikanto, T. 2009. *Sistem penyuluhan pertanian*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Prespetif Kebijakan Publik*. Bandung : Alvabeta
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mutrofin. 2005. *Pengantar Metode Riset evaluasi (Kebijakan, Program, Proyek)*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Ndraha, Taliziduhu. 2002. *Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Notoadmodjo, Soekidjo. 1998. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta
- _____, 2003. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta
- Parsons, Waine. 2008. *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gave Media

- Sastrohadiwiryono, B. Siswanto. 2001. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia. Pendekatan Administratif dan Operasional*. Bandung: PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber daya manusia dan produktifitas kerja*. Bandung: Mandar Maju
- Simanjuntak, Payaman J 1998, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI
- Siswanto, 2005. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi Dan Operasional*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat, Memberdayakan Masyarakat; Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Suroto. 1992. *Strategi Pembangunan dan Perencanaan Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sutrisno, Edy, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Tayibnaps, Farida Yusuf. 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas. Jember*. Jember: Jember University Press.
- Wirawan. (2012). *Profesi dan Standart Evaluasi*. Jakarta: Yayasan Bangun Indonesia & UHAMKA Press.
- Zainal, Muhammad Abidin, 2012. *Dasar – Dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo

Undang – Undang

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

Undang – Undang no.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

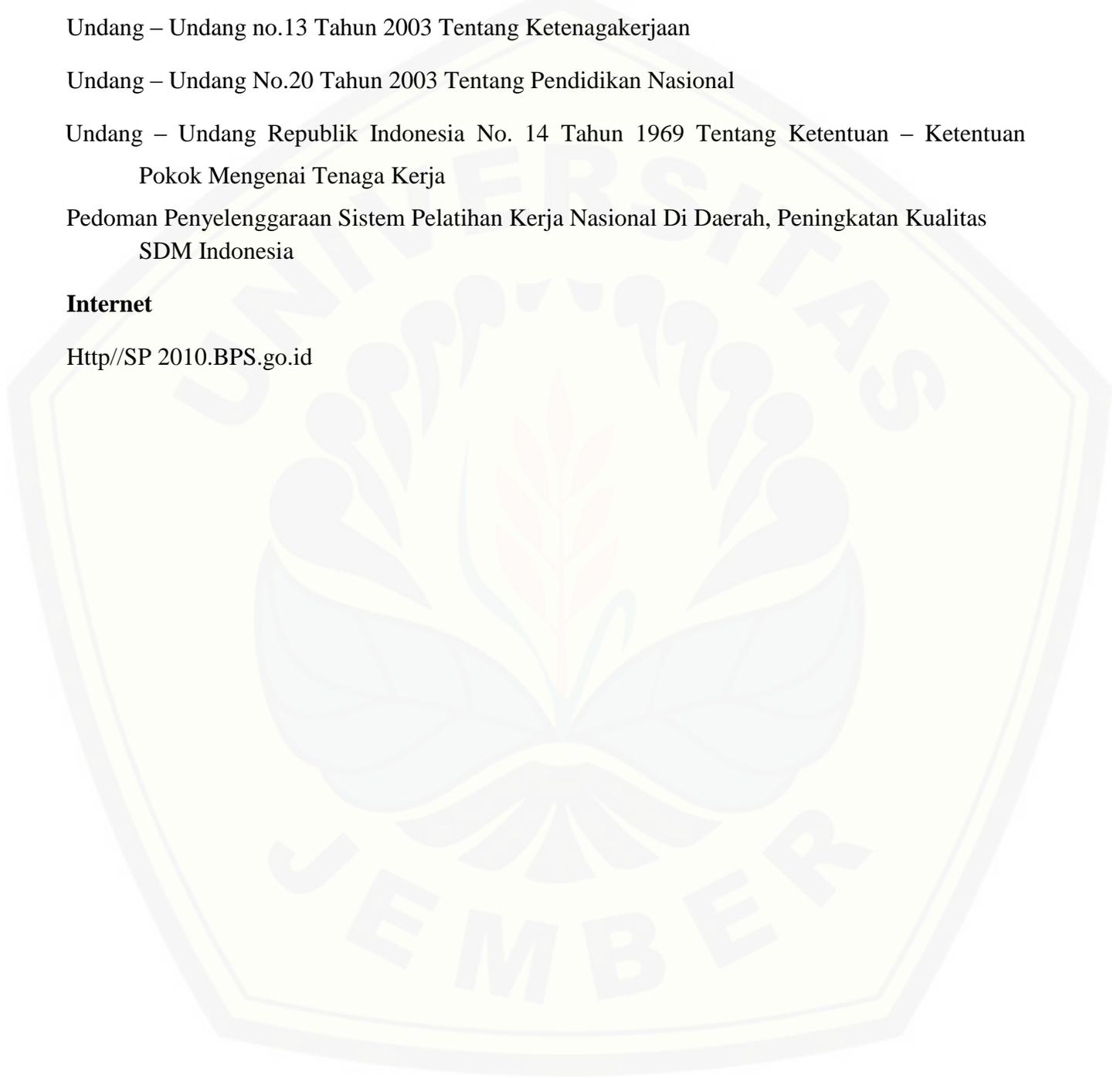
Undang – Undang No.20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional

Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1969 Tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional Di Daerah, Peningkatan Kualitas SDM Indonesia

Internet

[Http//SP 2010.BPS.go.id](http://SP.2010.BPS.go.id)



Lampiran A



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : ~~1107~~/UN25.3.1/LT.5/2014
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan
Penelitian

24 Juni 2014

Yth. Kepala
UPT-PK Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kab. Bondowoso
di -

BONDOWOSO

Memperhatikan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor :
2351/UN25.1.2/LT/2014 tanggal 12 Juni 2014, perihal permohonan ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Asari Nurachmawati/090910201077
Fakultas / Jurusan : FISIP/Ilmu Administrasi Negara Universitas Jember
Alamat / HP : Jl. Mastrip Blok C-16 Jember/Hp. 089685516706
Judul Penelitian : Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Kerja
Oleh UPT-PK Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten
Bondowoso
Lokasi Penelitian : UPT-PK Balai Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans Kabupaten
Bondowoso
Lama Penelitian : Dua bulan (24 Juni 2014 – 24 Agustus 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa
yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.

a.n Ketua
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP.196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan FISIP
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173

Lampiran B



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA
Jl. Raya Situbondo No. 101 Tangsil Kulon - Tenggarang
BONDOWOSO

Bondowoso, 30 Juni 2014

No : 560 / 59 / 430.10.5 / 2014
Lampiran :
Perihal : **Ijin Melaksanakan Penelitian**

Kepada
Yth. Sekretaris Lembaga Penelitian
Universitas Jember
Jln. Kalimantan No. 37
Jember

Merujuk surat saudara No. 1107 / UN 25. 3. 1 / LT. 5 / 2014 Tanggal 24 Juni 2014 Perihal Permohonan Ijin melaksanakan penelitian di UPT-PK Bondowoso dari tanggal 24 Juni 2014 s/d 24 Agustus 2014 terhadap mahasiswi dengan identitas

Nama / NIM : ASARI NURACHWATI / 090910201077
Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Negara
Alamat / No Hp : Jl. Mastrib blok c16 / HP 089685516706
Judul Penelitian : Evaluasi Pemberdayaan Angkatan Kerja Melalui Pelatihan Kerja oleh UPT-PK Bondowoso.

Pada prinsipnya kam member ijin kepada mahasiswi tersebut diatas untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai judul peneliti.

Demikian ijin melaksanakan penelitian ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

KEPALA UPT-PK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BONDOWOSO

ABD. SALAM, S.Pd

Penata Tk. I

NIP : 19590706 198003 1 009

Lampiran C



**PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PELATIHAN KERJA**

Jl. Raya Situbondo No. 101 telp. (0332) 422255 Tangsil Kulon - Tenggarang
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN
No. 560 / 89 / 430.10.5 / 2014

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala UPT-PK Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bondowoso menerangkan bahwa :

Nama : ASARI NURACHMAWATI
NIM : 090910201077
Fakultas : FISIP
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Telah selesai melaksanakan penelitian untuk kelengkapan skripsi dari tanggal 24 Juni 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk seperlunya.

Bondowoso, 3 Desember 2014

**KEPALA UPT-PK
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BONDOWOSO**


ABD SALAM, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19590706 198003 1 009

Lampiran D

PEDOMAN WAWANCARA

- I. Kepala UPT BLK Kabupaten Bondowoso
 1. Potensi apa saja yang dimiliki oleh bondowoso?
 2. Pelatihan apa saja yang dilaksanakan oleh UPT-PK Disnakertrans pada tahun 2010?
 3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti program pelatihan kerja?
 4. Target apa yang ingin diraih dalam pelatihan kerja?
 5. Materi apa saja yang diajarkan dalam pelatihan kerja?
 6. Berapa lama jangka waktu pelatihan kerja yang dilaksanakan pada tahun 2010?
 7. Apakah lamanya waktu pelatihan sudah sesuai dengan target pelatihan?
 8. Apa saja fasilitas yang didapat oleh peserta pelatihan?
 9. Prosedur apa saja yang harus dipenuhi untuk mengikuti pelatihan kerja?

- II. Peserta pelatihan kerja meubelair
 1. Apakah anda mengikuti pelatihan kerja?
 2. Darimana anda memperoleh informasi bahwa di UPT-PK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengadakan pelatihan kerja?
 3. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengikuti pelatihan kerja?
 4. Apakah anda memiliki pengalaman dasar sebelumnya tentang pelatihan yang anda ikuti?
 5. Fasilitas apa saja yang ada dapatkan selama mengikuti pelatihan kerja?
 6. Bagaimana system pengajaran tentang pelatihan kerja?
 7. Kesulitan apa yang anda dapatkan ketika mengikuti pelatihan?
 8. Apa saja yang anda dapatkan setelah mengikuti pelatihan kerja?
 9. Kegiatan apa saja yang anda lakukan setelah mengikuti pelatihan kerja?



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, serta memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau, maka perlu menyempurnakan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur dengan menetapkan kembali Peraturan dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik dan Importir Hasil Tembakau;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 3, Seri 'E');
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3, Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU DI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
7. Penyakit akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok adalah semua penyakit yang secara langsung disebabkan dan atau meningkat resikonya oleh paparan hasil tembakau dan atau asap rokok secara aktif maupun pasif.

BAB II

PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

Pasal 2

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau dialokasikan dalam Undangundang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan perubahannya.
- (2) Alokasi dana bagi Hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada daerah Provinsil Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan untuk mendanai kegiatan :
 - a. peningkatan kualitas bahan baku;
 - b. pembinaan industri;
 - c. pembinaan lingkungan sosial;
 - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
 - e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.
- (2) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan karakteristik daerah masing-masing.

Pasal 4

Peningkatan kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau yang meliputi :

- a. Standarisasi kualitas bahan baku;
- b. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah;
- c. Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian;
- d. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku; dan/atau
- e. Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau.

Pasal 5

(1) Standarisasi kualitas bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Peningkatan hasil budidaya komoditas tembakau sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- b. Peningkatan hasil produksi tembakau sesuai permintaan pasar/konsumen.

(2) Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Pembinaan, penyediaan dan pengawasan benih unggul bermutu;
- b. Percontohan Intensifikasi tembakau;
- c. Revitalisasi Tembakau ekspor;
- d. Pengendalian hama dan penyakit tembakau secara terpadu dan ramah lingkungan;
- e. Bimbingan teknologi budi daya tembakau;
- f. Pembinaan usaha tani tembakau; dan
- g. Pengembangan usaha tani tanaman pendukung (cengkeh) dan tanaman alternatif sebagai bahan bakar tembakau omprongan (turi).

(3) Pengembangan sarana laboratorium uji dan Pengembangan metode pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:

- a. Pembangunan sarana laboratorium uji komoditas tembakau;
- b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia UJI laboratorium.

(4) Penanganan panen dan pasca panen bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, meliputi :

- a. Pengembangan teknologi panen dan pasca panen; dan

- b. Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau.
- (5) Penguatan kelembagaan kelompok tani dan pedagang bahan baku untuk industri dan hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, meliputi :
- a. Pembinaan dan penguatan kelembagaan kelompok tanil gabungan kelompok tanil koperasil asosiasi petani tembakau;
 - b. Fasilitasi kemitraan usaha tani tembakau;
 - c. Perencanaan areal Pengembangan sarana dan prasarana usaha komoditi tembakau; dan
 - d. Perkuatan permodalan melalui skema pembiayaan, hibah, bantuan sosial, modal kerja.

Pasal 6

Pembinaan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan untuk pembinaan industri hasil tembakau, meliputi :

- a. Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus;
- b. Penerapan Ketentuan terkait hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
- c. Pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau;
- d. Pemetaan Industri Hasil tembakau;
- e. Kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku;
- f. Penguatan kelembagaan asosiasi industri hasil tembakau dan/atau rokok; dan
- g. Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan kadar tar dan nikotin rendah dengan penerapan Good Manufacture Practices (GMP).

Pasal 7

- (1) Pendataan mesin/peralatan mesin produksi hasil tembakau (registrasi mesin/peralatan mesin) dan memberikan tanda khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :
- a. Pendataan, verifikasi, kodifikasi dan sertifikasi mesin pelinting sigaret (rokok); dan
 - b. Peningkatan pengawasan penggunaan mesin pelinting sigaret (rokok) dalam rangka monitoring dan evaluasi.
- (2) Pembentukan kawasan industri hasil tembakau sebagaimana maksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. Kajian pembentukan kawasan industri hasil tembakau;

- b. Pengadaan lahan kawasan industri hasil tembakau;
 - c. Pembangunan kawasan industri hasil tembakau; dan
 - d. Penyediaan sarana prasarana pendukung pembentukan kawasan industri hasil tembakau.
- (3) Pemetaan Industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. Pendataan industri hasil tembakau (rokok); dan
 - b. Pembangunan sistem dan database industri hasil tembakau.
- (4) Kemitraan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) dan usaha besar dalam pengadaan bahan baku sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf e, meliputi :
- a. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam wadah Koperasi;
 - b. Secara bertahap bagi koperasi yang memenuhi syarat diikutsertakan kemitraan dengan usaha besar dalam pengadaan bahan baku.

Pasal 8

Pembinaan lingkungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, digunakan untuk meminimalkan dampak negatif kegiatan industri hasil tembakau dari hulu hingga hilir, meliputi :

- a. Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- b. Penerapan manajemen limbah Industri hasil tembakau yang mengacu kepada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum;
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok;
- e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau; dan/atau
- f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan antara lain melalui bantuan permodalan dan sarana produksi.

Pasal 9

Pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

a. Pembinaan masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya melalui prioritas program yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran, kemiskinan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan potensi daerah, melalui :

1) Pemetaan, Pembinaan kemampuan, keterampilan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;

2) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja di industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau dalam rangka alih profesi tenaga kerja, meliputi:

- Tenaga kerja ter-PHK;
- Tenaga kerja yang terkena efisiensi pengurangan jam kerja dan/atau dirumahkan;
- Tenaga Kerja kontrak, borongan dan/atau musiman; dan
- Tenaga kerja yang tempat usahanya mengalami pailit dan/atau gulung tikar.

3) Penciptaan dan perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau, melalui :

- Bantuan penguatan permodalan; dan
- Bantuan sarana dan prasarana.

4) Fasilitasi penempatan kerja di sektor formal bagi masyarakat, tenaga kerja dan/atau keluarganya di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau, dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;

5) Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDM pelaku usaha dan masyarakat dilingkungan industri rokok;

6) Pemberdayaan, peningkatan kemampuan, keterampilan kerja, pendampingan dan/ atau pemberian bantuan sosial di daerah Industri hasil tembakau dan/ atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau untuk Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

b. Penerapan Sistem Manajemen Limbah Industri Hasil Tembakau yang mengacu kepada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi :

- 1) Sosialisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan industri pendukungnya; .
 - 2) Pembinaan Sistem Manajemen Lingkungan (SML) kegiatan perkebunan tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya serta pelayanan kesehatan paru;
 - 3) Pengawasan dan pemantauan kinerja pengelolaan lingkungan pada kegiatan Perkebunan Tembakau dan industri hasil tembakau dan pendukungnya yang mengacu pada pelaksanaan dokumen lingkungan (AMDAL, UKU UPL);
 - 4) Pengadaan prasarana pemantauan lingkungan dalam rangka pengawasan kinerja pengelolaan lingkungan bagi kegiatan perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - 5) Fasilitasi pengelolaan lingkungan bagi perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya;
 - 6) Penyusunan data base, pemetaan profil dan inventarisasi serta identifikasi potensi pencemar lingkungan, penyusunan baku mutu air limbah industri rokok, penyusunan dokumen lingkungan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran pada perkebunan tembakau, industri hasil tembakau dan pendukungnya.
- c. Penetapan kawasan tanpa asap rokok dan pengadaan tempat khusus untuk merokok di tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, meliputi :
- a. Penetapan kawasan tanpa rokok; dan
 - b. Penyediaan smoking area dan perlengkapannya.
- d. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan dengan penyediaan pelayanan kesehatan untuk penyakit akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok, yang meliputi upaya preventif, kuratif dan rehabilitative, meliputi upaya sebagai berikut :
- 1) Preventif
 - a) Pembinaan, pemantauan, koordinasi dan evaluasi upaya terkait penyakit akibat dampak hasil tembakau dan atau asap rokok;
 - b) Pemeliharaan kesehatan melalui screening dan pendampingan (home care) bagi perokok aktif dan pas if;
 - c) Kajian ilmiah/penelitian terkait dampak hasil tembakau dan atau asap rokok terhadap kesehatan.

2) Kuratif

- a) Penyediaan, pengembangan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- b) Pengadaan obat-obatan termasuk obat bahan alam asli Indonesia, bahan pakai habis dan bahan kimia termasuk reagen bagi fasilitas pemberi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
- c) Pembiayaan penzlnan, sertifikasi dan kalibrasi alat-alat kedokteran dan kesehatan;
- d) Pengadaan prasarana pengolah limbah (IPAL) pada Rumah Sakit khusus akibat dampak hasil tembakau atau asap rokok.

3) Rehabilitatif

- 4) Penyediaan pelayanan kesehatan secara berkala dan berkelanjutan bagi penderita;
- 5) Memfasilitasi eks penderita untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

e. Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi :

- 1) Penguatan sarana dan prasarana lembaga pelatihan guna mendukung penguatan ekonomi produktif masyarakat dan/atau alih profesi tenaga kerja di industri hasil tembakau, lingkungan sekitar industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; dan
- 2) Pembentukan dan pembangunan balai penelitian, pendidikan dan pengembangan industri tembakau (*on farm sampai off farm*).

f. Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dalam rangka pengentasan kemiskinan mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dilaksanakan melalui bantuan permodalan dan sarana produksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, meliputi :

- 1) Pemulihan, penyelamatan dan pengalihan usaha bagi indutri hasil tembakau dengan pengembangan diversifikasi dan atau alih profesi usaha di sektor perdagangan, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan , peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku tembakau melalui program penumbuhan wirausaha baru di sektor industri;
- 2) Bimbingan teknis peningkatan kemampuan ketrampilan teknis produksi dan managemen usaha bagi SDM pelaku usaha dan masyarakat di sektor perdagangan, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan

- di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
- 3) Bimbingan dan fasilitasi perolehan legalitas usaha pedagang, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - 4) Bimbingan, pendampingan dalam pengembangan usaha di sektor industri pada masyarakat di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - 5) Bimbingan, pendampingan dan fasilitasi perolehan hak kekayaan intelektual atas produk hasil diversifikasi dan alih profesi usaha baru di sektor industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - 6) Pembinaan dan fasilitasi dalam rangka penguatan pedagang, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau melalui bantuan permodalan dan sarana usaha produksi;
 - 7) Penataan dan penguatan kelembagaan kelompok usaha ekonomi sejenis di sektor perdagangan, jasa dan industri hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan di lingkungan industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau;
 - 8) Fasilitasi peningkatan dan pengembangan pasar dalam negeri/luar negeri terhadap produk industri hasil tembakau, bahan baku untuk industri hasil tembakau dan hasil produk diversifikasi dan alih profesi usaha baru bagi masyarakat Industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau dengan mengikutsertakan pada pameran, promosi, pasar lelang, temu bisnis, misi dagang.
 - 9) Fasilitasi kemitraan antara Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Koperasi dengan usaha besar dalam pengembangan usaha hasil produk diversifikasi usaha dan alih profesi usaha baru bagi masyarakat industri hasil tembakau dan/atau daerah penghasil bahan baku industri hasil tembakau; dan
 - 10) Penerapan Social Responsibility Tobacco Programme (SRTP) dan Social Responsibility Programme (SRP) meliputi penyusunan, sosialisasi, dan pelatihan SRTP dan SRP.

Pasal 10

- (1) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan menyampaikan ketentuan di bidang cukai kepada masyarakat yang bertujuan agar masyarakat mengetahui, memahami, dan mematuhi ketentuan di bidang cukai.
- (2) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tertentu dan/ atau secara insidental.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - 1) Penyuluhan;
 - 2) Seminar;
 - 3) Forum Diskusi atau Dialog Interaktif;
 - 4) Penyebaran pamflet, brosur, leaflet, spanduk, stiker, billboard dan lain-lain; dan
 - 5) Iklan layanan masyarakat.
- (4) Gubernur/Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk menggerakkan, mendorong dan melaksanakan kegiatan sosialisasi ketentuan di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 11

- (1) Pemberantasan barang kena cukai ilegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dilakukan melalui pengumpulan informasi peredaran hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai yang bukan haknya, dilekati pita cukai bekas pakai, yang tidak dilekati pita cukai polos, yang tidak sesuai dengan peruntukannya pada tempat penjual eceran.
- (2) Penyampaian Informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. dalam hal pelaksana kegiatan adalah gubernur, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat; atau
 - b. dalam hal pelaksana kegiatan adalah bupati/walikota, informasi disampaikan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai setempat.

BAB III

RANCANGAN KEGIATAN

Pasal 12

- (1) SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur membuat dan menyampaikan rancangan program

kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum tahun anggaran berjalan.

- (2) Bupati/Walikota membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum tahun anggaran berjalan.
- (3) Gubernur membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan konsolidasi rancangan program kegiatan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri Dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah pada awal tahun.

BAB IV
PELAPORAN
Pasal 13

- (1) SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Bupati/Walikota membuat laporan alokasi penggunaan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur melalui Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten/Kota dan disampaikan kepada Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur cq. Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Gubernur membuat laporan alokasi penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atas pelaksanaan kegiatan dan laporan konsolidasi dari Bupati/Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) SKPD Pengelola Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Provinsi Jawa Timur dalam menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli ; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (2) Bupati/Walikota dalam menyampaikan laporan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 10 Juli ; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 10 Desember.
- (3) Gubernur dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. untuk semester pertama paling lambat tanggal 20 Juli ; dan
 - b. untuk semester kedua paling lambat tanggal 20 Desember.
- (4) Dalam hal tanggal 10 atau tanggal 20 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (5) Laporan Pelaksanaan Kegiatan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan penggunaan dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan untuk :
 - a. Mengetahui kemajuan dan perkembangan capaian program;
 - b. Menilai kesesuaian pelaksanaan program dengan kebijakan;
 - c. Mengetahui kesesuaian tujuan dan mekanisme yang telah ditetapkan; dan
 - d. Mendokumentasi berbagai kegiatan sebagai bahan untuk menyusun tindakan perbaikan program.
- (3) Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur selaku Sekretariat Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau melakukan monitoring dan evaluasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Bagi Kabupaten/Kota yang terbukti tidak mentaati atau dinilai telah melanggar ketentuan atas penggunaan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, dikenakan sanksi berupa pengurangan sampai dengan pencabutan alokasi dana untuk tahun anggaran berikutnya.
- (2) Apabila terjadi pelanggaran hukum oleh pengelola program atau pihak lainnya, akan diselesaikan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Bupati/Walikota dapat membuat Pedoman Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten/Kota dengan mengacu pada Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 17 Januari 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Tgl 17-1-2012 No. 6 Tahun 2012/D

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TANGGAL : 17 JANUARI 2012

PEDOMAN UMUM PENGGUNAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI JAWA TIMUR

FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

.....*)

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA **):

PERIODE :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	PENCAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA **)

.....

Keterangan :

*) diisi dengan kegiatan yang dilaksanakan

***) diisi dengan pelaksana kegiatan

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 17-1-2012 No. 6 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd
Dr. H. SOEKARWO

Lampiran F



DATA PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN BOKASHI (DBHCHT)
 DESA PUJER BARU KECAMATAN MAESAN KABUPATEN BONDOWOSO
 TANGGAL 24 MEI 2010 SAMPAI DENGAN 04 JUNI 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1.	Imam Ghozali	Bondowoso, 5 Oktober 1976	Desa Pujer Baru RT. 02 RW. 01 Kecamatan Maesan
2.	Mulyadianto	Bondowoso, 18 Desember 1975	Desa Pujer Baru RT. 04 RW. 01 Kecamatan Maesan
3	Sunarto	Bondowoso, 12 April 1972	Desa Pujer Baru RT. 09 RW. 03 Kecamatan Maesan
4	Ahmadi	Bondowoso, 11 Juni 1982	Desa Pujer Baru RT. 10 RW. 03 Kecamatan Maesan
5	Bahrosi	Bondowoso, 05 Mei 1981	Desa Pujer Baru RT. 11 RW. 03 Kecamatan Maesan
6	Imam Bihari	Bondowoso, 15 Juli 1973	Desa Pujer Baru RT. 13 RW. 04 Kecamatan Maesan
7	Suwaji	Bondowoso, 15 April 1972	Desa Pujer Baru RT. 14 RW. 04 Kecamatan Maesan
8	Rudi Hartono	Bondowoso, 14 September 1983	Desa Pujer Baru RT. 15 RW. 04 Kecamatan Maesan
9	Heri Sufriadi	Bondowoso, 19 Juni 1982	Desa Pujer Baru RT. 17 RW. 05 Kecamatan Maesan
10	Ahmadi	Bondowoso, 03 Agustus 1954	Desa Pujer Baru RT. 18 RW. 05 Kecamatan Maesan

DATA PESERTA PELATIHAN MEUBELAIR (DBHCHT)
 DESA MANDIRO KECAMATAN TEGALAMPEL KABUPATEN BONDOWOSO
 TANGGAL 25 MEI 2010 SAMPAI DENGAN 05 JUNI 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Ansori ✓	Bondowoso, 12 September 1940	Desa Mandiro RT. 08 RW. 02 Kecamatan Tegalampel
2	Imam Sunardi	Bondowoso, 02 Desember 1972	Desa Mandiro RT. 09 RW. 02 Kecamatan Tegalampel
3	Karto / P. Yunus ✓ Sawah	Bondowoso, 09 Pebruari 1961	Desa Mandiro RT. 09 RW. 02 Kecamatan Tegalampel
4	Tosan ✓	Bondowoso, 21 April 1970	Desa Mandiro RT. 09 RW. 02 Kecamatan Tegalampel
5	Agustir	Bondowoso, 28 Agustus 1971	Desa Mandiro RT. 12 RW. 02 Kecamatan Tegalampel
6	Muhlisin	Bondowoso, 24 Januari 1980	Desa Mandiro RT. 14 RW. 03 Kecamatan Tegalampel
7	Hosln / P. Us	Bondowoso, 19 Mei 1959	Desa Mandiro RT. 14 RW. 03 Kecamatan Tegalampel
8	Mall ✓	Bondowoso, 01 Januari 1965	Desa Mandiro RT. 16 RW. 03 Kecamatan Tegalampel
9	Ansori	Bondowoso, 28 September 1982	Desa Mandiro RT. 03 RW. 08 Kecamatan Tegalampel

DATA PESERTA PELATIHAN PANDE BESI (DBHCHT)
 DI DESA TUMPENG KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO
 TANGGAL 26 MEI 2010 SAMPAI DENGAN 07 JUNI 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Hanapi (Toto)	Bondowoso, 12 Mei 1975	Desa Tumpeng RT. 01 RW. 01 Kecamatan Wonosari
2	Ahmad Wasil	Bondowoso, 15 Juni 1984	Desa Tumpeng RT. 02 RW. 01 Kecamatan Wonosari
3	Mistali	Bondowoso, 04 Pebruari 1962	Desa Tumpeng RT. 07 RW. 03 Kecamatan Wonosari
4	Sudiono / P. Afi (Pebur)	Bondowoso, 09 Januari 1960	Desa Tumpeng RT. 08 RW. 04 Kecamatan Wonosari
5	Sujono	Bondowoso, 21 Agustus 1969	Desa Tumpeng RT. 10 RW. 04 Kecamatan Wonosari
6	Basuni	Bondowoso, 07 Agustus 1969	Desa Tumpeng RT. 10 RW. 04 Kecamatan Wonosari
7	M. Rofik	Bondowoso, 16 Oktober 1987	Desa Tumpeng RT. 11 RW. 04 Kecamatan Wonosari
8	Darmin / P. Ridwan	Bondowoso, 07 September 1965	Desa Tumpeng RT. 10 RW. 04 Kecamatan Wonosari
9	Fathol Khair	Bondowoso, 01 Januari 1990	Desa Tumpeng RT. 11 RW. 04 Kecamatan Wonosari
10	Yanto / P. Farida	Bondowoso, 02 Juli 1971	Desa Tumpeng RT. 16 RW. 06 Kecamatan Wonosari

**DATA PESERTA PELATIHAN PANDE BESI (DBHCHT)
DI DESA SUMBER KEMUNING KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO
TANGGAL 27 MEI 2010 SAMPAI DENGAN 08 JUNI 2010**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Badrh	Bondowoso, 12 September 1977	Desa Sumber Kemuning RT. 11 RW. 02 Kecamatan Tamanan
2	Cholily	Bondowoso, 16 Desember 1972	Desa Sumber Kemuning RT. 12 RW. 03 Kecamatan Tamanan
3	Junaedi	Bondowoso, 07 Juli 1989	Desa Sumber Kemuning RT. 12 RW. 03 Kecamatan Tamanan
4	Ikno	Bondowoso, 21 Agustus 1970	Desa Sumber Kemuning RT. 14 RW. 03 Kecamatan Tamanan
5	Hosen	Bondowoso, 15 September 1982	Desa Sumber Kemuning RT. 15 RW. 03 Kecamatan Tamanan
6	Budiyono	Bondowoso, 02 April 1980	Desa Sumber Kemuning RT. 15 RW. 03 Kecamatan Tamanan
7	Eddur	Bondowoso, 05 April 1970	Desa Sumber Anom RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tamanan
8	Bahrosi / P. Susi	Bondowoso, 18 Oktober 1973	Desa Sumber Anom RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tamanan
9	Nasan / P. Sum	Bondowoso, 24 Maret 1952	Desa Sumber Anom RT. 03 RW. 01 Kecamatan Tamanan
10	Wiyanto / P. Abdul Aziz	Bondowoso, 16 Juli 1971	Desa Sumber Anom RT. 06 RW. 01 Kecamatan Tamanan

**DATA PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN BOKHASI (DBHCHT)
DI DESA SUMBER TENGAH KECAMATAN BINAKAL KABUPATEN BONDOWOSO
TANGGAL 09 JUNI 2010 SAMPAI DENGAN 19 JUNI 2010**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Salawuddin	Bondowoso, 16 Juni 1981	Desa Sumber Tengah RT. 01 RW. 01 Kecamatan Binakal
2	Samsu Adi Widiantoro	Bondowoso, 06 Agustus 1973	Desa Sumber Tengah RT. 02 RW. 01 Kecamatan Binakal
3	Muhammad Mursidi	Bondowoso, 04 April 1964	Desa Sumber Tengah RT. 04 RW. 01 Kecamatan Binakal
4	Sanijo Sutikno / P. Hasan	Bondowoso, 13 Maret 1973	Desa Sumber Tengah RT. 05 RW. 02 Kecamatan Binakal
5	Dulal	Bondowoso, 27 April 1978	Desa Sumber Tengah RT. 06 RW. 02 Kecamatan Binakal
6	Sullman	Bondowoso, 26 Juli 1954	Desa Sumber Tengah RT. 06 RW. 02 Kecamatan Binakal
7	Abdul Aziz	Bondowoso, 10 April 1958	Desa Sumber Tengah RT. 09 RW. 03 Kecamatan Binakal
8	H. Holil / Asmawi	Bondowoso, 01 Maret 1969	Desa Sumber Tengah RT. 09 RW. 03 Kecamatan Binakal
9	A. Mahram	Bondowoso, 05 Juli 1972	Desa Sumber Tengah RT. 09 RW. 03 Kecamatan Binakal
10	Rakip	Bondowoso, 15 Mei 1968	Desa Sumber Tengah RT. 10 RW. 03 Kecamatan Binakal

DATA PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN BOKASHI (DBHCHT)
 DI DESA BENDOARUM KECAMATAN WONCSARI KABUPATEN BONDOWOSO
 TANGGAL 21 JUNI 2010 SAMPAI DENGAN 01 JULI 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Suanip	Bondowoso, 15 Juni 1980	Desa Bendoarum RT. 16 RW. 07 Kecamatan Wonosari
2	Hosniati / B. inai	Bondowoso, 06 Mei 1982	Desa Bendoarum RT. 16 RW. 08 Kecamatan Wonosari
3	Misbah / P. Dien	Bondowoso, 09 April 1971	Desa Bendoarum RT. 09 RW. 04 Kecamatan Wonosari
4	Hawldjan	Bondowoso, 25 Desember 1961	Desa Bendoarum RT. 01 RW. - Kecamatan Wonosari
5	Bahrul	Bondowoso, 06 Maret 1978	Desa Bendoarum RT. 08 RW. 04 Kecamatan Wonosari
6	Abd. Aziz	Bondowoso, 10 April 1988	Desa Bendoarum RT. 10 RW. 05 Kecamatan Wonosari
7	Hasmuni Hafid	Bondowoso, 07 Juli 1970	Desa Bendoarum RT. 25 RW. - Kecamatan Wonosari
8	Muhammad Hosnan	Bondowoso, -	Desa Bendoarum RT. 16 RW. 08 Kecamatan Wonosari
9	Fathor Rozi	Bondowoso, 23 Maret 1983	Desa Bendoarum RT. 06 RW. 03 Kecamatan Wonosari
10	Musleh / P. David	Bondowoso, 11 Maret 1979	Desa Bendoarum RT. 11 RW. 06 Kecamatan Wonosari

**DATA PESERTA PELATIHAN ANYAMAN BAMBU DAN KERAJINAN TANGAN (DBHCHT)
DI DESA PELALANGAN KECAMATAN WONOSARI KABUPATEN BONDOWOSO
TANGGAL 21 JUNI 2010 SAMPAI DENGAN 01 JULI 2010**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	A h y a r i	Bondowoso, 13 Maret 1963	Desa Pelalangan RT. 09 RW. 09 Kecamatan Wonosari
2	Idris / B. Watik	Bondowoso, 16 Juni 1968	Desa Pelalangan RT. 13 RW. 03 Kecamatan Wonosari
3	P. H. Abd. Halim	Bondowoso, 15 Juni 1945	Desa Pelalangan RT. 11 RW. 03 Kecamatan Wonosari
4	H o f i	Bondowoso, 28 Agustus 1983	Desa Pelalangan RT. 14 RW. 03 Kecamatan Wonosari
5	Basrowi / p. Subairi	Bondowoso, 15 September 1960	Desa Pelalangan RT. 14 RW. 07 Kecamatan Wonosari
6	P. Issena // Satrawe	Bondowoso, 20 Mei 1963	Desa Pelalangan RT. 10 RW. 03 Kecamatan Wonosari
7	Ahmad / P. Ulfa	Bondowoso, 04 Mei 1964	Desa Pelalangan RT. 14 RW. 03 Kecamatan Wonosari
8	P. Rum / S r u j i	Bondowoso, 12 April 1960	Desa Pelalangan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wonosari
9	P. Rosi Buhari	Bondowoso, 10 Pebruari 1963	Desa Pelalangan RT. 11 RW. 03 Kecamatan Wonosari
10	H o s n i	Bondowoso, 11 Juli 1974	Desa Pelalangan RT. 11 RW. 03 Kecamatan Wonosari

**DATA PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN BOKHASI (DBHCHT)
DI DESA PETUNG KECAMATAN PAKEM KABUPATEN BONDOWOSO
TANGGAL 21 JUNI 2010 SAMPAI DENGAN 01 JULI 2010**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Niwi / P. Soni	Bondowoso, 26 Juli 1972	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
2	Arto	Bondowoso, 26 April 1958	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
3	Safi'i	Bondowoso, 15 Juni 1969	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
4	Sademin	Bondowoso, 21 September 1958	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
5	Hatim	Bondowoso, 21 April 1978	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
6	Maimuna	Bondowoso, 15 Juni 1975	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
7	Timan/P. Hos	Bondowoso, 16 Maret 1962	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
8	Mahdi / P. Wipa	Bondowoso, 07 September 1969	Desa Petung RT. 01 RW. 01 Kecamatan Pakem
9	Sahayadi / P. Rut	Bondowoso, 05 Juni 1976	Desa Petung RT. 02 RW. 01 Kecamatan Pakem
10	Mansyursyah	Bondowoso, 23 Januari 1979	Desa Petung RT. 10 RW. 03 Kecamatan Pakem

**DATA PESERTA PELATIHAN PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN BOKHASI (DBHCHT)
DI DESA KONCER DARUL AMAN KECAMATAN TENGGARANG KABUPATEN BONDOWOSO
TANGGAL 2 JULI 2010 SAMPAI DENGAN 14 JULI 2010**

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	Supiyani Hadi	Bondowoso, 23 April 1968	Desa Koncer Darul Aman RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tenggarang
2	Pujianto	Bondowoso, 06 Juli 1977	Desa Koncer Darul Aman RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tenggarang
3	Abdul Hamid	Bondowoso, 12 Pebruari 1981	Desa Koncer Darul Aman RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tenggarang
4	Hasyim	Bondowoso, 02 Maret 1969	Desa Koncer Darul Aman RT. 06 RW. 03 Kecamatan Tenggarang
5	Hosman	Bondowoso, 12 Nopember 1976	Desa Koncer Darul Aman RT. 01 RW. 01 Kecamatan Tenggarang
6	Abdul Manab	Bondowoso, 22 Juli 1968	Desa Koncer Darul Aman RT. 02 RW. 01 Kecamatan Tenggarang
7	Suhartono / P. Huzeimah	Bondowoso, 07 Desember 1971	Desa Koncer Darul Aman RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tenggarang
8	Fernandes Fauzi	Bondowoso, 30 Oktober 1970	Desa Koncer Darul Aman RT. 14 RW. 04 Kecamatan Tenggarang
9	Samlin	Bondowoso, 20 Agustus 1953	Desa Koncer Darul Aman RT. 06 RW. 03 Kecamatan Tenggarang
10	Abdul Hisam	Bondowoso, 29 September 1973	Desa Koncer Darul Aman RT. 06 RW. 03 Kecamatan Tenggarang

DATA PESERTA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN – TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG)
 DI DESA TAMANAN KECAMATAN TAMANAN KABUPATEN BONDOWOSO
 TANGGAL 29 JULI 2010 SAMPAI DENGAN 09 AGUSTUS 2010

NO.	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	B. Hatik	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 13 RW. 03 Kec. Tamanan
2	B. Sop	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 13 RW. 03 Kec. Tamanan
3	B. Har	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 13 RW. 03 Kec. Tamanan
4	B. Hayati	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 13 RW. 03 Kec. Tamanan
5	Faik Khatul H.	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 08 RW. 02 Kec. Tamanan
6	B. Iwan	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 18 RW. 04 Kec. Tamanan
7	Sunanto	Bondowoso, -	Desa Kalianyar RT. 13 RW. 03 Kec. Tamanan
8	Yulianto	Bondowoso, -	Desa Wonosuko RT. 12 RW. 01 Kec. Tamanan
9	Nizen	Bondowoso, -	Desa Wonosuko RT. 12 RW. 03 Kec. Tamanan
10	.P. Hendra / To	Bondowoso, -	Desa Wonosuko RT. 12 RW. 01 Kec. Tamanan
11	Misyati	Bondowoso, -	Desa Tamanan RT. 25 RW. 05 Kec. Tamanan
12	Miswantini	Bondowoso, -	Desa Tamanan RT. 17 RW. 04 Kec. Tamanan
13	Azizah	Bondowoso, -	Desa Tamanan RT. 31 RW. 07 Kec. Tamanan
14	Menik Sugiwati	Bondowoso, -	Desa Tamanan RT. 32 RW. 07 Kec. Tamanan
15	Beng Nuraini	Bondowoso, -	Desa Tamanan RT. 12 RW. 02 Kec. Tamanan
16	Astutik	Bondowoso, -	Desa Gambangan RT. 07 RW. 02 Kec. Maesan
17	Nahriya	Bondowoso, -	Desa Gambangan RT. 06 RW. 02 Kec. Maesan
18	Muryana	Bondowoso, -	Desa Gambangan RT. 14 RW. 02 Kec. Maesan
19	Fat	Bondowoso, -	Desa Gambangan RT. 10 RW. 02 Kec. Maesan
20	Siti Fatimah	Bondowoso, -	Desa Gambangan RT. 11 RW. 02 Kec. Maesan

Lampiran G



Wawancara dengan Bapak ABD Salam selaku Kepala UPT-PK Disnakertrans Kabupaten Bondowoso



Wawancara dengan Bapak Warsis selaku Kepala Desa Mandiro



Wawancara dengan Bapak Yunus, selaku peserta pelatihan meubelair 2010



Wawancara dengan Bapak Mail, selaku peserta pelatihan meubelair 2010



Wawancara dengan Bapak Badrih, selaku peserta pelatihan pande besi 2010



Wawancara dengan Bapak Hosman dan Bapak Abdul Manan, selaku peserta pelatihan pakan ternak dan bokashi 2010



Wawancara dengan Hanapi, selaku peserta pelatihan kerja anyaman bamboo dan kerajinan tangan



Wawancara dengan Ibu Sop Ibu Har, selaku peserta pelatihan kewirausahaan Teknologi tepat guna (TTG)

